



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
KECAMATAN CILINCING
KELURAHAN KALIBARU
Jl. Kalibaru Timur II No. 60 Telp 021-4401884, Fax. 021-4417258, 4404079,
Email : kel_kalibaru@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 14110

Nomor : 742/PU.04.00
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
Pada Indikator Kualitas Informasi

17 September 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi
Informasi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
di

Jakarta

Sehubungan dengan Pengisian Kuesioner Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Pada aspek Komitmen Organisasi dalam kuesioner e-Monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdapat permintaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025;
2. Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara untuk laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara karena Kelurahan Kalibaru merupakan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di bawah naungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Lurah Kelurahan Kalibaru
Sekretaris Kelurahan Kalibaru


Marta Hardi Sarwono
NIP.197010011996031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Camat Kecamatan Cilincing



LKIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

📍 Jl. Laksda Yos Sudarso No. 27 - 29
Tanjung Priok, Jakarta Utara

☎ (62-21) 4303111

🌐 utara.jakarta.go.id

📷 @kotajakartautara

✂ @kotajakut



KATA PENGANTAR



"Alhamdulillah....."

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya menghantarkan kami dalam menjalankan segala aktivitas kerja dan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan media pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. LKIP berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terkait pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara selama tahun 2025 baik di Sekretariat Kota maupun di Kecamatan dan Kelurahan dapat terselenggara dengan baik.

Pelaksanaan tugas tersebut tidak akan dapat terselenggara tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya melalui LKIP ini disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya tugas-tugas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan baik.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta Utara.

Jakarta, Januari 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Hendra Hidayat
NIP. 197211191991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban transparan yang menggambarkan capaian kinerja dan prestasi organisasi terhadap target indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta Perjanjian Kinerja.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Utara pada Tahun 2025 telah menunjukkan kinerja yang baik dan mencapai target indikator kinerja sesuai dengan Naskah Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Beberapa hal yang dilaporkan pada LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2025 ini antara lain :

1. Terjadi pengurangan antara Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 dan 2024 dengan Tahun 2025, terlihat dalam e-Kinerja Walikota Tahun 2023 ada 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, dan pada Tahun 2024 ada 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sedangkan pada Tahun 2025 ada 13 (tiga belas) indikator kinerja, dengan data sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Sasaran Khusus	Sasaran Operasional	Jumlah
1	Tahun 2023	11	14	3	28
2	Tahun 2024	12	9	3	24
		Sasaran Strategis	Sasaran Relevan Lainnya		Jumlah
3	Tahun 2025	4	9		13

Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	SASARAN STRATEGIS			
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	96,80
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	96,80

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	97,22
4		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	96,38
SASARAN RELEVAN LAINNYA				
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92
6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100
8	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3.25
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	100
10	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

2. Sasaran Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 didukung oleh 5 (lima) Program, yaitu :

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	427.857.627.094
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	103.686.582.899
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	1.431.623.589

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik - Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.184.530.678
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	- Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, - Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, - Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	2.721.130.350
	Total		928.881.494.610

Sumber: Bagian P2Keuangan, Triwulan 4, monev2025.bapedadki.net/

3. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pendukung tugas-tugas Kota Administrasi Jakarta Utara. Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara diharapkan mampu menjadi pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Namun berdasarkan analisis beban kerja, jumlah pegawai yang ada tahun 2025 masih belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu :

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah	Kelompok Usia					Jumlah
	L	P		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
Sekretariat Kota	48	38	86	1	21	26	28	10	86
Kecamatan	44	38	82	2	16	21	21	10	70
Kelurahan	167	88	255	5	56	91	52	21	225
PPPK	-	-	-	-	3	30	7	2	42
Total	259	164	423	8	96	168	108	43	423
Persentase	61,23%	38,77%	100%	0,77%	22,96%	29,85%	26,53%	13,78%	100%

Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah	Jumlah PNS Eksisting	ABK Kebutuhan	Selisih
	SD	SMP	SMA	D.III	S1	S2	S3				
Sekretaris Kota	-	-	7	3	49	27	-	86	86	203	-117
Kecamatan	-	-	2	4	33	31	-	70	82	156	-74
Kelurahan	1	-	3	4	89	54	-	150	255	476	-198
PPPK	-	-	30	6	6	-	-	42	-	-	-
Total	1	-	66	35	209	112	-	423	423	835	-389
Persentase	0.24%	0%	15.60%	8.27%	49.41%	26.48%	0%	100%			

LKIP 2025

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB  PENDAHULUAN

BAB  PERENCANAAN KINERJA

BAB  AKUNTABILITAS KINERJA

BAB  PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	3
C. Kedudukan	3
D. Tugas Dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	9
F. Aspek Strategis Organisasi	16
G. Sumber Daya Manusia	34
H. Tindaklanjut Evaluasi AKIP Internal	54
I. Sistematika Penulisan	59



PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Pada Renstra	63
B. Rencana Strategis	70
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	112

DAFTAR ISI

Halaman



AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	131
B.	Analisis Capaian Kinerja	134
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	135
2.	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra	182
3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	187
4.	Faktor Pendukung/Keberhasilan	193
a.	Sumber Daya Manusia	196
b.	Sumber Daya Anggaran	198
c.	Sumber Daya Sarana Prasarana	213
5.	Faktor Penghambat/Kendala	214
C.	Rencana Aksi Ke depan Dalam Menghadapi Kendala/ Mengingatnkan Capaian IKU	216
D.	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	225
E.	Penghargaan	242
F.	Inovasi	246



PENUTUP

A.	Kesimpulan	253
B.	Saran	254

LAMPIRAN :

- I. Naskah Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025
- II. Target Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025
- III. Data Pendukung LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025
- IV. Penghargaan Tahun 2025
- V. Inovasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	9
Tabel 1.2.	Jumlah RT, RW dan LMK Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025	9
Tabel 1.3.	Isu-isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara	30
Tabel 1.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	33
Tabel 1.5.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Unit Kerja	35
Tabel 1.6.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Jenjang Jabatan	36
Tabel 1.7.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Golongan	37
Tabel 1.8.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan	42
Tabel 1.9.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Kelompok Usia	44
Tabel 1.10.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin	47
Tabel 1.11.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Agama	49
Tabel 1.12.	Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2025	52
Tabel 1.13.	Komponen dan Bobot Evaluasi AKIP Sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021	55
Tabel 1.14.	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	55

Tabel 1.15.	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	56
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	64
Tabel 2.2.	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	66
Tabel 2.3.	Target dan Indikator Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	66
Tabel 2.4.	Target IKU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025	67
Tabel 2.5.	Target Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	76
Tabel 2.6.	Target Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025	112
Tabel 2.7.	Target Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025	113
Tabel 3.1.	Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja	131
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025	133
Tabel 3.3.	Pelaksanaan SKM Semester I Tahun 2025	141
Tabel 3.4.	Pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2025	142
Tabel 3.5.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I dan II Tahun 2025	143
Tabel 3.6.	Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Kota Jakarta Utara	162
Tabel 3.7.	Nilai Asisten Sekretaris Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat	162
Tabel 3.8.	Nilai Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan	163
Tabel 3.9.	Nilai Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	164
Tabel 3.10.	Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Kota Jakarta Utara	167
Tabel 3.11.	Nilai Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	167

Tabel 3.12.	Nilai Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan	168
Tabel 3.13.	Nilai Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan	169
Tabel 3.14.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Renstra	183
Tabel 3.15.	Tabel Kemajuan Capaian Strategis	185
Tabel 3.16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Tahun 2025	187
Tabel 3.17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Diskominfo Kabupaten Serang Tahun 2025	190
Tabel 3.18.	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025 Terhadap Sumber Daya Manusia	196
Tabel 3.19.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara	199
Tabel 3.20.	Korelasi Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Serapan Anggaran Tahun 2025	201
Tabel 3.21.	Korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Serapan Anggaran Semester II (Triwulan 4) Tahun 2025	207
Tabel 3.22.	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025	218
Tabel 3.23.	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025	227
Tabel 3.24.	Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025	228
Tabel 3.25.	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025 (Januari s.d Desember 2025)	229
Tabel 3.26.	Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Belanja Per-UKPD Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025	231

Tabel 3.27.	Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025	235
Tabel 3.28.	Rekapitulasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025	237

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara 14
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Eselon 2 dan 3 Kota Administrasi Jakarta Utara 15
Gambar 1.3.	Dokumentasi Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara 34
Gambar 1.4.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Unit Kerja 35
Gambar 1.5.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Jenjang Jabatan 36
Gambar 1.6.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Golongan 41
Gambar 1.7.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan 44
Gambar 1.8.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Kelompok Usia 47
Gambar 1.9.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin 48
Gambar 1.10.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Agama 51
Gambar 1.11.	Grafik Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2025 54
Gambar 1.12.	Pola Pikir Penyusunan LKIP 62
Gambar 2.1.	Alur Keterkaitan Renstra dengan Dokrenda Kota Administrasi Jakarta Utara 70
Gambar 3.1.	Grafik Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara s.d Bulan Desember Tahun 2025 234





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Salah satu dasar penyusunan LKIP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas pencapaian sasaran strategis pada pemerintah daerah yang terdapat pada Perjanjian Kinerja yang telah disetujui bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pada Lampiran I peraturan tersebut di atas, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Lampiran II, dinyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta Utara. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama 1 (satu) tahun anggaran, ke dalam bentuk laporan kinerja, juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari tahun ke tahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah.

Laporan kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Jakarta Utara mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengukur semua aktivitas kerja di lingkungannya, tidak hanya kepada *input* (masukan) dari program satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi Masyarakat.

B. Tujuan dan Manfaat

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Penyusunan LKIP tahun 2025 menggunakan data bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sebagai bahan evaluasi dari kegiatan dan program serta rencana yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun baik di Bagian Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan sebagai bahan informasi dalam pembuatan kebijaksanaan dan pertimbangan serta pengambilan Keputusan Pimpinan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan dan atau kegagalan tentang kinerja tahun 2025 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2025 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2025 baik di Bagian Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

C. Kedudukan

Berdasarkan ketentuan Bab I Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Dalam penjelasan Bab I Definisi Operasional Lampiran XXXVII dinyatakan bahwa Kota Administrasi adalah wilayah kerja Walikota yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa Walikota adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

D. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Bab II Kota Administrasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan mengenai uraian tugas Kota Administrasi adalah :

1. Walikota



HENDRA HIDAYAT
WALI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam Poin A Kedudukan, ayat (1) disebutkan bahwa Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Ayat (2) Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota. Ayat (3) Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada ayat (4) Walikota mempunyai tugas :

- a) Memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- b) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
- c) Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- d) Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
- e) Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Pada ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, Walikota dibantu oleh Wakil Walikota.

2. Wakil Walikota



FERDY SETIAWAN
Wakil Walikota

Dalam ayat (5) dan (6) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Walikota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Walikota. Wakil Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Wakil Walikota mempunyai tugas :

- a) Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
- b) Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- c) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

Dalam Ayat (8) disebutkan bahwa Walikota dan Wakil Walikota merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi.

3. Kota Administrasi

Dalam Poin B Tugas dan Fungsi Ayat (1) Bab II Kota Administrasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 
- a) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b) Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
 - c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - d) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
 - e) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - i) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - j) Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
 - k) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
 - l) Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
 - m) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - n) Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
 - o) Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
 - p) Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
 - q) Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
 - r) Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;

- s) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- t) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Pada ayat (3) disebutkan bahwa Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi tambahan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
- b) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
- c) Fasilitasi pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
- d) Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
- e) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f) Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- g) Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga;
- h) Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

4. Sekretariat Kota



IYAN SOPIAN HADI
Sekretaris Kota Adm. Jakarta Utara

Dalam Poin A Kedudukan Ayat (1) Bab III Sekretariat Kota Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Kota dipimpin oleh Sekretaris Kota.

Ayat (2) disebutkan bahwa Sekretariat Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada ayat (3) disebutkan bahwa Sekretaris Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kota.

Dalam Poin B Tugas dan Fungsi Ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi.

Dalam Ayat (2) Bab III Sekretariat Kota Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Kota menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- b) Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c) Pengoordinasian perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi;
- d) Pengoordinasian dan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik Kota Administrasi;
- e) Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan Kota Administrasi;
- f) Pengoordinasian dan penyusunan pelaporan Kota Administrasi;
- g) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- h) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
- i) Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j) Pengoordinasian dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;

- k) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- l) Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
- m) Pengoordinasian Dewan Kota;
- n) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah berubah penyebutan. Sebelumnya pernah terjadi perubahan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Penyebutan Sub Bagian berubah menjadi Sub Koordinator Urusan.

Maka pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, penyebutan Sub Koordinator Urusan berubah menjadi Sub Kelompok dan tidak termasuk unit kerja struktural.

Bagan Struktur Organisasi Kota Administrasi di bawah ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, secara jelas dapat dilihat pada Laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Bab I Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pada ayat (13) Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penjelasan Bab I Definisi Operasional Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan bahwa pada ayat (1) Kota Administrasi adalah wilayah kerja Walikota yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan.

Pada ayat (4) dinyatakan bahwa Walikota adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pada Bab II Kota Administrasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri atas :

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretariat Kota
4. Kecamatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pada Poin C Susunan Organisasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa susunan organisasi struktural Kota Administrasi terdiri atas :

Pada ayat (1) Susunan organisasi struktural Kota Administrasi terdiri dari:

a. Sekretariat Kota, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi :

- a) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
- b) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;

- c) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
- d) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- e) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
- f) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
- g) Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

- a) Bagian Perekonomian
- b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi :

- a) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi;
- b) Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
- c) Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi;
- d) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi;
- e) Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- f) Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;
- g) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
- h) Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi;
- i) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
- j) Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi;
- k) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi.

3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga;
 - 3) Subbagian Protokol.
- b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Keuangan;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan.
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :

- a) Suku Dinas Sosial Kota Administrasi;
- b) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi;
- c) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
- d) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
- e) Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi;
- f) Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi;
- g) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi;
- h) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi;
- i) Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi;
- j) Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi;
- k) Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.

b. Kecamatan, terdiri dari :

- 1. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran;
 - c) Subbagian Keuangan.
- 2. Seksi Pemerintahan;
- 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Kelurahan, terdiri dari :
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d) Seksi Kesejahteraan Rakyat.

c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Pada Bagian di Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya.

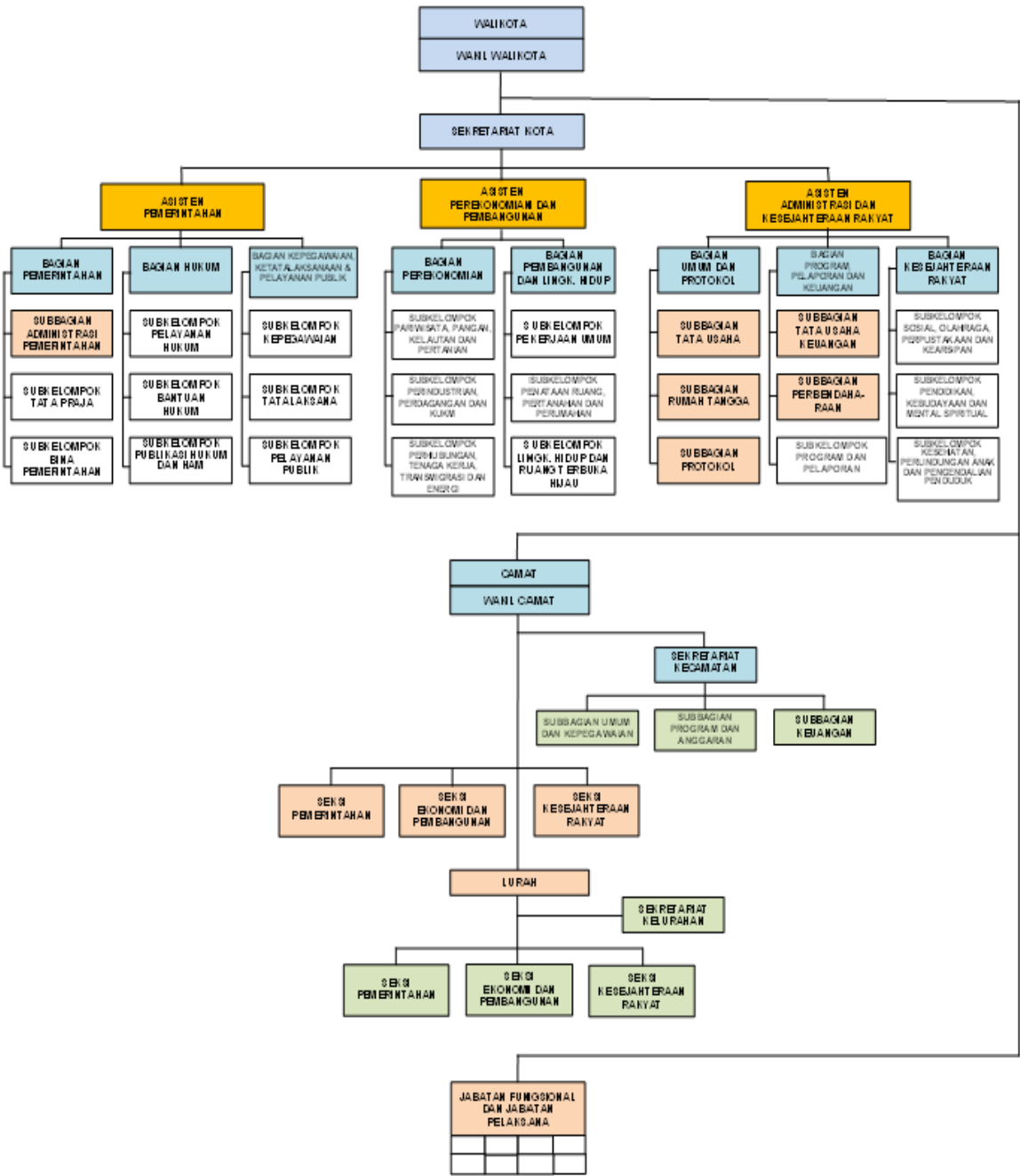
Pada Bab XVI Unit Kerja Non struktural Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ada 18 (delapan belas) Subkelompok yaitu :

- 
1. Subkelompok Bina Pemerintahan ;
 2. Subkelompok Tata Praja;
 3. Subkelompok Pelayanan Hukum;
 4. Subkelompok Bantuan Hukum;
 5. Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM;
 6. Subkelompok Kepegawaian;
 7. Subkelompok Ketatalaksanaan;
 8. Subkelompok Pelayanan Publik;
 9. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 10. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, UKM;
 11. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
 12. Subkelompok Pekerjaan Umum;
 13. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
 14. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
 15. Subkelompok Program dan Pelaporan;
 16. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual;
 18. Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Bagan Struktur Organisasi Kota Administrasi di bawah ini sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, secara jelas dapat dilihat pada lampiran 1 Laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KOTA ADMINISTRASI
SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

(Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah)



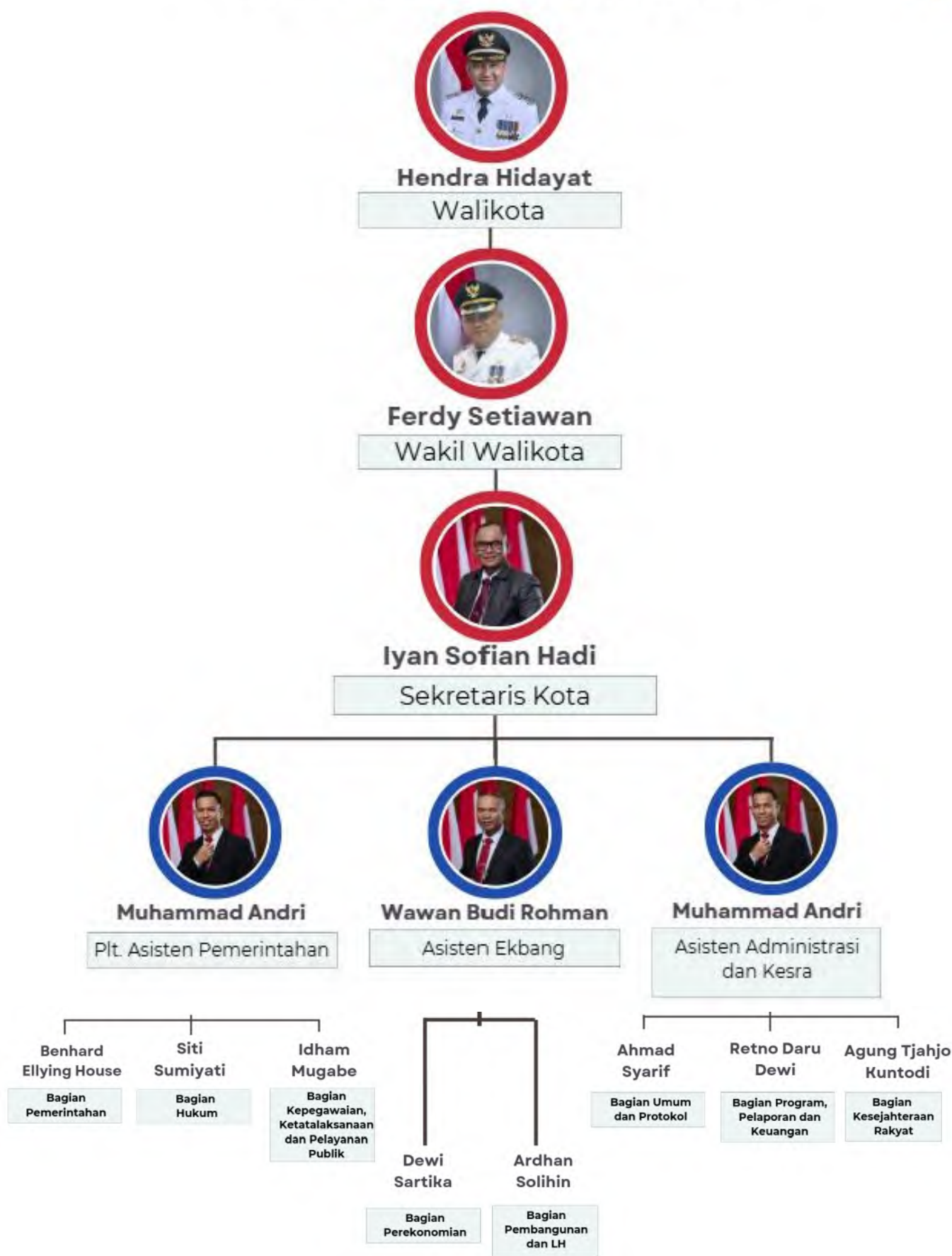
Keterangan :
— : Garis Komando Administratif dan Operasional
— : Garis Komando Operasional

Catatan :
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

JAKARTA, 14 OKTOBER 2025
BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK SETKO ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara

STRUKTUR ORGANISASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Eselon 2 dan 3 Kota Administrasi Jakarta Utara

F. Aspek Strategis Organisasi

Pembahasan Aspek Strategis Organisasi berdasarkan :

1. Permasalahan

Permasalahan Kota Administrasi Jakarta Utara terbagi dalam :

1.1. Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara berdasar dari Kota Jakarta Utara Dalam Angka 2025 dari BPS Kota Jakarta Utara, antara lain :

a. Geografi dan Iklim

Kota Administrasi Jakarta Utara terbentang seluas 146,66 km² dan terbagi atas 6 kecamatan. Berdasarkan data jumlah Kelurahan di Bukan Tepi Laut lebih banyak dibandingkan di Tepi Laut, dan dilihat dari data unsur Iklim menurut bulan yang melebihi batas maksimal setiap bulannya baik Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Jumlah Curah Hujan dan Penyinaran Matahari. Maka Kota Administrasi Jakarta Utara rentan terhadap terjadinya bencana banjir dan kebakaran.

b. Pemerintahan

Jumlah kelurahan di Kota Jakarta Utara pada tahun 2025 adalah sebanyak 31 kelurahan. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara pada tahun 2024 adalah sebesar 614.313 KK, jumlah ini mengalami penurunan jika di banding tahun 2023. Beralih ke sisi politik dan pemerintahan, anggota DPRD di wilayah Jakarta Utara secara umum didominasi oleh anggota DPRD berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 13 orang, dengan anggota DPRD perempuan sejumlah 4 orang. Di sisi lain, ASN Pemerintah Kota Jakarta Utara pada tahun 2025 juga didominasi oleh ASN berjenis kelamin laki-laki.

Apabila dilihat dari Tingkat pendidikannya, sejak tahun 2023 sampai 2024, ASN Pemerintah Kota Jakarta Utara didominasi oleh ASN yang berpendidikan Sarjana (S1).

Menariknya, terdapat satu orang ASN di Pemerintahan Kota Jakarta Utara yang berasal dari latar belakang pendidikan Sekolah Dasar.

c. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data jumlah Penduduk Kota Jakarta Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan 1,67% dibanding tahun 2023. Dari sisi ketenagakerjaan, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang didominasi bekerja sebagai buruh/karyawan dan yang peringkat kedua penduduk berusaha sendiri. Maka laju pertumbuhan penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara yang cenderung meningkat dan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi.

d. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Fasilitas sekolah telah tersedia tersebar di setiap kecamatan, kecuali fasilitas perguruan tinggi di Kecamatan Kelapa Gading tidak ada. Dinilai dari rasio murid terhadap guru dan sekolah, secara rata-rata paling kecil di Kecamatan Kelapa Gading, karena jumlah murid yang tidak begitu banyak, atau jumlah guru dan sekolah yang sudah cukup banyak untuk menyediakan pendidikan terhadap murid di Kecamatan tersebut. Dari sisi kesehatan, jumlah tenaga kesehatan didominasi oleh tenaga keperawatan sebanyak 4.350 orang, disusul tenaga medis sebanyak 2.369 orang, dan tenaga psikologi klinis sebanyak 12 orang. Dengan jumlah penduduk 1.832.032 jiwa, maka layanan pendidikan dan kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara belum merata.

e. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Pada 2025, total luas panen tanaman di Jakarta Utara terbesar ada di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading. Untuk tanaman buah-buahan terbesar ada di Kecamatan Pademangan dan Kecamatan Penjaringan, untuk tanaman padi seluruhnya dari Kecamatan Cilincing.

Untuk sub sektor perikanan, produksi ikan ada di TPI Kamal Muara dan di TPI Kalibaru. Tidak ada masalah.

f. Industri, Pertambangan dan Energi

Pada 2025, terdapat 12 lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Jakarta Utara yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari sisi pelayanan ketatakotaan terdapat 185 pelayanan pengukuran di Kota Jakarta Utara, tertinggi ada di Kecamatan Kelapa Gading. Dari jumlah tersebut, 172 pelayanan berhasil diselesaikan. Sementara untuk pelayanan keterangan rencana kota, terdapat 285 permintaan yang masuk dengan total 265 pelayanan berhasil diselesaikan. Untuk data realisasi perizinan IMB, sepanjang 2024 terdapat 2.352 perizinan yang masuk melalui UP PM PTSP Kota Jakarta Utara dan terdapat 6 perizinan melalui PM PTSP Kecamatan Koja. Maka Infrastruktur dasar Kota Administrasi Jakarta Utara masih belum menjangkau seluruh Masyarakat.

g. Pariwisata

Pada 2025, jumlah rumah makan/restoran di Kota Jakarta Utara sebesar 3.734 lokasi, terbanyak ada di Kecamatan Penjaringan sebesar 704 restoran. Sementara untuk jumlah wisatawan mancanegara yang melalui Bandara Soekarno Hatta sebesar 2.524.253 wisatawan. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Agustus 2024 sebesar 272.849 wisatawan. Sementara jumlah wisatawan mancanegara yang melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sebesar 1.843 wisatawan, dan dari Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 9.473 wisatawan. Untuk jumlah kunjungan ke objek wisata, pada 2024, jumlah kunjungan di Taman Impian Jaya Ancol sebesar 9.797.419 wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara.

Untuk hotel berbintang, terdapat 38 hotel berbintang di Jakarta Utara. Sementara untuk hotel melati ada 34 hotel.

Dari jumlah tersebut, terdapat 6.373 kamar dari 38 hotel berbintang. Sementara dari 34 hotel non bintang, terdapat 1.160 kamar hotel. Maka Kota Administrasi Jakarta Utara perlu adanya pengembangan organisasi sosial budaya seperti promosi.

h. Transportasi dan Komunikasi

Pada 2025, total panjang jalan di Kota Jakarta Utara yaitu 1.102,69 km, yang terdiri dari 249,48 km jalan nasional dan 853,21 km jalan provinsi. Selama tiga tahun terakhir, tidak ada penambahan maupun pengurangan panjang jalan. Jika dilihat dari jenis permukaan jalan, 341,28 km memiliki permukaan aspal, sementara 761,41 km memiliki permukaan beton. Pada 2024, jumlah penumpang kapal yang datang di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 484.362 penumpang. Sementara, penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 272.219 penumpang. Jadi yang datang lebih banyak ketimbang yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok.

i. Perbankan, Koperasi dan Harga-Harga

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan indikator inflasi di Indonesia, sejak Januari 2024 dihitung dari 82 kota, mencakup sekitar 225 sampai 462 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok yaitu: Bahan Makanan (makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau), Perumahan (air, listrik, gas, dan bahan bakar), Sandang, Kesehatan, Pendidikan (rekreasi, dan olahraga), Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdesaan (IHP) dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah Formula Laspeyres yang telah dimodifikasi. Maka jumlah Jakpreneur yang cenderung menurun.

j. Pengeluaran Penduduk

Tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Jakarta Utara untuk komoditas makanan sebesar Rp 1.205.110. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.149.089. Sementara untuk komoditas bukan makanan, memiliki rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp 1.840.628. Angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 2.033.340. Maka Kota Administrasi Jakarta Utara masih terdapatnya ketimpangan pendapatan.

k. Perdagangan

Pada 2024, berdasarkan data dari BPS terdapat 23 pasar di Kota Jakarta Utara. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Sementara untuk jumlah warung, pada 2024 tidak tersedia pada sumber data. Data arus barang perdagangan pada 2023 menunjukkan volume bongkar barang lebih banyak dibandingkan volume muat, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Volume bongkar perdagangan dalam negeri terbesar yaitu pada bulan Desember 2023, yaitu sebesar 509.572 ton. Sementara volume bongkar perdagangan dalam negeri terendah terdapat pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar 333.644 ton. Volume muat perdagangan dalam negeri terbesar pada bulan Oktober 2023 sebesar 244.159 ton. Sementara volume muat perdagangan dalam negeri terendah terdapat pada bulan Februari 2023 sebesar 95.801 ton. Volume bongkar perdagangan luar negeri terbesar yaitu pada bulan Maret 2023, yaitu sebesar 837.162 ton. Sementara volume bongkar perdagangan luar negeri terendah terdapat pada bulan September 2023 yaitu sebesar 595.198 ton. Volume muat perdagangan luar negeri terbesar pada bulan Desember 2023 sebesar 1.280.563 ton. Sementara volume muat perdagangan luar negeri terendah terdapat pada bulan April 2023 sebesar 114.755 ton.

l. Sistem Neraca Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara pada tahun 2024 sebesar 4,29 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki laju pertumbuhan terbesar dengan perolehan 10,91 persen.

m. Perbandingan Antar Wilayah

Pada 2024, jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 10.677.975 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak yaitu Kota Jakarta Timur sebesar 3.086.010 jiwa. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 29.088 jiwa.

Kota Jakarta Utara pada 2024 memiliki jumlah penduduk 1.819.009 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, pada Maret 2024 terdapat 464,93 ribu penduduk miskin di DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, Kota Jakarta Utara menyumbang 120,51 ribu penduduk miskin. Wilayah dengan penduduk miskin paling banyak yaitu Kota Jakarta Timur dengan total 121,52 penduduk miskin, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 3,49 ribu penduduk. namun, hal tersebut sejalan dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jakarta Utara pada 2024 sebesar 82,13 (skala 0-100). Sementara IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 84,15. Wilayah dengan IPM tertinggi di DKI Jakarta yaitu Kota Jakarta Selatan, sebesar 87,57 dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan IPM terendah sebesar 76,69 poin. Maka angka kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara masih tinggi.

1.2. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan terkait pelayanan kepada masyarakat yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

- a. Keuangan masih terbatas.
- b. Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasi;
- c. Masih belum optimalnya unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. Perlu peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan yang tidak masuk dalam penilaian indeks kepuasan Masyarakat;
- e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

1.3. Permasalahan Dominan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, diketahui bahwa permasalahan yang dominan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu :

- a. Rentan terhadap terjadinya bencana banjir dan kebakaran;
- b. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat dan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi;
- c. Layanan pendidikan dan kesehatan belum merata;
- d. Infrastruktur dasar masih belum menjangkau seluruh Masy;
- e. Belum maksimal pengembangan organisasi sosial budaya seperti promosi;
- f. Angka kemiskinan yang masih tinggi;
- g. Masih terdapatnya ketimpangan pendapatan.

2. Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan janji Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta telaah kebijakan arah pengembangan kewilayahan Jakarta Utara berdasarkan RPD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026.

Dalam rangka memberikan hasil pelayanan dengan amanah kepada masyarakat, maka dapat dihubungkan dengan isu-isu sebagai berikut yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata sosial;
- c. Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Utara.

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara periode 2023-2026 maka Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara terbagi dalam :

2.1 Isu Global

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara periode 2023-2026 maka Isu global di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Global Teknologi

Globalisasi teknologi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kecepatan difusi teknologi di seluruh ekonomi global. Hal ini mengacu pada penyebaran teknologi di seluruh dunia, dan khususnya dari negara maju ke negara berkembang. Globalisasi teknologi terjadi pada tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini lantaran perkembangan yang pesat dalam inovasi teknologi di abad ke 21 dan adanya kemudahan akses untuk memindahkan teknologi ke seluruh ekonomi dunia. Kendati demikian, terdapat kekhawatiran bahwa globalisasi teknologi menimbulkan kesenjangan digital antara si kaya dan si miskin.

b. Green Economy

Green Economy berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang bersifat ramah lingkungan. Hal ini dilakukan karena terjadinya degradasi lingkungan yang semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

c. Climate Change

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan secara langsung/tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan.

Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya. Konsentrasi GRK yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.

d. Covid-19

Hadirnya Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Covid-19 telah menjangkiti jutaan orang sejak kasus pertama diumumkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial Masyarakat.

2.2. Isu Nasional

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu nasional di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

b. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan meningkatnya urbanisasi.

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

d. Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lingkungan dan isu transformasi pelayanan publik ini mencakup profesionalitas ASN, pelayanan publik, kelembagaan, dan akuntabilitas.

e. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

2.3. Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu regional di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Ketahanan terhadap Bencana

Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap bencana banjir dan genangan. Hal ini disebabkan tingkat kemiringan lahan antara 0-3% dan terdapatnya 13 aliran sungai yang bermuara di laut utara Jakarta. Adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan.

Selain itu juga ditambah dengan kondisi di mana sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.

b. Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta termasuk kategori sangat tinggi. Namun demikian, kualitas pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta tetap harus ditingkatkan pada beberapa aspek seperti peningkatan literasi dan kualitas PAUD pada pendidikan serta pengendalian penyakit dan masalah gizi masyarakat pada kesehatan.

c. Ekonomi Inklusif

Tahun 2023 merupakan tahun pemulihan dari Pandemi Covid-19, di mana tahun 2021 dan 2022 saat pandemi memberikan dampak dan perubahan yang besar bagi perekonomian Indonesia tidak terkecuali bagi Provinsi DKI Jakarta. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sempat melambat dan bahkan mengalami kontraksi, namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta kembali positif yang merupakan sinyal baik untuk pemulihan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

d. Kota Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memperhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang dulu ada.

e. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

f. Pemerataan Pembangunan

Ketimpangan antar wilayah dapat terlihat secara jelas melalui besaran tingkat kemiskinan antar wilayah yang tidak seimbang. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 14,87 persen dan di wilayah administrasi Kota Jakarta Utara mencapai 6,78 persen pada tahun 2020, jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,69 persen.

Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata Provinsi yaitu Jakarta Pusat sebesar 4,51 persen, Jakarta Timur sebesar 4,16 persen, Jakarta Selatan 4,34 persen dan Jakarta Barat sebesar 4,25 persen. Disparitas lainnya yang menjadi parameter adalah nilai IPM antar wilayah.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang masih pada tingkat kisaran 70 yaitu sebesar 72,10, di mana IPM Provinsi sebesar 81,11. Sedangkan wilayah lain nilai IPM sudah berada di atas 80.

2.4. Isu Lokal (Kota Administrasi Jakarta Utara)

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu lokal di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Kota Administrasi Jakarta Utara rentan terhadap terjadinya bencana banjir, penurunan muka tanah dan kebakaran.

Secara geografis, Jakarta Utara berada di wilayah pesisir landai, dengan area daratan berada di bawah rata-rata muka laut, dilewati setidaknya 13 sungai besar yang sebagian di antaranya mempunyai hulu sungai di selatan luar wilayah Jakarta. Seiring perubahan iklim, cuaca ekstrem kerap terjadi hingga menimbulkan curah hujan tinggi dan menyebabkan banjir. Sesuai dengan tren penurunan muka tanah yang terdeteksi sekitar 1-15 cm per tahun, luasan daerah terdampak akan semakin luas dan diproyeksikan pada 2025 sebagian besar wilayah utara Jakarta berada pada zona merah.

b. Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Dalam kurun waktu tahun 2021, kasus kriminal yang terjadi di wilayah Jakarta Utara menurun hingga 28 persen dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2020, terdapat 1.113 laporan kasus kriminal yang diterima Polres Metro Jakarta Utara, dengan penyelesaian sebanyak 1.756 kasus. Sementara tahun 2021, tindakan kriminal yang dilaporkan sebanyak 800 kasus dan laporan kasus kriminal yang diselesaikan sebanyak 1.618 kasus. Meskipun angka kriminalitas cenderung menurun, namun tetap diperlukan berbagai upaya untuk menjadikan Jakarta Utara sebagai kota yang ramah, aman, dan berbudaya bagi warganya.

c. Permukiman Kumuh

Perhitungan Kementerian ATR/BPN, ada sekitar 118 kelurahan yang kumuh dari 267 kelurahan di Jakarta. Daerah kumuh tersebar di enam kabupaten/kota administrasi di Jakarta, paling banyak di Jakarta Utara. Kawasan kumuh di Jakarta Utara sebesar 39 persen, Jakarta Barat 28 persen dan Jakarta Selatan 19 persen. Kemudian Jakarta Timur 12 persen, Jakarta Pusat 11 persen dan Kepulauan Seribu 1 persen. Faktor yang menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh seperti pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali, tingkat kemiskinan dan layanan perkotaan yang belum mencakup seluruh lapisan Masyarakat.

d. Ekonomi dan Wisata Pesisir

Selain terdapat 3 (tiga) pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Baru yang melayani lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang, di Jakarta Utara juga terdapat pusat wisata sejarah, bahari, budaya dan berbagai pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, sektor pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi untuk wilayah Jakarta Utara sesuai dengan karakteristiknya sebagai daerah pesisir adalah melalui optimalisasi kawasan pariwisata pesisir. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, di mana rencana pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) huruf k untuk Pola Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, diarahkan untuk pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir.

e. Kewenangan Penyelenggaraan Kota Administrasi

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan

mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Sementara itu, Kota Administrasi Jakarta Utara berkedudukan sebagai perangkat yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut berdampak pada pemberian pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Utara.

2.5. Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

Berdasarkan permasalahan yang dominan dan isu-isu lingkungan strategis, dan potensi daerah, maka isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3. Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara

Permasalahan Dominan	Isu-Isu Lingkungan				Isu Strategis Jakarta Utara
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Utara)	
Rawan bencana banjir dan kebakaran	Climate change		Ketahanan terhadap bencana	Pengelolaan lingkungan pesisir	Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan
	Covid-19	Peningkatan SDM	Pembangunan manusia		
Infrastruktur kota belum merata		Pembangunan infrastruktur	Kota berkelanjutan	Permukiman kumuh	Pemberdayaan masyarakat
Angka kemiskinan masih tinggi	Green economy	Percepatan pemulihan ekonomi	Ekonomi inklusif	Ekonomi dan wisata pesisir	
Tingkat Pengangguran terbuka masih tinggi					
Angka kriminalitas masih tinggi		Stabilitas politik dan keamanan		Gangguan keamanan dan ketertiban	
Partisipasi masyarakat belum optimal			Pembangunan budaya multikultur		

Permasalahan Dominan	Isu-Isu Lingkungan				Isu Strategis Jakarta Utara
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Utara)	
Kewenangan terbatas hanya koordinasi, evaluasi, dan pengendalian	Globalisasi teknologi	Transformasi pelayanan publik	Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik	Kewenangan penyelenggaraan kota administrasi	Kolaborasi pelayanan publik
Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasikan					

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

Adapun penjelasan isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan

Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan merupakan hal yang harus dilakukan Kota Administrasi Jakarta Utara mengingat kondisi fisik geografis yang rentan terhadap bencana.

Pengelolaan kawasan pesisir mencakup juga pengelolaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini ditujukan agar seluruh masyarakat dapat mengakses dan merasakan sarana dan prasarana tersebut terutama sarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar seperti air bersih dan sanitasi.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat terutama ditujukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdaya secara ekonomi, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan. Hal ini penting karena citra Kota Administrasi Jakarta Utara selama ini dianggap “keras dan tidak ramah”.

c. Kolaborasi pelayanan publik

Kolaborasi pelayanan publik dengan berbagai pihak merupakan cara yang paling ideal dilakukan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka meningkatkan dan mengakselerasi kualitas pelayanan publik. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan UKPD, dunia pendidikan, perusahaan yang melaksanakan TSLDU, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Utara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan yang lebih operasional.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya manajemen pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Meningkatnya manajemen pengelolaan kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
4. Meningkatnya kolaborasi dalam pemberian pelayanan publik.

- 5. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 6. Terpenuhinya sumber pendapatan sebagai pendukung pembiayaan pembangunan.
- 7. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan.

Tabel 1.4. Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

Tujuan RPD :	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
Sasaran RPD :	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Utara
			Meningkatkan manajemen pengelolaan kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara
			Meningkatkan kolaborasi dalam pemberian pelayanan publik

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

G. Sumber Daya Manusia



Gambar 1.6. Dokumentasi Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Data Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara periode tahun 2025 (per Desember 2025) ada sebanyak 423 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT UNIT KERJA

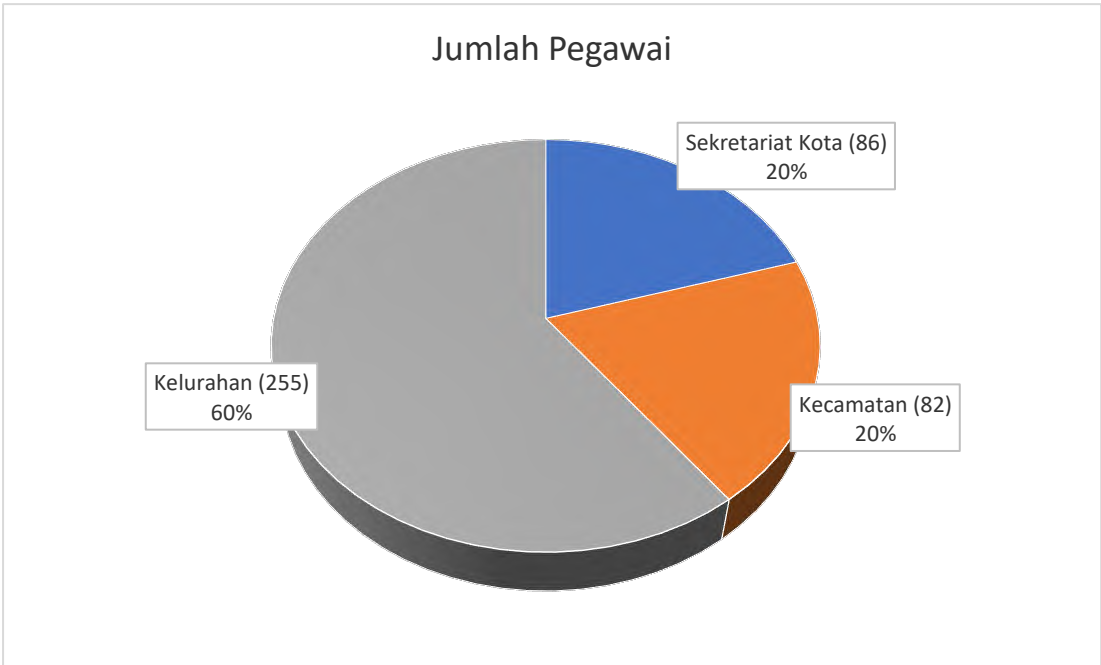
Ditinjau berdasarkan unit kerja, sebagian besar pegawai berada pada Kelurahan, yakni sebanyak 255 orang (60,28%) dari total pegawai sebanyak 423 orang, hal ini karena banyaknya kelurahan berjumlah 31 Kelurahan. Urutan kedua terbesar adalah pegawai berada pada Sekretariat Kota, yakni sebanyak 86 orang (20,33%) dari total pegawai, hal ini karena banyaknya Bagian di Sekretariat Kota berjumlah 8 Bagian. Sedangkan urutan ketiga adalah pegawai berada pada Kecamatan, yakni sebanyak 82 orang (19,39%) dari total pegawai, hal ini karena banyaknya Kecamatan berjumlah 6 Kecamatan.

Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	
1	Walikota	1	Orang
2	Wakil Walikota	-	Orang
3	Sekretariat Kota	1	Orang
4	Asisten Sekretaris Kota	3	Orang
5	Bagian Pemerintahan	10	Orang
6	Bagian Hukum	8	Orang
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	12	Orang
8	Bagian Umum dan Protokol	17	Orang
9	Bagian Perekonomian	8	Orang
10	Bagian Program, Pelaporan Dan Keuangan	11	Orang
11	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	7	Orang
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	Orang
13	Kecamatan	82	Orang
14	Kelurahan	255	Orang
Jumlah		423	Orang

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan Desember 2025



Gambar 1.4. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Unit Kerja

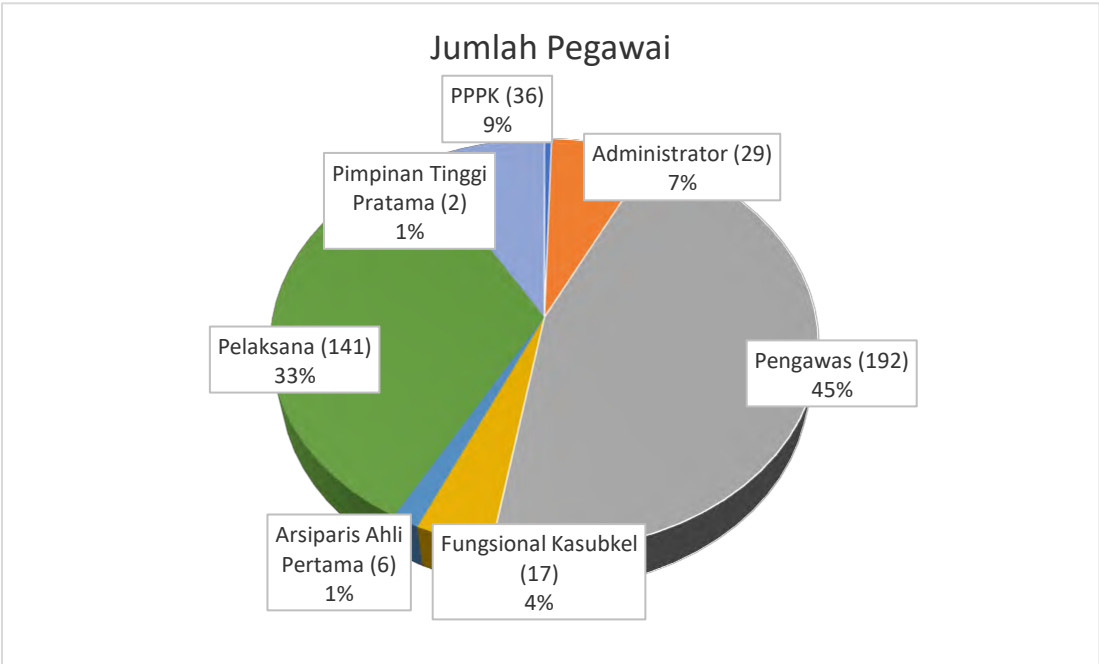
2. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT JENJANG JABATAN

Ditinjau berdasarkan jenjang jabatan, sebagian besar jabatan berada pada jabatan Pengawas, yakni sebanyak 192 orang (45,39%) dari total pegawai sebanyak 423 orang. Urutan kedua terbesar adalah pada jabatan Pelaksana, yakni sebanyak 141 orang (33,33%) dari total pegawai. Sedangkan urutan ketiga, keempat, kelima, keenam dan tujuh adalah Jabatan PPPK sebanyak 36 orang (8,51%), Jabatan Administrator sebanyak 29 orang (6,86%), Jabatan Fungsional Kasubkel sebanyak 17 orang (4,02%), Jabatan Arsiparis Ahli Pratama sebanyak 6 orang (1,42%) dan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 2 orang (0,47%). Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025
Menurut Jenjang Jabatan

No	Jabatan	Unit Kerja			Jumlah Pegawai
		Sekretariat Kota	Kecamatan	Kelurahan	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	2	-	-	2
2	Administrator	11	18	-	29
3	Pengawas	6	36	150	192
4	Fungsional (Ketua Subkelompok)	17	-	-	17
5	Arsiparis Ahli Pertama	-	6	-	6
6	Pelaksana	50	16	75	141
	Jumlah	86	82	255	423

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan Desember 2025



Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Jenjang Jabatan

3. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

Ditinjau berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai berada pada Golongan III, yakni sebanyak 289 orang (68,320%) dari total pegawai atau sebanyak 423 orang. Urutan kedua terbesar adalah Golongan II sebanyak 68 orang (16,08%), urutan ketiga adalah Golongan IV sebanyak 65 orang (15,37%), dan urutan keempat adalah Golongan I sebanyak 1 orang (0,24%). Data ini menunjukkan 83,69% pegawai berada pada golongan IV dan III. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki Pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Golongan

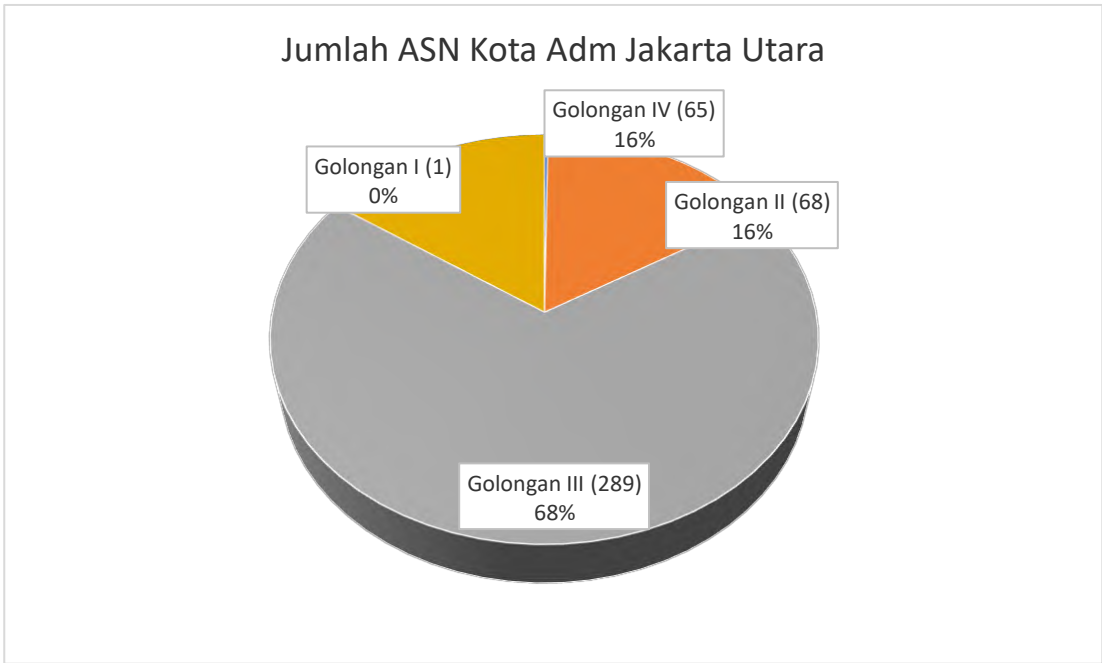
No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	Sekretariat Kota																	
1	Walikota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sekretaris Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Asisten Sekko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
5	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	8
6	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	6
7	Ketua Sub Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	-	-	-	17
8	Pelaksana																	
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli																	
	1.1) Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	1.4) Analis	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	-	-	-	-	18
	1.5) Pengelola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3
	1.6) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	1.7) Penyusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	1.8) Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil																	
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	1	1	-	-	-	-	12

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	2.2) Pengolah Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	2.3) Verifikator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3)	Staf Administrasi Tk Terampil																	
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	-	-	1	-	-	-	8
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli																	
	4.1) Penyiap Berkas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah 1		-	-	-	-	1	-	4	2	9	11	9	28	17	3	1	1	86
Sub Jumlah 2		-				7				57				22				86
Jumlah Pegawai di Sekretariat Kota		86																
No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	Kecamatan																	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	6
2	Wakil Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
3	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	6
4	Kepala Seksi																	
	4.1) Kasie Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	6
	4.2) Kasie Ekbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	6
	4.3) Kasie Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	6
5	Kepala Subbagian																	
	5.1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	6
	5.2) Kasubbag Program dan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	6
	5.3) Kasubbag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	6
6	Pelaksana																	
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli																	
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	5
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil																	
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
3)	Administrasi Tingkat Terampil																	

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4)	Pelayanan Tingkat Terampil																	
	4.1) Caraka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah 1		-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	3	25	20	5	-	-	70
Sub Jumlah 2		-				1				44				25				70
Jumlah Pegawai di Kecamatan		70																
No	Unit Kerja	Grade																Jml
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
7	PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)																	
	7.1) Arsiparis Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-							6
	7.1) Pengelola Layanan Operasional	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-							6
Sub Jumlah 1		-	-	-	-	-	-	6	-	6	-							12
Sub Jumlah 2		-				6				6				25				82
Jumlah Pegawai (PPPK) di Kecamatan		12																
Sub Jumlah 3		-				7				50								12
Jumlah ASN (PNS + PPPK)		82																
No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	Kelurahan																	
1	Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	7	-	-	-	29
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	4	-	-	-	31
3	Kepala Seksi																	
	3.1) Kasie Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	8	1	-	-	-	29
	3.2) Kasie Ekbang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	12	6	4	-	-	-	30
	3.3) Kasie Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	10	2	-	-	-	31
4	Pelaksana																	
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli																	
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	-	1	4	5	8	6	3	-	-	-	-	-	27
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	-	-	-	1	1	3	3	9	8	2	1	-	-	-	-	27

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil																	
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	1	-	-	-	-	-	10
3)	Administrasi Tingkat Terampil																	
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	1	-	-	-	-	-	10
4)	Pelayanan Tingkat Terampil																	
	4.1) Caraka	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sub Jumlah 1		-	1	-	-	1	3	12	8	23	46	56	57	18	-	-	-	225
Sub Jumlah 2		1				24				182				18				225
Jumlah Pegawai di Kelurahan		225																
No	Unit Kerja	Grade																Jml
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
5	PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)																	
	5.1) Pengadministrasi Perkantoran	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-							6
Sub Jumlah 1		-	-	-	-	30	-	-	-	-	-							12
Sub Jumlah 2		-				30				-				25				82
Jumlah Pegawai (PPPK) di Kelurahan		30																
Sub Jumlah Setko		-				7				57				22				86
Sub Jumlah Kecamatan		-				7				50				25				82
Sub Jumlah Kelurahan		1				54				182				18				255
No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Jumlah Pegawai JU Per Golongan		1				68				289				65				423
Persentase		0,24%				16,08%				68,32%				15,37%				100%
Total Jumlah Pegawai JU		423																

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan Desember 2025



Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Golongan

4. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berada pada Pendidikan S1, yakni sebanyak 209 orang pegawai (49,41%) dari total pegawai atau sebanyak 423 orang, urutan kedua terbesar adalah tingkat pendidikan S2 sebanyak 112 orang pegawai (26,48%). Data ini menunjukkan 75,89% pegawai berada pada tingkat pendidikan S1 dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal pelayanan masyarakat terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukanali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebanyak 35 orang pegawai (8,27%) adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma 3 (D.III), yang berarti masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan sebanyak 66 orang pegawai (15,60%) berpendidikan SMA. Sementara untuk tingkat pendidikan SD sebanyak 1 (0,24%) orang pegawai.

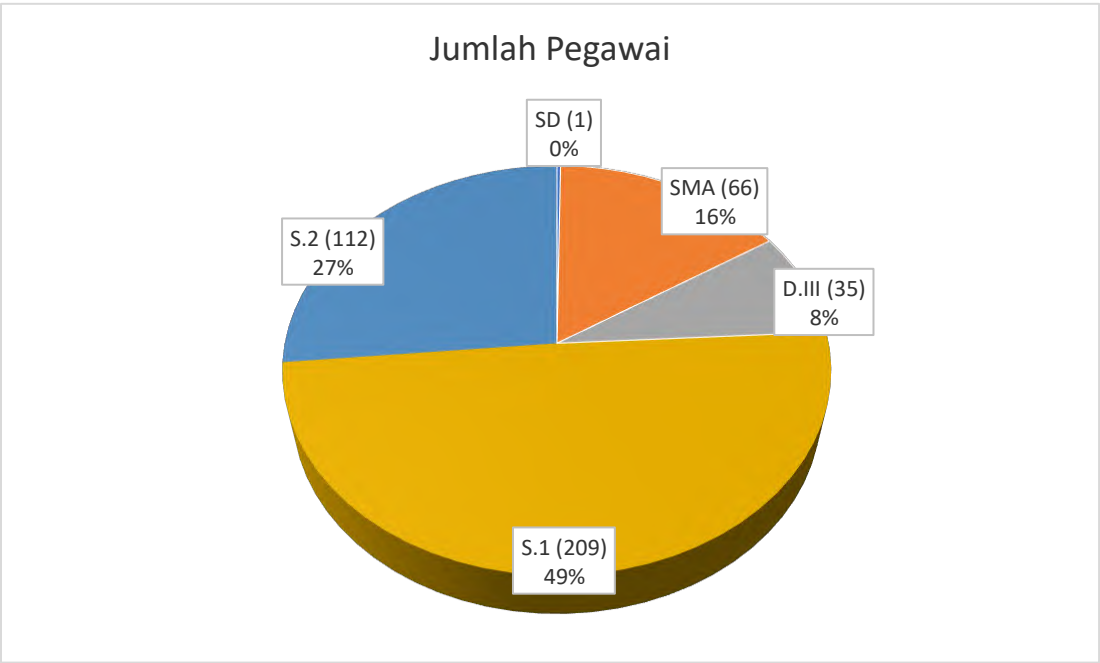
Jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara pada saat ini masih mengalami kekurangan terutama pada tingkat kelurahan, sehingga belum dapat dikatakan bahwa pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.III	S1	S2	S3	
1	Walikota	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sekretaris Kota	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Asisten Sekko	-	-	-	-	1	2	-	3
5	Camat	-	-	-	-	2	4	-	6
6	Kepala Bagian	-	-	-	-	5	3	-	8
7	Wakil Camat	-	-	-	-	2	4	-	6
8	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	2	4	-	6
9	Kepala Subbagian Setko	-	-	-	-	4	2	-	6
10	Ketua Subkelompok Setko	-	-	-	-	5	12	-	17
11	Lurah	-	-	-	-	14	15	-	29
12	Kepala Seksi Kecamatan :								
1)	Kasie Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	3	3	-	6
2)	Kasie Ekbang Kecamatan	-	-	-	-	3	3	-	6
3)	Kasie Kesra Kecamatan	-	-	-	-	3	3	-	6
13	Kepala Subbagian Kecamatan :								
1)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan	-	-	-	-	2	4	-	6
2)	Kasubbag Program dan Anggaran Kecamatan	-	-	-	-	4	2	-	6
3)	Kasubbag Keuangan Kecamatan	-	-	-	-	2	4	-	6
14	Sekretaris Kelurahan	-	-	-	-	21	10	-	31
15	Kepala Seksi Kelurahan :								
1)	Kasie Pemerintahan Kelurahan	-	-	-	2	18	9	-	29
2)	Kasie Ekbang Kelurahan	-	-	2	1	15	12	-	30
3)	Kasie Kesra Kelurahan	-	-	1	1	21	8	-	31
16	Pelaksana Sekretariat Kota :								
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :								
	1.1) Bendahara Pengeluaran	-	-	-	1	-	-	-	1
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	1	-	1	-	-	2
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	-	-	-	-	1	-	-	1
	1.4) Analis	-	-	-	-	15	3	-	18
	1.5) Pengelola	-	-	-	-	3	-	-	3
	1.6) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	-	-	-	1	-	1
	1.7) Pengawas Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	1	-	1
	1.8) Penyusun Bantuan Hukum	-	-	-	-	1	-	-	1

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.III	S1	S2	S3	
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :								
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	2	10	-	-	12
	2.2) Pengolah Pimpinan	-	-	-	-	1	-	-	1
	2.3) Verifikator	-	-	-	-	1	-	-	1
3)	Staf Administrasi Tk Terampil :								
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	6	-	1	1	-	8
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli :								
	4.1) Penyiap Berkas	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pelaksana Kecamatan :								
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :								
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	5	-	-	5
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	-	-	2	3	-	-	5
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil								
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	2	2	-	-	4
3)	Administrasi Tingkat Terampil :								
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	2	-	-	-	-	2
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :								
	4.1) Caraka	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PPPK :								
1)	Arsiparis Ahli Pertama	-	-	-	-	6	-	-	6
2)	Pengelola Layanan Operasional	-	-	-	6	-	-	-	6
3)	Pengadministrasi Perkantoran	-	-	30	-	-	-	-	30
Total Jumlah Pegawai JU Menurut Tingkat Pendidikan		1	-	66	35	209	112	-	423
Persentase		0.24%	0%	15.60%	8.27%	49.41%	26.48%	0%	100%

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan Desember 2025



Gambar 1.7. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Tingkat Pendidikan

5. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT KELOMPOK USIA

Ditinjau berdasarkan Kelompok Usia, sebagian besar pegawai berada pada kelompok umur antara 40-49 tahun yaitu sebesar 168 orang pegawai (39,72%). Kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur kurang dari 25 tahun, yaitu hanya sebanyak 8 orang (1,89%).

Tabel di bawah menunjukkan bahwa antara 2 s.d. 4 tahun (2024-2028) yang akan datang terdapat 43 orang pegawai (10,17%) yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

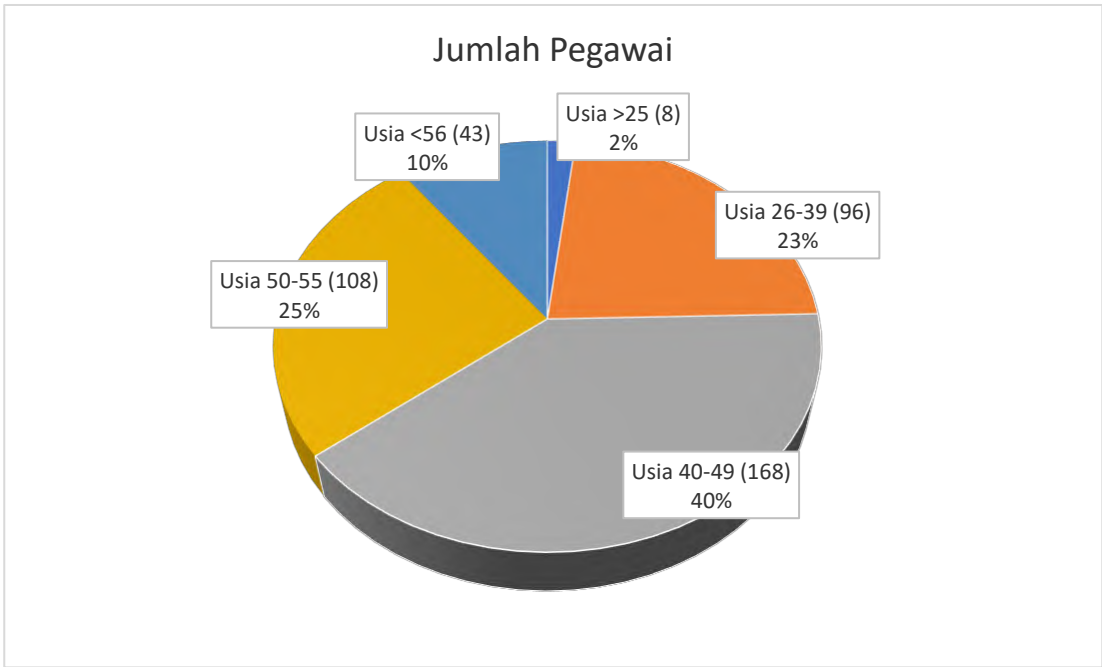
Tabel 1.9. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Kelompok Usia

No.	Jabatan	Kelompok Usia					Jumlah
		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
	Sekretariat Kota						
1	Walikota	-	-	-	1	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-
3	Sekretaris Kota	-	-	1	-	-	1
4	Asisten Sekko	-	-	1	2	-	3
5	Kepala Bagian	-	1	2	3	2	8

No.	Jabatan	Kelompok Usia					Jumlah
		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
6	Kepala Sub Bagian	-	3	1	2	-	6
7	Ketua Sub Kelompok	-	3	5	5	4	17
8	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran	-	1	-	-	-	1
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	1	1	-	-	2
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	-	-	1	-	-	1
	1.4) Analis	-	4	6	7	1	18
	1.5) Pengawas Pelayanan Publik	-	-	1	-	-	1
	1.6) Penyusun	-	-	-	-	1	1
	1.7) Pengelola	-	1	1	1	-	3
	1.8) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	-	1	-	-	-	1
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	1	4	4	3	-	12
	2.2) Pengolah Pimpinan	-	1	-	-	-	1
	2.3) Verifikator	-	-	-	1	-	1
3)	Staf Administrasi Tk Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	1	2	3	2	8
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli :						
	4.1) Penyiap Berkas	-	-	-	-	-	-
5)	Staf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pegawai Setko	1	21	26	28	10	86
No.	Jabatan	Kelompok Usia					Jumlah
		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
	Kecamatan						
1	Camat	-	-	1	5	-	6
2	Wakil Camat	-	2	1	3	-	6
3	Sekretaris Kecamatan	-	2	2	2	-	6
4	Kepala Seksi						
	4.1) Kasie Pemerintahan	-	1	1	2	2	6
	4.2) Kasie Ekbang	-	1	4	1	-	6
	4.3) Kasie Kesra	-	1	1	3	1	6
5	Kepala Subbagian						
	5.1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	2	1	2	1	6
	5.2) Kasubbag Program dan Anggaran	-	2	2	2	-	5
	5.3) Kasubbag Keuangan	-	-	1	1	4	5
6	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	1	4	-	-	5

No.	Jabatan	Kelompok Usia					Jumlah
		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	3	2	-	-	5
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	2	1	1	-	-	4
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	2	2
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	-	-	1	5	-	6
	Jumlah Pegawai Kecamatan	2	16	21	21	10	70
	Kelurahan						
1	Lurah	-	6	8	14	1	29
2	Sekretaris Kelurahan	-	7	11	9	4	31
3	Kepala Seksi						
	3.1) Kasie Pemerintahan	-	7	16	4	2	29
	3.4) Kasie Ekbang	-	8	14	6	2	30
	3.5) Kasie Kesra	-	3	16	8	4	31
4	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	13	9	5	-	27
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	8	16	3	-	27
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	5	4	-	-	1	10
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	1	2	7	10
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	-	-	-	-	-	0
5)	Staf	-	-	-	1	-	1
	Jumlah Pegawai Kelurahan	5	56	91	52	21	225
5	PPPK :						
1)	Arsiparis Ahli Pertama	-	2	4	-	-	6
2)	Pengelola Layanan Operasional	-	-	5	1	-	6
3)	Pengadministrasi Perkantoran	-	1	21	6	2	30
	Total Jumlah Pegawai JU Menurut Kelompok Usia	8	96	168	108	43	423
	Persentase	0,77%	22,96%	29,85%	26,53%	13,78%	100%

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan Desember 2025



Gambar 1.8. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Kelompok Usia

6. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

Ditinjau berdasarkan Jenis Kelamin, sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara adalah Laki-Laki yaitu sebesar 259 orang pegawai (61,23%). Sedangkan pegawai Perempuan sebanyak 164 orang pegawai (38,77%). Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	L	P	Jumlah
	Sekretariat Kota			
1	Walikota	1	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	0
3	Sekretaris Kota	1	-	1
4	Asisten Sekretaris Kota	3	-	3
5	Bagian Pemerintahan	8	2	10
6	Bagian Hukum	4	4	8
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	6	6	12
8	Bagian Umum dan Protokol	8	9	17
9	Bagian Perekonomian	4	4	8
10	Bagian Program, Pelaporan Dan Keuangan	3	8	11
11	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	5	2	7
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	3	8
	Jumlah Pegawai Setko	48	38	86

No.	Unit Kerja	L	P	Jumlah
	Kecamatan			
1	Camat	5	1	6
2	Wakil Camat	5	1	6
3	Sekretaris Kecamatan	4	2	6
4	Kepala Seksi Pemerintahan	4	2	6
5	Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	3	3	6
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	3	3	6
7	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	2	4	6
8	Kepala Subbagian Program Dan Anggaran	1	5	6
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	3	3	6
10	Arsiparis Ahli Pertama (PPPK)	3	3	6
11	Pelaksana	11	11	22
	Jumlah Pegawai Kecamatan	44	38	82
	Kelurahan			
1	Lurah	26	3	29
2	Sekretaris Kelurahan	19	12	31
3	Kepala Seksi Pemerintahan	22	7	29
4	Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	18	12	30
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	14	17	31
6	Pelaksana	68	37	105
	Jumlah Pegawai Kelurahan	167	88	255
	Total Jumlah Pegawai JU Menurut Jenis Kelamin	259	164	423
	Persentase	61,23%	38,77%	100%

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan Desember 2025



Gambar 1.9. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Jenis Kelamin

7. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT AGAMA

Ditinjau berdasarkan Agama, sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara memeluk agama Islam sebanyak 374 orang pegawai (88,42%). Untuk urutan kedua pegawai memeluk agama Kristen Protestan sebanyak 43 orang pegawai (10,17%). Untuk urutan ketiga adalah memeluk agama Katolik sebanyak 6 orang (1,42%).

Sementara pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara tidak ada yang memeluk agama Hindu dan Budha. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

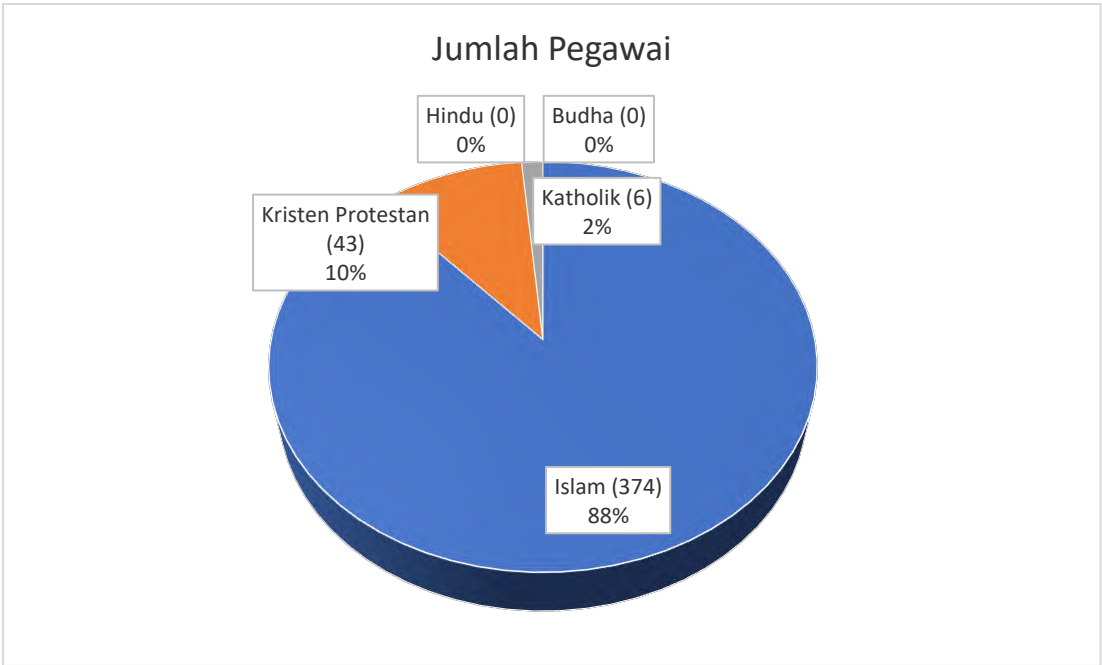
Tabel 1.11. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Menurut Agama

No.	Jabatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
	Sekretariat Kota						
1	Walikota	1	-	-	-	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	0
3	Sekretaris Kota	1	-	-	-	-	1
4	Asisten Sekko	3	-	-	-	-	3
5	Kepala Bagian	8	-	-	-	-	8
6	Kepala Sub Bagian	5	1	-	-	-	6
7	Ketua Sub Kelompok	13	3	1	-	-	17
8	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran	1	-	-	-	-	1
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	2	-	-	-	-	2
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	1	-	-	-	-	1
	1.4) Analis	14	3	1	-	-	18
	1.5) Pengelola	2	1	-	-	-	3
	1.6) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	1	-	-	-	-	1
	1.7) Penyusun Bantuan Hukum	1	-	-	-	-	1
	1.8) Pengawas Pelayanan Publik	1	-	-	-	-	1
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	10	2	-	-	-	12
	2.2) Pengolah Pimpinan	1	-	-	-	-	1
	2.3) Verifikator	1	-	-	-	-	1
3)	Staf Administrasi Tk Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	8	-	-	-	-	8
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli :						
	4.1) Penyiap Berkas	-	-	-	-	-	-
5)	Staf Pelayanan Tk Ahli :						
	5.1) Staf	-	-	-	-	-	-

No.	Jabatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
	Jumlah Pegawai Setko	74	10	2	0	0	86
	Kecamatan						
1	Camat	6	-	-	-	-	6
2	Wakil Camat	5	1	-	-	-	6
3	Sekretaris Kecamatan	6	-	-	-	-	6
4	Kepala Seksi						
	4.1) Kasie Pemerintahan	5	1	-	-	-	6
	4.2) Kasie Ekbang	2	4	-	-	-	6
	4.3) Kasie Kesra	5	1	-	-	-	6
5	Kepala Subbagian						
	5.1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian	5	1	-	-	-	6
	5.2) Kasubbag Program dan Anggaran	5	1	-	-	-	6
	5.3) Kasubbag Keuangan	4	2	-	-	-	6
6	Arsiparis Ahli Pertama (PPPK)	5	-	1	-	-	6
7	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	4	1	-	-	-	5
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	4	1	-	-	-	5
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	4	-	-	-	-	4
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	2	-	-	-	-	2
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	-	-	-	-	-	-
5)	Pengelola Layanan Operasional (PPPK)	6	-	-	-	-	6
	Jumlah Pegawai Kecamatan	68	13	1	0	0	82
	Kelurahan						
1	Lurah	24	5	-	-	-	29
2	Sekretaris Kelurahan	28	2	1	-	-	31
3	Kepala Seksi						
	3.1) Kasie Pemerintahan	25	3	1	-	-	29
	3.2) Kasie Ekbang	29	1	-	-	-	30
	3.3) Kasie Kesra	28	3	-	-	-	31
4	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	26	1	-	-	-	27
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	25	2	-	-	-	27
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						

No.	Jabatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
	2.1) Pengolah Data	8	2	-	-	-	10
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	9	-	1	-	-	10
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	1	-	-	-	-	1
5)	Staf	29	1	-	-	-	30
	Jumlah Pegawai Kelurahan	232	20	3	0	0	255
	Total Jumlah Pegawai JU Menurut Kelompok Usia	374	43	6	0	0	423
	Persentase	88,42%	10,17%	1,42%	0%	0%	100%

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan Desember 2025



Gambar 1.10. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Agama

8. REKAPITULASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA

Ditinjau berdasarkan tabel rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2025 di bawah ini, ada selisih pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara antara ABK Kebutuhan (886 orang pegawai) dengan Jumlah PNS Eksisting (423 orang pegawai) sebanyak 463 orang pegawai. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12. Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana
Sekretariat, Kecamatan Dan Kelurahan
Di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara
Per 31 Desember 2025

No	SKPD/UKPD	Jumlah PNS Eksisting	ABK Kebutu han	Selisih	Jumlah CPNS Eksisting	Jumlah PPPK Eksisting	Jumlah PNS Eksisting JP	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV	Sub Jumlah	Sub Total
1	Sekretariat Kota									
1	Pimpinan	5	6	-1	-	-	-	5	5	86
1.1	Bagian Pemerintahan	10	22	-12	-	-	6	4	10	
1.2	Bagian Hukum	8	23	-15	-	-	4	4	8	
1.3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	12	23	-11	-	-	8	4	12	
1.4	Bagian Umum dan Protokol	17	23	-6	-	-	13	4	17	
1.5	Bagian Perekonomian	8	23	-15	-	-	4	4	8	
1.6	Bagian Keuangan	11	22	-11	-	-	7	4	11	
1.7	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	7	31	-24	-	-	3	4	7	
1.8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	30	-22	-	-	5	3	8	
2	Kecamatan Tanjung Priok	13	26	-13	0	2	2	9	13	
2.1	Kelurahan Warakas	8	17	-9	0	1	2	5	8	67
2.2	Kelurahan Tanjung Priok	8	17	-9	0	1	2	5	8	
2.3	Kelurahan Sunter Jaya	8	17	-9	0	1	2	5	8	
2.4	Kelurahan Sunter Agung	8	17	-9	0	1	2	5	8	
2.5	Kelurahan Sungai Bambu	6	17	-11	0	1	1	4	6	
2.6	Kelurahan Papanggo	7	17	-10	0	1	1	5	7	
2.7	Kelurahan Kebon Bawang	9	17	-8	0	1	3	5	9	
3	Kecamatan Cilincing	13	26	-13	0	1	3	9	13	
3.1	Kelurahan Kalibaru	10	17	-7	1	1	3	5	10	74
3.2	Kelurahan Sukapura	7	17	-10	0	1	2	4	7	
3.3	Kelurahan Semper Timur	7	17	-10	0	1	1	5	7	
3.4	Kelurahan Semper Barat	9	17	-8	1	1	2	5	9	
3.5	Kelurahan Rorotan	10	17	-7	0	1	4	5	10	
3.6	Kelurahan Marunda	8	17	-9	0	0	3	5	8	
3.7	Kelurahan Cilincing	10	17	-7	0	1	4	5	10	
4	Kecamatan Pademangan	15	26	-11	0	3	3	9	15	
4.1	Kelurahan Ancol	10	17	-7	1	1	3	5	10	41
4.2	Kelurahan Pademangan Barat	9	17	-8	1	1	2	5	9	
4.3	Kelurahan Pademangan Timur	7	17	-10	0	1	2	4	7	

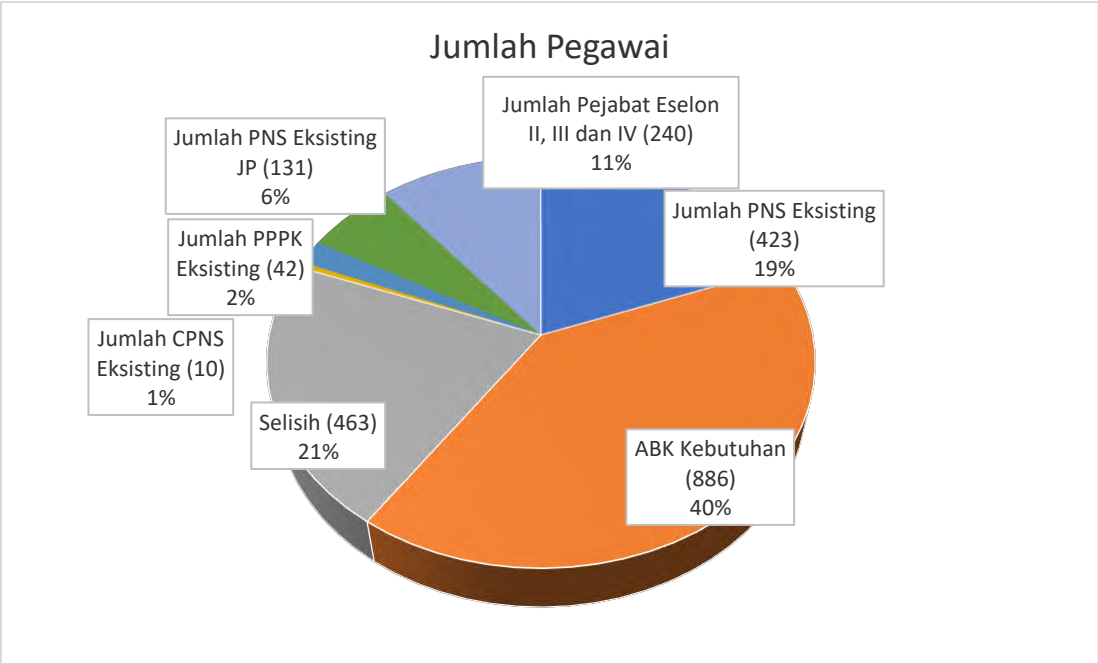
No	SKPD/UKPD	Jumlah PNS Eksisting	ABK Kebutuhan	Selisih	Jumlah CPNS Eksisting	Jumlah CPNS Eksisting	Jumlah PNS Eksisting JP	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV	Sub Jumlah	Sub Total
5	Kecamatan Kelapa Gading	16	26	-10	1	3	3	9	16	
5.1	Kelurahan Kelapa Gading Timur	10	17	-7	1	1	3	5	10	44
5.2	Kelurahan Kelapa Gading Barat	7	17	-10	0	1	2	4	7	
5.3	Kelurahan Pegangsaan Dua	11	17	-6	1	1	4	5	11	
6	Kecamatan Koja	13	26	-13	1	1	2	9	13	
6.1	Kelurahan Tugu Utara	7	17	-10	0	1	1	5	7	62
6.2	Kelurahan Tugu Selatan	9	17	-8	0	1	3	5	9	
6.3	Kelurahan Rawa Badak Utara	8	17	-9	0	1	2	5	8	
6.4	Kelurahan Rawa Badak Selatan	8	17	-9	0	1	2	5	8	
6.5	Kelurahan Lagoa	9	17	-8	1	1	2	5	9	
6.6	Kelurahan Koja	8	17	-9	0	1	2	5	8	
7	Kecamatan Penjaringan	12	26	-14		2	1	9	12	
7.1	Kelurahan Kapuk Muara	7	17	-10		1	1	5	7	49
7.2	Kelurahan Kamal Muara	7	17	-10		1	2	4	7	
7.3	Kelurahan Pluit	7	17	-10		1	1	5	7	
7.4	Kelurahan Penjaringan	8	17	-9	1	1	1	5	8	
7.5	Kelurahan Pejagalan	8	17	-9		1	2	5	8	
	Jumlah	423	886	-463	10	42	131	240		423

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan Desember 2025

Jumlah Pegawai :	
Sekretariat Kota	86
Kecamatan	82
Kelurahan	255
Total	423

Jumlah Pegawai :	Pejabat	Pelaksana
Sekretariat Kota	36	50
Kecamatan	54	28
Kelurahan	150	105
Total	240	183

Jumlah Pegawai :	PNS	CPNS	PPPK
Sekretariat Kota	86	-	-
Kecamatan	68	2	12
Kelurahan	217	8	30
Total	371	10	42



Gambar 1.11. Grafik Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2025

H. Tindaklanjut Evaluasi AKIP Internal

Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Yang Dilakukan oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 Yang Dilaksanakan pada Tahun 2025

Berdasarkan surat Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 0389.27/PA.01.00 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Yang Dilakukan oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 Yang Dilaksanakan pada Tahun 2025, yang dapat disampaikan yaitu :

- 1. Evaluasi dilakukan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku evaluator telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Perangkat Daerah posisi Tahun 2024 s.d Triwulan II Tahun 2025, yang berpedoman pada Peraturan MENPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP pada 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.13. Komponen dan Bobot Evaluasi AKIP Sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

No	Komponen	Bobot
a	Perencanaan Kinerja	30%
b	Pengukuran Kinerja	30%
c	Pelaporan Kinerja	15%
d	Evaluasi Internal	25%
	Nilai Hasil Evaluasi	100%

4. Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab memastikan agar implementasi SAKIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat selaku evaluator memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP tahun 2024 s.d Triwulan II Tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Audit *Intern* Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia.
5. Evaluasi dilakukan dengan metode wawancara dan pengujian bukti-bukti serta penjelasannya sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat meyakini bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.
6. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Utara memperoleh **nilai 86,10** dengan **predikat A**.

Tabel 1.14. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30%	24,00
b	Pengukuran Kinerja	30%	26,10
c	Pelaporan Kinerja	15%	13,50
d	Evaluasi Internal	25%	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	86,10

7. Penjelasan lebih terinci mengenai hasil evaluasi implementasi SAKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.15. Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,00	Penilaian perencanaan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah : a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia; b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>); c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Kota Administrasi Jakarta Utara telah melakukan upaya pemenuhan atas 3 (tiga) sub komponen tersebut dan telah melakukan evaluasi. Namun demikian, dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu belum dimanfaatkannya hasil evaluasi untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dokumen evaluasi Perkin tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 belum menginformasikan : - Capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perkin/IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunyai target di triwulan IV);	Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menyampaikan dokumen evaluasi perkin yang menginformasikan capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja yang telah dijabarkan per triwulan.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				- Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian Kinerja.	
2	Pengukuran Kinerja	30%	26,10	Penilaian pengukuran kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah : a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan; b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Atas 3 (tiga) komponen di atas, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen perencanaan kinerja. Namun demikian, dalam komponen pengukuran kinerja masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam proses mencapai target kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.	Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengoptimalkan pemanfaatan/ implementasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,75	Penilaian pelaporan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah : a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja;	Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara agar melengkapi dokumen LKIP yang menggambarkan :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan/ kegagalan serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya; c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Kota Administrasi Jakarta Utara telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen pelaporan kinerja. Namun demikian, dalam komponen pelaporan kinerja masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu : - Belum dilengkapi dengan upaya-upaya yang menggambarkan bahwa penyusunan LKIP telah direviu internal. - LKIP Tahun 2024 Bab III Akuntabilitas belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>), yang tercantum dalam LKIP hanya informasi perbandingan capaian kinerja antar wilayah se DKI Jakarta.	- Melengkapi upaya-upaya yang menggambarkan bahwa penyusunan LKIP telah direviu internal. - Melengkapi informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>). Jika memang tidak terdapat perbandingan di level nasional/ internasional, maka harus mencantumkan pernyataan kondisi tersebut setelah informasi perbandingan capaian kinerja antar wilayah se DKI Jakarta
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50	Penilaian evaluasi kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah : a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan; b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal shg memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.	Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara agar evaluasi kinerja internal dapat lebih dioptimalkan.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				Atas 3 (tiga) sub komponen tersebut telah dilengkapi dengan dokumen dan penjelasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Utara.	

I. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya, di mana setiap tahun Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Hasil Rapat Penyusunan LKIP pada bulan November 2025.

Pada garis besarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara sudah mengikuti sistematika yang ada, meskipun ada penambahan seperti yang tertera dalam daftar isi sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif Mengemukakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana tercapainya tujuan/sasaran utama serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum tentang Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi, yaitu :

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Manfaat
- C. Kedudukan
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis Organisasi
- G. Sumber Daya Manusia
- H. Tindaklanjut Evaluasi AKIP Internal
- I. Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yaitu :

- A. Tujuan dan Sasaran Pada Renstra (Target dalam dokumen Renstra 2023-22026)
- B. Rencana Strategis (diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Merupakan kinerja yang memuat uraian :

A. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan dengan penjelasan Capaian Kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tabel Capaian (sesuai dengan Perkin yang di TTD).

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan dengan penjelasan detail terkait dengan capaian kinerja di masing-masing indikator.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sasaran khusus maupun sasaran operasional tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 (disajikan dengan rumus perhitungan);
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra);
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Faktor Pendukung/Keberhasilan :
 - a. Sumber Daya Manusia (peningkatan Indikator).
 - b. Sumber Daya Anggaran (Program/Kegiatan/ Sub kegiatan/Inovasi yang mendukung).
 - c. Sumber Daya Sarana Prasarana (Termasuk Teknologi).
5. Faktor Penghambat/Kendala.

C. Rencana Aksi Ke depan dalam menghadapi kendala/ Meningkatkan Capaian IKU.

D. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan :

A. Kesimpulan

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Saran merupakan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

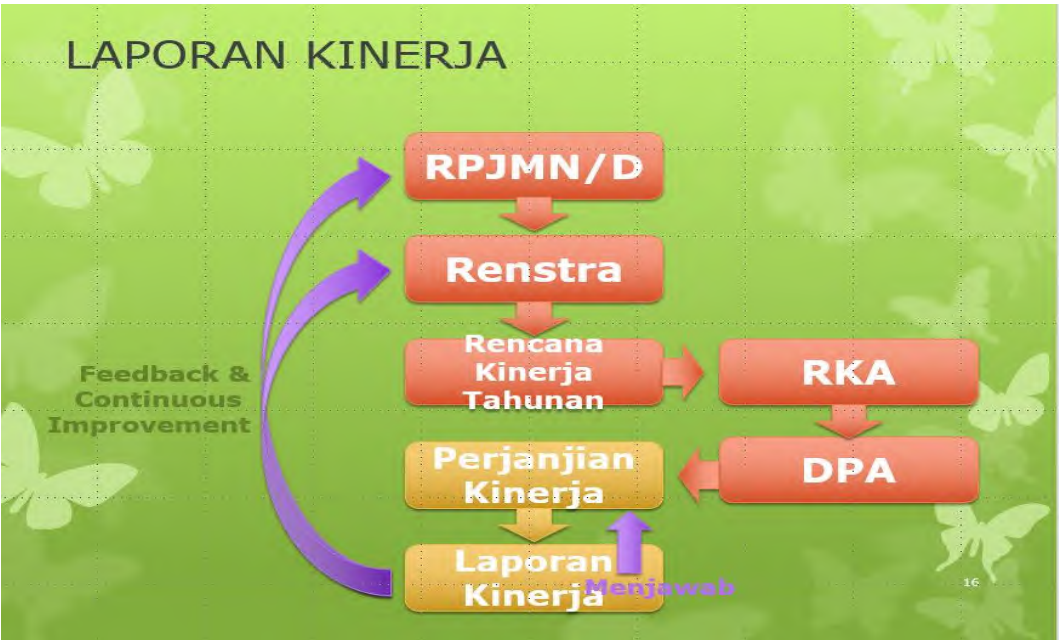
Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Penghargaan
- 3) Inovasi.

Dengan menggunakan sistematika tersebut di atas dan pola pikir penyusunan LKIP seperti gambar di bawah ini, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah tersusun diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif terhadap capaian kinerja tahun 2025.

Berikut ini adalah pola pikir dalam penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025, yaitu :

Gambar 1.19. Pola Pikir Penyusunan LKIP



Sumber : Paparan Diklat Lakip 1 Tahun 2022





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Pada Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Utara selama Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran dari Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal”.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Utara adalah “Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal”.

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Utara akan diukur melalui terwujudnya atau tidaknya target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026.

Sasaran strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan berikut dengan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

Di bawah ini adalah tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Renstra 2023-2026 yaitu :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR
1	2	3	4
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal			Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk Kelurahan)
		Pengelolaan Kota Administrasi	- Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan - Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan - Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
		Pengelolaan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA
		Koordinasi Ketenteraman dan Kertum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi yang dalam Kondisi Baik - Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026



Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Utara periode 2013-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis serta kebijakan. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Utara menetapkan strategi di antaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

Sementara itu, target indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 telah mempertimbangkan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 dan merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 – 2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2021	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yg memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	N/A	86,75	87,3	87,85	89,5
Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	N/A	85	86	87	88,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasy di Kecamatan (Termasuk Kelurahan)	Nilai	N/A	88,5	88,6	88,7	88,8

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ke dalam program jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 s.d Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026
1	Program Pengelolaan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM); - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU.	4	4	4	4
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	- Nilai efektivitas koordinasi Bidang Pemerintahan	85	86	87	88,5
		- Nilai efektivitas koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	85	86	87	88,5
		- Nilai efektivitas koordinasi Bidang Administrasi dan Kesra	85	86	87	88,5
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah - Persentase Gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota administrasi dalam kondisi baik	4 90%	4 95%	4 95%	4 100%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumatik, RPTRA	4	4	4	4
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	4	4	4	4

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026

Tabel 2.4. Target IKU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei.	96.00	Nilai
2	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.	96.80	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
			Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei		
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, di mana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).	97.22	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
			Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei		
4	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei.	96.38	Nilai

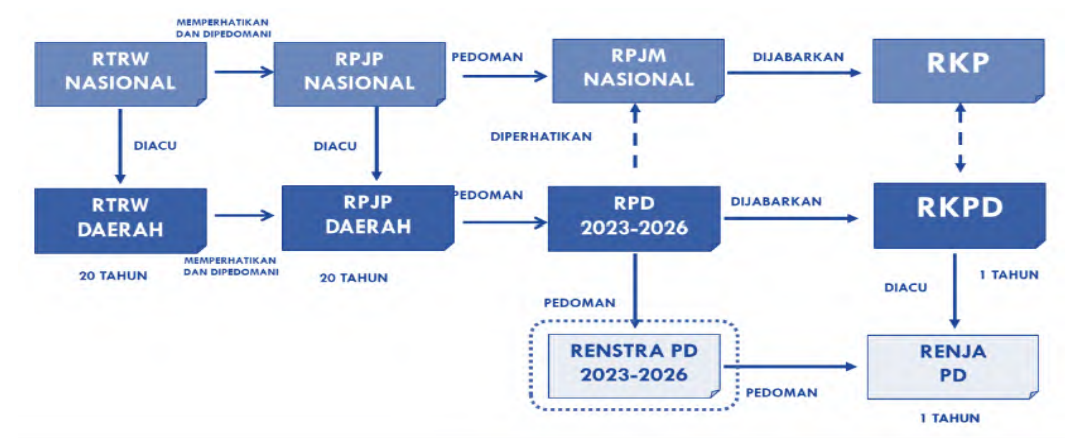
B. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan didahului menyusun suatu *'strategic plan'* atau Rencana Strategis (Renstra).

Renstra merupakan suatu proses tahap awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Utara wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 sangat terkait dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini juga akan dijadikan pedoman bagi Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penyusunan rencana kerja mulai tahun 2025. Untuk lebih jelasnya keterkaitan Renstra dengan Dokumen Rencana Daerah (Dokrenda) lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1. Alur Keterkaitan Renstra dengan Dokrenda Kota Administrasi Jakarta Utara



Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026

Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan yang sifatnya sangat umum tetapi mengandung suatu arti yang cukup dalam sehingga di dalam membuat suatu uraian mengenai VISI harus benar-benar dipikirkan artinya yang lebih filosofis tetapi terungkap dalam kata yang sederhana.

Misi mempunyai arti yang sangat berlainan dengan kata visi karena di dalam kata misi terkandung suatu pesan kemanusiaan yang tinggi dan juga terkandung suatu aktivitas yang mengarah kepada suatu tujuan dari aktivitas tersebut dalam kaitan dengan kemanusiaan.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

a. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta per Senin, 21 Maret 2022 tercatat bahwa:

1) Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya
terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan
kesejahteraan bagi semua”.

2) Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah :

- 
- a) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
 - b) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
 - c) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
 - d) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
 - e) Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Perubahan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 otomatis mempengaruhi perubahan pada Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026.

Adapun dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara mengemban misi nomor C yakni :

“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas”.

b. Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Utara

1) Visi Kota Administrasi Jakarta Utara

Yaitu :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal”

2) Misi Kota Administrasi Jakarta Utara

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang tersebut di atas, Misi Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 yaitu :

“Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal”

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 terdiri atas 5 program, 15 kegiatan, dan 81 sub kegiatan.

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat beberapa program kementerian/lembaga yang secara eksplisit akan dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Program-Program tersebut, antara lain :

1. Program pengelolaan perikanan tangkap (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Program ini merupakan terjemahan dari proyek peningkatan produksi perikanan tangkap yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

2. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Program ini merupakan terjemahan dari proyek SPALD-T skala kota/regional, SPALD-S skala kota (IPLT), sistem pengelolaan persampahan skala kawasan (TPST), dan Sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat (TPS3R) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

3. Program pengelolaan sumber daya air (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Program ini merupakan terjemahan dari proyek pembangunan dan peningkatan tanggul laut serta pengaman pantai dan proyek pemasangan alat pemantau penurunan tanah di kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026, terdapat 3 program prioritas yang sejalan dengan tujuan (Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas) dan sasaran (Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat). Ketiga program yang dilaksanakan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Program Pengelolaan Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sementara itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan mengidentifikasi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Kota Administrasi Jakarta Utara, tetapi akan melibatkan berbagai unit kerja perangkat daerah dalam menata kawasan.



Walikota/Bupati sebagai Perangkat Daerah dengan tugas yang bersifat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kepada unsur perangkat/pelaksana teknis sektoral di wilayahnya, juga memiliki peran dalam menata kawasan. Penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan ini dilakukan melalui koordinasi implementasi di masing-masing wilayah (fungsi lead actor), serta melaksanakan kolaborasi penuntasan target kegiatan strategis daerah prioritas (fungsi active supporting actor) seperti pengendalian banjir, pengurangan sampah, penataan kampung, pemulihan ekonomi pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata urban, dan aktivasi city branding di masing-masing wilayah.

Dalam hal penataan kawasan, Walikota/Bupati menjadi penanggung jawab di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta evaluasi yang melibatkan multi urusan, multi stakeholder/ pemangku kepentingan, multi tahun dan multi sumber pendanaan sehingga diharapkan keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keberlanjutan dari manfaat dan dampak dari suatu kawasan yang sudah selesai ditata dapat terwujud. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Hingga Tahun 2026 ditargetkan jumlah kawasan yang tertata sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu pada tahun 2024 dan 2026.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, dilakukan beberapa upaya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dan simulasi penataan Kawasan dengan seluruh PD/UKPD terkait pada setiap tahapan, kolaborasi dengan pihak swasta/masyarakat untuk mencari sumber pendanaan non-APBD, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kawasan.

Di bawah ini Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 yang terdapat dalam Renstra, adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5. Target Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026
(yang terdapat dalam Renstra Tahun 2023-2026)

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KOTA PESISIR YANG MEMBERIKAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK SERTA PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	491.672.471.738	87,75	525.565.623.752	87,85	543.444.363.434	89,5	570.684.137.897	89,5	2.131.366.596.821		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	0	88,5	491.672.471.738	88,6	525.565.623.752	88,7	543.444.363.434	88,8	570.684.137.897	88,8	2.131.366.596.821		
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	405.023.425.439	4	432.071.686.235	4	445.546.528.644	4	468.088.961.943	4	1.750.730.602.261	Bagian KKPP	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 2

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		4		4		4		Bagian KKPP	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	





Tabel 2.5. Halaman 3

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	905.117.037	4	952.203.713	4	1.001.958.696	4	1.054.736.213	4	3.914.015.659	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
7.01. 02. 2.01. 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	905.117.037	1	952.203.713	1	1.001.958.696		1.054.736.213	4	3.914.015.659	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
7.01. 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	228.123.140.754	4	240.743.469.529	4	253.744.877.058	4	267.561.390.562	4	990.172.877.903	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 4

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 02. 2.04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	228.123.140.754	12	240.743.469.529	12	253.744.877.058	12	267.561.390.562	48	990.172.877.903	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	173.758.585.526	4	186.940.237.619	4	188.409.902.915	4	197.000.975.033	4	746.109.701.093	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.02. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	1861	4164	13.558.731.011	4164	14.646.364.493	4164	15.833.625.219	4164	17.110.048.774	16656	61.148.769.497	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.02. 01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	12.372.461.758	12	13.341.872.493	12	14.151.522.756	12	15.305.925.228	48	55.171.782.235	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.02. 04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	1125	1125	128.468.509.411	1125	131.177.129.953	1125	136.254.337.211	1125	140.848.851.718	1125	536.748.828.293	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 5

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 02. 2.04. 05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	2.418.224.350	4	2.525.686.238	4	2.640.481.914	4	2.763.164.723	16	10.347.557.225	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	9.770.713.732	1	10.697.267.539	1	11.714.597.932	1	12.831.723.627	4	45.014.302.830	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.02. 07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	3.361.293.973	1	3.482.512.147	1	3.609.574.821	1	3.741.269.976	4	14.194.650.917	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.02. 08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	0	0	0	1	7.052.369.784	0	0	0	0	1	7.052.369.784	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.02. 09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	3.808.651.291	1	4.017.034.972	1	4.205.763.062	1	4.399.990.987	4	16.431.440.312	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 6

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 02. 6.04.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	4	4	2.236.582.122	4	3.435.775.374	4	2.389.789.975	4	2.471.860.135	4	10.534.007. 606	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.04. 01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.402.470.629	12	1.443.127.241	12	1.485.814.506	12	1.530.633.912	48	5.862.046.288	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.04. 02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	297.618.000	4	309.439.210	4	321.776.106	4	334.652.542	16	1.263.485.858	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.04. 03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	536.493.493	1	558.854.363	1	582.199.363	1	606.573.681	4	2.284.120.900	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 02. 6.04. 04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	1.124.354.560	0	0	0	0	1	1.124.354.560	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 7

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	84.747.324.263	4	91.502.325.656	4	95.836.275.650	4	100.466.287.336	4	372.552.212.905	Bagian KKPP	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
7.01. 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	70.374.353.869	4	76.407.149.670	4	79.970.831.360	4	83.758.493.382	4	310.510.828.281	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.01. 03. 2.02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2846	3952	70.374.353.869	3952	76.407.149.670	3952	79.970.831.360	3952	83.758.493.382	15808	310.510.828.281	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 8

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Nilai	4	4	14.372.970.394	4	15.095.175.986	4	15.865.444.290	4	16.707.793.954	4	62.041.384.624	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
7.01. 03. 2.03.. 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	182	107	14.292.970.394	107	15.015.175.986	107	15.785.444.290	107	16.627.793.954	107	61.721.384.624	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
7.01. 03. 2.03.. 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0	20	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	320.000.000	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 9

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	1.901.722.036	4	1.991.611.861	4	2.061.559.140	4	2.128.888.618	4	8.083.781.655	Bagian KKPP	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
7.01. 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100	1.901.722.036	100	1.991.611.861	100	2.061.559.140	100	2.128.888.618	100	8.083.781.655	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01. 04. 2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	1.901.722.036	4	1.991.611.861	4	2.061.559.140	4	2.128.888.618	16	8.083.781.655	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KOTA PESISIR YANG MEMBERIKAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK SERTA PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	302.253.559.373	87,3	321.915.933.446	87,85	307.153.454.343	89,5	366.147.753.476	89,5	1.297.470.700.638		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	85	302.253.559.373	86	321.915.933.446	87	307.153.454.343	88,5	366.147.753.476	88,5	1.297.470.700.638		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	90	90	299.790.493.824	95	319.154.903.205	95	304.176.673.383	100	362.876.052.939	100	1.285.998.123.351	Bagian Pemerintahan	DKI Jakarta
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	Indeks	4	4	4		Bagian Keuangan	
															Bagian Umum dan Protokol	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Adm Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	4	4	196.214.704.902	4	201.123.768.008	4	206.153.384.892	4	211.343.466.949	4	814.835.324.751	Bagian Keuangan	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	

Tabel 2.5. Halaman 12

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	437	779	196.063.255.045	779	200.964.836.421	779	205.988.957.331	779	211.138.681.265	3116	814.155.730.062	Bagian Keuangan	DKI Jakarta
7.02.01.1.02.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	58	40	151.449.857	39	158.931.587	39	164.427.561	39	204.785.684	157	679.594.689	Bagian Keuangan	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	120.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.03. 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000	Bagian Hukum	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	4	4	567.018.672	4	623.270.556	4	685.134.129	4	753.170.154	4	2.628.593.511	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	1.580.854	1	1.628.280	1	1.677.128	1	1.727.442	4	6.613.704	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															Bagian KKPP	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5	565.437.818	5	621.642.276	5	683.457.001	5	751.442.712	20	2.621.979.807	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 15

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Bagian KKPP	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	4	4	12.167.160.666	4	12.900.382.597	4	13.803.431.867	4	14.661.548.801	4	53.532.523.931	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01. 1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	213.874.565	4	234.912.588	3	252.876.680	3	277.852.594	14	979.516.427	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	63	59	2.655.872.728	57	2.828.768.093	57	3.011.715.306	52	3.212.670.556	225	11.709.026.683	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01. 1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	65	38	757.820.606	42	795.948.077	44	843.011.428	44	911.968.084	168	3.308.748.195	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	28	50	930.713.431	45	991.919.048	45	1.057.409.460	45	1.127.245.500	185	4.107.287.439	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01. 1.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	37	41	649.497.272	41	694.693.800	38	743.198.648	41	795.066.648	161	2.882.456.368	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	115	85	4.490.938.717	85	4.765.395.459	85	5.085.212.569	85	5.375.121.811	340	19.716.668.556	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01. 1.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	1.409.885.220	4	1.488.436.551	4	1.571.433.949	4	1.661.209.066	16	6.130.964.786	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	4	937.692.187	4	987.063.425	4	1.116.532.266	4	1.171.927.376	16	4.213.215.254	Bagian Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	DKI Jakarta
															Bagian Pemerintahan	
															Bagian Perekonomian	
															Bagian Kesejahteraan Rakyat	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01. 1.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
7.02. 01. 1.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	110.865.940	1	103.245.556	1	112.041.561	1	118.487.166	4	444.640.223	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	4	4	29.109.680.877	4	38.748.999.123	4	13.115.381.917	4	61.021.232.427	4	141.995.294.344	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	



Tabel 2.5. Halaman 21

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	5	3.015.212.553	1	236.733.808	4	2.510.407.189	1	286.447.908	11	6.048.801.458	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															Bagian Pemerintahan	
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	175	261	2.505.529.024	192	2.041.632.000	194	2.197.612.697	193	2.323.132.337	840	9.067.906.058	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADM JAKARTA UTARA	



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	36.000.000.000	0	0	3	58.000.000.000	6	94.000.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															Bagian Pemerintahan	
7.02. 01. 1.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	10	23.297.120.300	1	101.976.315	15	8.107.075.131	1	112.428.887	27	31.618.600.633	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	18	291.819.000	19	368.657.000	16	300.286.900	15	299.223.295	68	1.259.986.195	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta



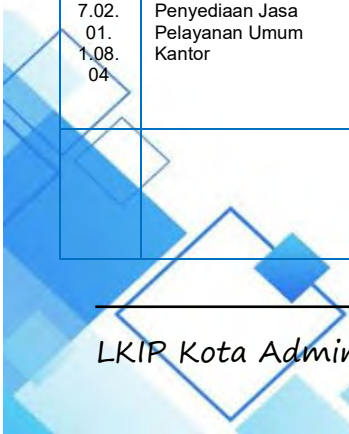
Tabel 2.5. Halaman 23

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	40.743.190.415	4	43.365.588.121	4	46.293.318.142	4	49.337.087.392	4	179.739.184.070	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	4.641.854	12	4.641.854	12	4.641.854	12	4.641.854	48	18.567.416	KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	DKI Jakarta
7.02. 01. 1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	20.490.841.647	12	22.168.658.313	12	24.099.408.405	12	26.092.743.182	48	92.851.651.547	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta



Tabel 2.5. Halaman 24

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	2.143.914.080	4	2.247.582.300	4	2.361.603.769	4	2.484.931.858	16	9.238.032.007	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	18.103.792.834	12	18.944.705.654	12	19.827.664.114	12	20.754.770.498	48	77.630.933.100	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	20.958.738.292	4	22.362.894.800	4	24.096.022.436	4	25.729.547.216	4	93.147.202.744	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	359	443	3.284.695.633	443	3.420.082.645	443	3.591.162.798	443	3.762.039.491	1772	14.057.980.567	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01. 1.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7	212	190.393.201	212	200.469.816	212	211.525.212	212	223.656.401	848	826.044.630	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															Bagian Pemerintahan	
7.02. 01. 1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	672	1466	2.871.266.393	1463	3.052.964.066	1466	3.255.607.862	1466	3.469.724.567	5861	12.649.562.888	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	70	49	8.521.874.050	48	9.007.387.978	49	9.803.728.605	48	10.413.390.171	194	37.746.380.804	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															Bagian Pemerintahan	



Tabel 2.5. Halaman 27

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															KECAMATAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGK KOTA ADM JAKARTA UTARA	
7.02. 01. 1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	19	97	3.597.050.554	98	4.029.194.319	97	4.413.150.107	98	4.860.800.259	390	16.900.195.239	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															Bagian Pemerintahan	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 01. 1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	149	1006	2.493.458.461	1103	2.652.795.976	1104	2.820.847.852	1104	2.999.936.327	4317	10.967.038.616	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
															Bagian Pemerintahan	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
7.02. 02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.463.065.549	86	2.761.030.241	87	2.976.780.960	88,5	3.271.700.537	88,5	11.472.577.287	Bagian Pemerintahan	DKI Jakarta
															Bagian Hukum	
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		Bagian Perekonomian	DKI Jakarta

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Bagian Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
7.02. 02. 6.03.	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	2.463.065.549	100	2.761.030.241	100	2.976.780.960	100	3.271.700.537	100	11.472.577.287	Bagian Hukum	DKI Jakarta
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100		100		100		100		100		Bagian Pemerintahan	
															Bagian KKPP	
															Bagian Perekonomian	
															Bagian Pembangunan & Lingkungan Hidup	
															Bagian Keuangan	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Bagian Kesejahteraan Rakyat	
															Bagian Umum dan Protokol	
7.02. 02. 6.03. 01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	Lembaga	1	300	30.690.000	400	33.759.000	500	37.134.900	600	40.848.390	600	142.432.290	Bagian Pemerintahan	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	142.000.000	4	156.200.000	4	171.820.000	4	189.002.000	16	659.022.000	Bagian Hukum	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	12.300.000	4	13.530.000	4	14.883.000	4	16.371.300	16	57.084.300	Bagian Hukum	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 03	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	100.000.000	4	110.000.000	4	121.000.000	4	133.100.000	16	464.100.000	Bagian Hukum	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen	0	1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000	4	27.846.000	Bagian Hukum	DKI Jakarta

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 02. 6.03. 06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	4	4	684,36	4	684,36	4	684,36	4	684,36	16	2.737.440	Bagian KKPP	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	1	1	285,15	1	285,15	1	285,15	1	285,15	4	1.140.600	Bagian KKPP	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen	4	4	1.440.000	4	1.512.000	4	1.587.600	4	1.666.980	16	6.206.580	Bagian Perekonomian	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	175	4	373.757.641	4	411.133.405	4	452.246.746	4	497.471.420	16	1.734.609.212	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen	3	4	439.133.200	4	483.046.520	4	531.351.172	4	584.486.289	16	2.038.017.181	Bagian Umum dan Protokol	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	8.734.000	2	9.607.400	2	10.568.140	2	11.624.954	8	40.534.494	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 02. 6.03. 12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	5.544.000	2	6.098.400	2	6.708.240	2	7.379.064	8	25.729.704	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	3.080.000	2	3.388.000	2	3.726.800	2	4.099.480	8	14.294.280	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1.980.000	1	2.178.000	1	2.395.800	1	2.635.380	4	9.189.180	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	1	1	62.732.450	1	69.005.695	1	75.906.264	1	83.496.891	4	291.141.300	Bagian Pemerintahan	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	1	1	12.012.000	1	13.213.200	1	14.534.520	1	15.987.972	4	55.747.692	Bagian Pemerintahan	DKI Jakarta

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 02. 6.03. 18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	2	2	5.544.000	2	6.098.400	2	6.708.240	2	7.379.064	8	25.729.704	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/ Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	12.012.000	1	13.213.200	1	14.534.520	1	15.987.972	4	55.747.692	Bagian Pemerintahan	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen	4	4	3.240.000	4	3.240.000	4	3.600.000	4	3.600.000	16	13.680.000	Bagian Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen	2	2	342,18	2	342,18	2	342,18	2	342,18	8	1.368.720	Bagian KKPP	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	684,36	4	684,36	4	684,36	4	684,36	16	2.737.440	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta
															Bagian KKPP	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 02. 6.03. 26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	285,15	1	285,15	1	285,15	1	285,15	4	1.140.600	Bagian KKPP	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	285,15	1	285,15	1	285,15	1	285,15	4	1.140.600	Bagian KKPP	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen	4	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	16	21.600.000	Bagian KKPP	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan	1	1	450.000.000	1	495.000.000	1	544.500.000	1	598.950.000	4	2.088.450.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen	1	1	912,48	1	54.000.000	1	912,48	1	912,48	4	56.737.440	Bagian Keuangan	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	16	4.000.000	Bagian Keuangan	DKI Jakarta

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 02. 6.03. 38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	3.250.000	4	3.412.500	4	3.250.000	4	3.583.125	16	13.495.625	Bagian Keuangan	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	12	12	649.883.928	12	714.872.321	12	786.359.553	12	864.995.508	48	3.016.111.310	Bagian Pemerintahan	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	2	2	42.900.000	2	47.190.000	2	51.909.000	2	57.099.900	8	199.098.900	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4.320.000	4	4.320.000	4	4.320.000	4	4.320.000	16	17.280.000	Bagian Keuangan	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen	4	4	6.210.000	4	7.452.000	4	8.280.000	4	8.280.000	16	30.222.000	Bagian Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	DKI Jakarta
7.02. 02. 6.03. 45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	1.440.000	4	1.512.000	4	1.587.600	4	1.666.980	16	6.206.580	Bagian Perekonomian	DKI Jakarta



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.02. 02. 6.03. 46	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	12.960.000	4	14.256.000	4	15.681.600	4	17.249.760	16	60.147.360	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026



Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, besaran anggaran pada PD/UKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara target sebesar Rp 928.881.494.610 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Target Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	* Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) * Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	427.857.627.094
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	103.686.582.899
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	1.431.623.589
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	* Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat * Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	393.184.530.678
5	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Pengoordinasian, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi yang Optimal	2.721.130.350
Total			928.881.494.610

Sumber: *monev2025.bapedadki.net*

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Rencana kinerja ini kemudian ditetapkan dibuat Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 tersebut, ditetapkan 2 (dua) jenis sasaran yaitu :

- Sasaran Strategis
- Sasaran Relevan Lainnya.

Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2025 dengan 11 (sebelas) Sasaran dengan Indikator Kinerja sebanyak 13 (tiga belas) indikator yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, 9 (sembilan) Sasaran Relevansi Lainnya. Dengan target masing-masing, yaitu :

Tabel 2.7. Target Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS				
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96.80	Nilai
2	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96.80	Nilai
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97.22	Nilai
4	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	96.38	Nilai
SASARAN RELEVAN LAINNYA				
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	Persentase
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	Persentase
8	Terwujudkannya Tata Kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai Kualitas Data SDI	3.25	Nilai
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	Persentase
10	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100	Persentase
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Persentase
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	Persentase
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persentase

Sumber : Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

Penjelasan singkat mengenai indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara :

- Indikator kinerja yang pertama** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi**, unsur Kecamatan. Indikator kinerja pertama ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.

Target tahun 2025 dengan nilai sebesar 96.80.

Sumber data yaitu Sistem Monev Kinerja.

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Definisi Operasional :

Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi.

Sumber Data :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei.

2. **Indikator kinerja yang kedua** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah [Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi](#), unsur Kota Administrasi. Indikator kinerja kedua ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.

Target tahun 2025 dengan nilai sebesar 96.80.

Sumber data yaitu Sistem Monev Kinerja.

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Definisi Operasional :

Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.

Sumber Data :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei.

3. **Indikator kinerja yang ketiga** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan**. Indikator kinerja ketiga ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal. Target tahun 2025 dengan nilai sebesar 97.22. Sumber data yaitu Sistem Monev Kinerja.

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Definisi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di

survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, di mana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

- a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99;
- b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60;
- c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;
- d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

Sumber Data :

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei.

4. **Indikator kinerja yang keempat** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah [Indeks Efektivitas Koordinasi Kota administrasi](#). Indikator kinerja keempat ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal.

Target tahun 2025 dengan nilai sebesar 96.38.

Sumber data yaitu Sistem Monev Kinerja.

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Definisi Operasional :

Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.

Metode Pengukuran :

Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Sumber Data :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei.

5. **Indikator kinerja yang kelima** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah [Survei Kepuasan Layanan Masyarakat](#). Indikator kinerja kelima ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang pertama yaitu Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Target tahun 2025 dengan nilai sebesar 92.

Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah.

Definisi Operasional :

Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing.

Metode Pengukuran :

Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei.

Sumber Data :

Jaksurvei.

- 6. **Indikator kinerja yang keenam** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program**. Indikator kinerja keenam ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kedua yaitu Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah.
Target tahun 2025 dengan persentase sebesar 100.
Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Definisi Operasional :

- a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
- b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.

- c. Persentase respons terhadap krisis komunikasi.
- d. Persentase respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

Metode Pengukuran :

- a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
- b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
- c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons terhadap krisis komunikasi.
- d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

Sumber Data :

<https://komunikasi.jakarta.go.id/Login>.

7. **Indikator kinerja yang ketujuh** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang**. Indikator kinerja ketujuh ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang ketiga yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Target tahun 2025 dengan persentase sebesar 100.
Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

- c. Keputusan Gubernur No. 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.

Definisi Operasional :

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Metode Pengukuran :

- a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD.
- b. Bobot 85%: PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki.
- c. Bobot 10%: PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

Sumber Data :

[HTTPS://jakasel.jakarta.go.id/inventarisisasipr/login](https://jakasel.jakarta.go.id/inventarisisasipr/login).

- 8. **Indikator kinerja yang kedelapan** dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Nilai kualitas data SDI**. Indikator kinerja kedelapan ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang keempat yaitu Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas. Target tahun 2025 dengan nilai sebesar 3.25. Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- b. Keputusan Gubernur Nomor 785 Tahun 2025 Tentang Daftar Data Tahun 2025.

Definisi Operasional :

Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu :

- a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

- b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
- c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
- d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data.

Metode Pengukuran :

Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]

(Rentang nilai kualitas data SDI : 0 - 4).

Keterangan :

- a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke Walidata/ Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan).
- b. Aspek Kelengkapan Data : (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan).
- c. Aspek Keunikan Isi Data : (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan).
- d. Aspek Validitas Data : (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan).

Sumber Data :

Portal Data Provinsi DKI Jakarta.

- 9. Indikator kinerja yang kesembilan dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah [Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri](#). Indikator kinerja kesembilan ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kelima yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Target tahun 2025 dengan persentase sebesar 100. Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi Operasional :

- a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self-declare).
- b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
- c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening :
 - 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
 - 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
 - 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
 - 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

Metode Pengukuran :

Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV

dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).

Sumber Data :

- a. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP).
- c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD.

Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarisasi Data: Stabilize).

10. Indikator kinerja yang sepuluh dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar**. Indikator kinerja sepuluh ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang keenam yaitu Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan. Target tahun 2025 dengan persentase sebesar 100. Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Definisi Operasional :

Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice).

Metode Pengukuran :

Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice).

Penghitungan :

TW I :

- a. Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025.

TW II, III dan IV :

- a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun.
- b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (<https://km-bpsdm.jakarta.go.id>).
- c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.

Output Sasaran :

- a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I.
- b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II.
- c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III.
- d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV.

Sumber Data :

<https://km-bpsdm.jakarta.go.id>.

- 11. Indikator kinerja yang sebelas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko**. Indikator kinerja kesebelas ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang ketujuh yaitu Implementasi Penerapan Manajemen Risiko. Target tahun 2025 dengan persentase sebesar 100.

Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Definisi Operasional :

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra dan Renja PD yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan :

- a. Komunikasi dan konsultasi;
- b. Penetapan konteks;
- c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
- d. Penanganan Risiko; dan
- e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Metode Pengukuran :

$$\left[\frac{\text{(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat)}}{\text{(Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)}} \times 100\%.$$

Output Sasaran :

TW I :

- Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025
- Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025

TW IV :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025.

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :

TW I :

- Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025
- Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025

TW IV :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025.

Sumber Data :

Aplikasi SI Perisai (Inspektorat).

- Indikator kinerja yang kedua belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi**. Indikator kinerja kedua belas ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kedelapan yaitu Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi. Target tahun 2025 dengan persentase sebesar 71. Sumber data berasal dari e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah".

Definisi Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

- Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Metode Pengukuran :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

- Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/ sub kegiatan dengan bobot 43,5%;
- Efisiensi keluaran kegiatan/sub kegiatan dengan bobot 28,6%;

- c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%;
- d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :

- ≤ 60 = Rendah
- > 60 s.d 70 = cukup
- > 70 s.d 90 = Baik
- > 90 s.d 100 = Sangat Baik

Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026

Sumber Data :

BPKD.

13. Indikator kinerja yang ketiga belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah **Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)**. Indikator kinerja ketiga belas ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kesembilan yaitu Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).
Target tahun 2025 dengan persentase sebesar 100.
Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Dasar Hukum :

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP.

Definisi Operasional :

Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan.

Metode Pengukuran :

$(90\% \text{ dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya} / \text{jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya}) \times 100\%$ (Verifikasi oleh Inspektorat).

Sumber Data :

Aplikasi SI Mantab (Inspektorat).

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap mengenai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab III Laporan ini.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan penyimpulan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan dan capaian masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi merupakan nilai rata-rata dari seluruh capaian sasaran strategis. Penyimpulan dilakukan dengan memberi interpretasi atau makna atas nilai rata-rata yang diperoleh.

Makna dari nilai tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Keterangan
1	AA	> 85 - 100	Memuaskan	
2	A	> 75 - 85	Sangat Baik	
3	B	> 65 - 75	Baik	Perlu sedikit perbaikan
4	CC	> 50 - 65	Cukup	Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	> 30 - 50	Kurang	Perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0 - 30	Sangat Kurang	Perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja, pada Kota Administrasi Jakarta Utara secara keseluruhan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil (dari Pengukuran Kinerja) pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai atas sasaran dan program dan dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (atau realisasi tahun 2025 dan dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (yang ditandatangani antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta) dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 tersebut, ditetapkan 2 (dua) jenis sasaran yaitu :

- Sasaran Strategis
- Sasaran Relevan Lainnya.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota Administrasi, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target 2025}} \times 100\%$$

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025, yaitu :

IKU	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025		
		Target	Capaian Kinerja Program	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	97,22	101,35%	Tercapai, Efisien

Sumber : Bagian KKPP, 2025

Catatan : Capaian Kinerja = $\frac{98.53}{97.22} \times 100\% = 101,35\%$

Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara mampu berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU IKM) dengan capaian nilai 101,35 persen. Hasil ini menunjukkan ketercapaian target IKU Kota Administrasi Jakarta Utara berupa capaian kinerja program di tahun 2025.

Capaian kinerja berdasarkan dokumentasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 (sesuai dengan Perkin yang ditandatangani), disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	96,80	96,79	99,99%	Belum Tercapai
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	96,80	96,79	99,99%	Belum Tercapai
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	97,22	98,53	101,35%	Tercapai, Efisien
4		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	96,38	95,04	98,61%	Belum Tercapai
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	96,88	105%	Tercapai, Efisien
6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100%	Tercapai
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100%	Tercapai
8	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3.25	4	123%	Tercapai, Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	100	100	100%	Tercapai
10	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100	100	100%	Tercapai
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%	Tercapai
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	90,92	128,06%	Tercapai, Efisien
13	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%	Tercapai

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja dari e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja adalah proses membandingkan antara apa yang direncanakan (target) dengan apa yang sebenarnya terjadi (realisasi), kemudian mencari tahu mengapa hasilnya seperti itu.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2025. Pada penyelenggaraan tupoksinya di tahun anggaran 2025, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki 13 (tiga belas) indikator kinerja dari 2 sasaran strategis dan 9 sasaran relevan lainnya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja, terdiri dari :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Sub bab ini membandingkan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

a. SASARAN STRATEGIS

1) Sasaran Strategis ada 2 (dua) Sasaran yaitu :

- 1.1) Sasaran Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja :
- a) Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kecamatan Administrasi);
 - b) Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kota Administrasi).

Indikator kinerja pertama dan kedua ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang pertama dengan nilai target dan realisasi yang sama, maka hasil perbandingannya sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $\frac{96.79}{96.80} \times 100\% = 99,99\%$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kecamatan Administrasi)	Nilai	96,80	96,79	99,99%	Belum Tercapai
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kota Administrasi).	Nilai	96,80	96,79	99,99%	Belum Tercapai

Kedua Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (unsur Kecamatan Administrasi dan Unsur Kota Administrasi) telah dilaksanakan dengan realisasi hampir mencapai target sebesar 96,79 dari target 96,80 sehingga capaian kinerja sebesar 99,99%.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 682/PU.00 tanggal 2 Juli 2025 hal Laporan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2025, adalah :
 - a.1. Dasar hukum Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
 - a.2. Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik telah dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni :
 - a.2.1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
 - a.2.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - a.2.3. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
 - a.2.4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - a.2.5. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
 - a.2.6. Ketertiban Umum (Tibum)
 - a.2.7. Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM).
 - a.3. Dilaksanakan tanggal 9 April s.d 7 Mei 2025 di 31 Kelurahan wilayah kota Adm Jakarta Utara.
 - a.4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester 1 Tahun 2025 sebesar 98,60 dan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi pada Kota Administrasi Kota Jakarta Utara mempunyai Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara Semester 1 Tahun 2025 sebesar 95,07.
 - a.5. Berdasarkan hasil nilai agregat dari IKM terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan nilai agregat sebesar 96,835.

- 
- b. Berdasarkan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0006/PU.04.00 tanggal 16 September 2025 hal Penyampaian Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025 kepada Kepala Biro ORB Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan hal sebagai berikut :
 - b.1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 20 Agustus 2025.
 - b.2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 98,46 dengan predikat “Sangat Baik”.
 - b.3. Jumlah total responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 7 (tujuh) pelayanan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 24.667 dengan rincian :
 - b.3.1. 3.590 responden yang telah menerima layanan Ketertiban Umum (Tibum);
 - b.3.2. 3.756 responden yang telah menerima layanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
 - b.3.3. 3.646 responden yang telah menerima layanan Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
 - b.3.4. 3.615 responden yang telah menerima layanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b.3.5. 3.610 responden yang telah menerima layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b.3.6. 2.848 responden yang telah menerima layanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);
 - b.3.7. 3.602 responden yang telah menerima layanan RT, RW, LMK, dan FKDM.
 - b.4. Terdapat 9 (sembilan) unsur Pelayanan yang di survei yaitu :
 - b.4.1. Persyaratan;
 - b.4.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - b.4.3. Waktu Penyelesaian;

- b.4.4. Biaya/tarif;
- b.4.5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- b.4.6. Kompetensi Pelaksana;
- b.4.7. Perilaku Pelaksana;
- b.4.8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- b.4.9. Sarana dan Prasarana.

- 1.2) Sasaran Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja :
- a) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.

Indikator kinerja ketiga dan keempat ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua dengan nilai target dan realisasi yang berbeda, maka hasil perbandingannya sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

$$= \frac{98.53}{97.22} \times 100\% = 101,35\%$$
- Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

$$= \frac{95.04}{96.38} \times 100\% = 98,61\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	97,22	98,53	101,35%	Tercapai, Efisien
4		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	96,38	95,04	98,61%	Belum Tercapai

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

a) Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 98,53 dari target 97,22 sehingga capaian kinerja sebesar 101,35%.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih perlu ditingkatkan.

Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih adanya pengaduan atau keluhan masyarakat dan baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut sumber daya manusia yang kurang kompeten, informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, penyelesaian pelayanan yang tidak tepat waktu dan standar biaya pelayanan.

Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sejak tahun 2019 hal ini berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kata Administrasi Jakarta Utara Jakarta dilaksanakan di 31 (tiga puluh satu) Kelurahan.

Stakeholder pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta terdiri :

- a. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku pembina, perumusan kebijakan dan pendamping dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
- b. 31 Kelurahan, selaku pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan penyusunan laporan Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.
- c. 6 Kecamatan, selaku penyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat, Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.

- d. Dinas Kominfotik selaku pengembangan aplikasi Jaksurevi-Jaki, penentuan sampling, verifikasi setting kuesioner, grouping verifikasi responden, helpdesk, monev, cleansing serta analisis data.

SEMESTER I

Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 dilakukan secara periodik dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 9 April s.d 7 Mei 2025. Adapun timeline kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pelaksanaan SKM Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan	SKPD	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Rapat persiapan Wilayah	Biro ORB	4 Maret 2025	1
2	Persiapan dan uji coba kuesioner	Diskominfotik	5 – 10 Maret 2025	4
3	Pelaksanaan SKM	Kelurahan	9 April – 7 Mei 2025	20
4	Pengolahan data dan hasil	Diskominfotik	8 – 9 Mei 2025	2
5	Distribusi Hasil Analisis dan waktu Sanggah	Diskominfotik	14 – 16 Mei 2025	3
6	Membuat laporan SKM dan RTL	Kota	- Kelurahan: 19 – 23 Mei 2025 - Kecamatan: 24 – 28 Mei 2025 - Kota: 2 – 6 Juni 2025	13
7	Mengirim laporan SKM dan Rencana Tindak Lanjut ke Biro ORB	Kota	16 Juni 2025	1
8	Menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut	Kelurahan	17 Juni – 8 Juli 2025	15
9	Membuat laporan hasil tindak lanjut SKM	Kota	9 – 28 Juli - Kelurahan: 24 – 28 Juli 2025 - Kecamatan: 29 – 31 Juli 2025	14
10	Mengirim laporan SKM dan Rencana Tindak Lanjut ke Biro ORB	Kota	1 Agustus 2025	1

SEMESTER II

Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 dilakukan secara periodik dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 4 s.d 20 Agustus 2025. Adapun timeline kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2025

No	Kegiatan	SKPD	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Rapat persiapan Wilayah	Biro ORB	2 Juli 2025	1
2	Persiapan dan uji coba kuesioner	Diskominfo	21 Juli – 1 Agustus 2025	10
3	Pelaksanaan SKM	Kelurahan	4 – 20 Agustus 2025	14
4	Pengolahan data dan hasil wilayah	Diskominfo	21 – 22 Agustus 2025	2
5	Distribusi Hasil Analisis dan waktu Sanggah	Diskominfo	25 – 27 Agustus 2025	3
6	Penyusunan Laporan SKM dari Kelurahan ke Kecamatan	Kecamatan	28 Agustus – 3 September 2025	5
7	Penyusunan Laporan SKM dari Kecamatan ke Tingkat Kota	Kota	4 – 11 September 2025	5
8	Penyusunan Laporan SKM Tingkat Kota	Kota	12 – 18 September 2025	5
9	Kota mengirim laporan SKM dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ke Biro ORB Semester II Tahun 2025 dan Hasil TL SKM Semester I Tahun 2025	Kota	19 – 22 September 2025	2
10	Biro ORB membuat laporan SKM	Biro ORB	23 – 29 September 2025	5
11	Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan menindaklanjuti RTL SKM Semester II Tahun 2025	Kota	23 September – 13 Oktober 2025	15
12	Kelurahan membuat laporan tindak lanjut SKM Semester II Tahun 2025	Kelurahan	14 – 31 Oktober 2025	14
13	Kelurahan mengirimkan hasil tindak lanjut SKM Semester II ke Kecamatan dan Kecamatan ke Kota/Kabupaten	Kelurahan	3 – 7 November 2025	5

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sudah dilakukan, di 31 Kelurahan dan 6 Kecamatan, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Semester I dan II Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I dan II Tahun 2025

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	Kecamatan Tanjung Priok	Semester I (Januari – Juni)	96,97	96,97	96,93	97,14	96,96	96,88	97,09	97,01	97,05	97,00	A (Sangat Baik)	7.359	SKM Online	1. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 2. Waktu Penyelesaian 3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana Pelayanan : - Melakukan Pelatihan Khusus terhadap Petugas Pelayanan. - Implementasi Aplikasi terintegrasi seperti Jakevo mendukung penilaian kompetensi ASN yang lebih efektif. Waktu Penyelesaian: Melakukan Sosialisasi terhadap petugas terkait waktu penyelesaian. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepuasan masyarakat yang lebih baik.	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Semester II (Juli – Desember)	96,89	96,90	96,89	97,17	96,98	96,98	97,07	97,01	96,98	96,98	A (Sangat Baik)	6.303	SKM Online	1. Persyaratan 2. Jangka Waktu 3. Prosedur	Persyaratan: Melakukan penyeragaman persyaratan dalam pelayanan agar tidak harus bolak balik mengurus. Jangka Waktu: Membuat aplikasi nomor antrian secara online guna meminimalisir waktu pelayanan yang masih dirasakan lambat oleh Masyarakat. Prosedur: Meningkatkan pelayanan dengan melayani dengan senyum dan ramah.	100%
		Rata-Rata Tahunan	96,93	96,93	96,91	97,15	96,97	96,93	97,08	97,01	97,01	96,99	A (Sangat Baik)					

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
2	Kecamatan Penjaringan	Semester I (Januari – Juni)	98,83	98,81	98,96	98,99	98,87	98,80	98,93	98,98	98,80	98,89	A (Sangat Baik)	4.157	SKM Online	1. Sistem Mekanisme dan Prosedur 2. Kompetensi Pelaksana 3. Sarana dan Prasarana	Sistem Mekanisme dan Prosedur: Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kompetensi Pelaksana: Melakukan pelatihan khusus terhadap petugas pelayanan. Sarana dan Prasarana: - Melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Penjaringan. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang sudah tersedia.	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Semester II (Juli – Desember)	99,22	99,16	99,14	98,95	99,20	99,27	99,42	98,86	99,38	99,18	A (Sangat Baik)	3.857		1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2. Biaya Tarif 3. Waktu Penyelesaian	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Melakukan pelatihan terkait penanganan aduan yang sesuai dengan SOP.. Biaya Tarif: Pemenuhan kebutuhan alat yang sesuai dengan standar. Waktu Penyelesaian: Sosialisasi kepada masyarakat terkait registrasi online.	100%
		Rata-Rata Tahunan	99,03	98,99	99,05	98,97	99,04	99,04	99,18	98,92	99,09	99,04	A (Sangat Baik)					

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
3	Kecamatan Pademangan	Semester I (Januari – Juni)	99,55	99,54	99,57	99,66	99,65	99,62	99,56	99,63	99,61	99,59	A (Sangat Baik)	2.041	SKM Online	1. Sistem Mekanisme dan Prosedur 2. Persyaratan 3. Waktu	Sistem Mekanisme dan Prosedur: Membuat SOP yang mudah, agar dapat digunakan oleh warga. Persyaratan: Memberikan lebih banyak Sosialisasi kepada Masy tentang Persyaratan Pelayanan Waktu: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Waktu pelayanan.	100%
		Semester II (Juli – Desember)	99,23	99,73	99,66	99,75	99,77	99,71	99,65	99,72	99,71	99,66	A (Sangat Baik)	2.329	SKM Online	1. Persyaratan 2. Perilaku 3. Jangka Waktu	Persyaratan: Meningkatkan sarana informasi secara online agar warga dapat mengakses informasi. Perilaku: Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan Jangka Waktu: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Waktu pelayanan.	100%
		Rata-Rata Tahunan	99,39	99,64	99,62	99,71	99,71	99,67	99,61	99,68	99,66	99,63	A (Sangat Baik)					

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
4	Kecamatan Koja	Semester I (Januari – Juni)	99,48	99,53	99,53	99,57	99,60	99,61	99,62	99,62	99,64	99,58	A (Sangat Baik)	4.491	SKM Online	1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Jangka Waktu	Persyaratan: - Sosialisasi - Monitoring dan Evaluasi Prosedur: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent. Jangka Waktu: - Peningkatan sosialisasi registrasi "online". - Penambahan loket layanan/SDM.	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Semester II (Juli – Desember)	98,13	98,16	98,13	98,30	98,13	98,16	98,27	98,19	98,19	98,18	A (Sangat Baik)	4.629	SKM Online	1. Persyaratan 2. Jangka Waktu 3. Produk	Persyaratan: Sosialisasi monitoring dan evaluasi terkait Persyaratan adanya daftar persyaratan yg membutuhkan waktu untuk dilengkapi, sehingga menyebabkan penambahan Waktu penyelesaian dalam proses pelayanan. Jangka Waktu: Peningkatan sosialisasi registrasi "online" penambahan loket layanan/SDM guna meminimalisir terbatasnya loket layanan/SDM beberapa pelayanan masih dilakukan secara manual. Produk: Memberikan pembinaan dan peningkatan sehingga bisa mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan.	100%
		Rata-Rata Tahunan	98,81	98,85	98,83	98,94	98,87	98,89	98,95	98,91	98,92	98,88	A (Sangat Baik)					

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
5	Kecamatan Kelapa Gading	Semester I (Januari – Juni)	97,89	97,83	97,85	97,87	97,84	97,90	97,90	97,87	97,89	97,87	A (Sangat Baik)	2.196	SKM Online	1. Prosedur 2. Jangka Waktu 3. Produk Layanan	Prosedur: Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Jangka Waktu: Melaksanakan koordinasi dengan kelurahan untuk pemberian sosialisasi kepada petugas dalam memberikan pelayanan agar memperhatikan target yang harus diselesaikan dan membuat laporan kinerja secara berkala Produk Layanan: Berkoordinasi dengan kelurahan dalam pembuatan pedoman layanan (SOP) pelayanan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan	100%

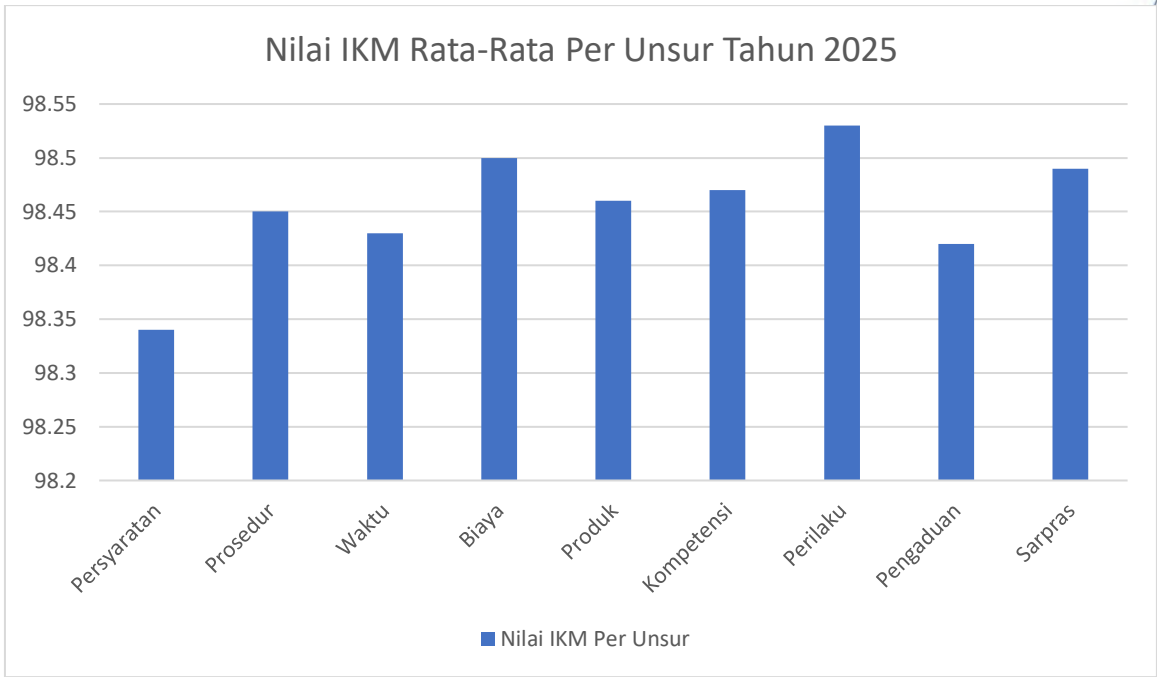
No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Semester II (Juli – Desember)	98,95	99,04	99,06	99,03	99,01	99,04	99,04	99,01	98,96	99,01	A (Sangat Baik)	4.629	SKM Online	1. Persyaratan 2. Sarana dan Prasarana 3. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	Persyaratan: Membuat SOP yang mudah agar dapat digunakan oleh warga. Sarana dan Prasarana: Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi gedung kantor, ruang rapat, serta fasilitas umum lainnya. Produk: - Memberikan sosialisasi produk layanan Pemerintahan maupun Kecamatan Kelapa Gading kepada Warga, RT, RW, dan LMK. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap waktu pelayanan.	100%
		Rata-Rata Tahunan	98,42	98,44	98,46	98,45	98,43	98,47	98,47	98,44	98,43	98,44	A (Sangat Baik)					

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
6	Kecamatan Cilincing	Semester I (Januari – Juni)	98,68	98,67	98,59	98,68	98,63	98,67	98,71	98,68	98,68	98,67	A (Sangat Baik)	4.932	SKM Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Kompetensi Pelaksana Pelayanan	Waktu Penyelesaian: Melakukan Sosialisasi terhadap Petugas pelayanan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu pelayanan. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Melakukan Sosialisasi Peningkatan Kualitas pelayanan publik. Kompetensi Pelaksana Pelayanan: - Melakukan Pelatihan tambahan Terhadap Petugas Pelayanan. - Memaksimalkan penggunaan aplikasi seperti Jakevo, JAKI untuk mendukung Penilaian kompetensi ASN yang efektif.	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Semester II (Juli – Desember)	97,66	97,70	97,70	97,78	97,69	97,69	97,77	97,74	97,73	97,72	A (Sangat Baik)	4.629	SKM Online	1. Persyaratan 2. Produk Spesifikasi 3. Kompetensi Petugas	Persyaratan: Sosialisasi kepada petugas pelayanan terkait SOP Pelayanan. Produk Spesifikasi: Sosialisasi kepada warga masyarakat terkait penggunaan beberapa Aplikasi Pemprov DKI Jakarta, seperti Jakevo dan Jaki. Kompetensi Petugas: Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala kepada petugas pelayanan.	100%
		Rata-Rata Tahunan	98,17	98,19	98,15	98,23	98,16	98,18	98,24	98,21	98,21	98,20	A (Sangat Baik)					

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
7	IKM Kota Administrasi Jakarta Utara	Semester I (Januari – Juni)	98,55	98,55	98,57	98,65	98,59	98,58	98,63	98,63	98,61	98,60	A (Sangat Baik)	25.176	SKM Online	1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Jangka Waktu	Persyaratan: Melakukan rapat evaluasi. Kompetensi: Melakukan Pembinaan terhadap Kelurahan dan Kecamatan. Jangka Waktu: Melakukan monitoring dan evaluasi.	100%
		Semester II (Juli – Desember)	98,34	98,45	98,43	98,50	98,46	98,47	98,53	98,42	98,49	98,46	A (Sangat Baik)	24.667	SKM Online	1. Persyaratan 2. Pengaduan 3. Jangka Waktu	Persyaratan: Melakukan evaluasi terhadap unsur persyaratan yang dianggap rumit atau tidak relevan. Pengaduan: Mensosialisasikan prosedur sarana pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan. Jangka Waktu: Melakukan penyesuaian jumlah petugas dengan volume permintaan layanan agar tidak terjadi penumpukan.	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi TL Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Rata-Rata IKM Kota Administrasi Jakarta Utara	98,45	98,50	98,50	98,58	98,53	98,53	98,58	98,53	98,55	98,53	A (Sangat Baik)			Analisis Unsur Prioritas (Yang paling sering muncul) 1. Persyaratan 2. Waktu	Analisis: - Kendala dalam unsur persyaratan pelayanan dan waktu penyelesaian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan masih belum optimal. Kurangnya sosialisasi menyebabkan Masyarakat kurang memahami dengan baik persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga memperlambat waktu proses pelayanan. - Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas petugas agar pelayanan menjadi lebih maksimal.	



Gambar 3.1. Grafik Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Unsur Layanan Semester I dari tabel di atas adalah :

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh IKM Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I yaitu 98,60, dapat diketahui bahwa:

- a. Tiga unsur layanan dengan **nilai terendah** yaitu :
 - a.1. Unsur Persyaratan dengan nilai 98,55;
 - a.2. Unsur Prosedur dengan nilai 98,55;
 - a.3. Unsur Waktu dengan nilai 98,57.
- b. Tiga unsur layanan dengan **nilai tertinggi** yaitu :
 - b.1. Unsur Biaya dengan nilai 98,65;
 - b.2. Unsur Perilaku dengan nilai 98,63;
 - b.3. Unsur Pengaduan dengan nilai 98,63.

Unsur Layanan Semester II dari tabel di atas adalah :

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh IKM Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II yaitu 98,46, dapat diketahui bahwa:

a. Tiga unsur layanan dengan **nilai terendah** yaitu :

- a.1. Unsur Persyaratan dengan nilai 98,34;
- a.2. Unsur Pengaduan dengan nilai 98,42;
- a.3. Unsur Waktu dengan nilai 98,43.

b. Tiga unsur layanan dengan **nilai tertinggi** yaitu :

- b.1. Unsur Perilaku dengan nilai 98,53;
- b.2. Unsur Biaya dengan nilai 98,50;
- b.3. Unsur Sarpras dengan nilai 98,49.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

a. Semester I :

- Sosialisasi persyaratan/pelayanan;
- Sosialisasi prosedur/pelayanan;
- Lebih diperhatikan waktu penyelesaian pelayanan.

b. Semester II :

- Melakukan evaluasi terhadap unsur persyaratan yang dianggap rumit atau tidak relevan;
- Mensosialisasikan prosedur sarana pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
- Melakukan penyesuaian jumlah petugas dengan volume permintaan layanan agar tidak terjadi penumpukan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Unsur persyaratan dalam pelayanan masih menjadi kendala karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi dari kelurahan dan kecamatan kepada Masyarakat.
- b. Masih belum berjalan optimalnya prosedur layanan yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan sosialisasi agar petugas lapangan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan optimal.

- c. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh Masyarakat dan layanan yang diberikan oleh petugas dirasakan oleh Masyarakat belum cepat tindaklanjutnya.

Tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat dilihat melalui grafik berikut :



Keterangan:
Nilai SKM Semester I 2025: 98,60
Nilai SKM Semester II 2025: 98,46

Gambar 3.2. Grafik Nilai SKM Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2020 - 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025 di lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam melaksanakan tugas SKM selama Semester I (9 April s.d 7 Mei 2025) dan Semester II (4 s.d 20 Agustus 2025) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM Semester I yaitu 98,60 dan nilai SKM Semester II yaitu 98,46. Nilai IKM di lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 s.d. 2025.
- b. Terdapat 3 (tiga) Kelurahan capaian nilai terendah dan menjadi prioritas perbaikan pada :
 - Semester I tahun 2025 yaitu Kelurahan Sungai Bambu (86,22), Kelurahan Kelapa Gading Timur (95,35) dan Kelurahan Sunter Agung (97,32).
 - Semester II tahun 2025 yaitu Kelurahan Sungai Bambu (93,14), Kelurahan Tugu Utara (94,87) dan Kelurahan Kebon Bawang (95,28).
- c. Sedangkan 3 (Tiga) Kelurahan dengan capaian nilai tertinggi yaitu:
 - Semester I tahun 2025 yaitu Kelurahan Pegangsaan Dua (100), Kelurahan Kapuk Muara (100), dan Kelurahan Kamal Muara (99,97)
 - Semester II tahun 2025 yaitu Kelurahan Pegangsaan Dua (100), Kelurahan Kapuk Muara (94,87) dan Kelurahan Kamal Muara (99,97).
- d. Dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Kelurahan Kota Adm Jakarta Utara, agar unsur pelayanan yang termasuk 3 (tiga) unsur terendah menjadi prioritas perbaikan dan untuk unsur pelayanan yang memperoleh capaian tertinggi agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.
- e. Dengan data pendukung ada di Lampiran 3.2 pada LKIP Tahun 2025 ini.

b) Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi kurang dari target yaitu sebesar 95,04 dengan target 96,38 sehingga capaian kinerja tidak mencapai 100% hanya sebesar 98,61%, dikarenakan ada pergantian Pimpinan (sebagai Responden).

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

a. Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2025, dengan laporan :

- a.1. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 681/PU.00 tanggal 2 Juli 2024 hal Laporan Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2025.
- a.2. Dasar hukum Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
- a.3. Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara dimulai pada tanggal 2 Juni sampai dengan 3 Juli 2024.
- a.4. Jumlah total responden Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 30 Responden dengan rincian :
 - a.4.1. 7 Responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara;
 - a.4.2. 11 Responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Utara;

- a.4.3. 12 Responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara.
- a.5. Terdapat 6 (enam) tujuan survei yaitu :
 - a.5.1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi;
 - a.5.2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah);
 - a.5.3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya;
 - a.5.4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi;
 - a.5.5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait pelayanan koordinasi;
 - a.5.6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian.
- a.6. Standar penilaian Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

- a.7. Rincian Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Semester I Tahun 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan responden Kepala Sudin dan Kepala Suban di bawah koordinasi Asisten Sekretaris di Kota Adm Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Kota Jakarta Utara

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	95,97	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	95,97
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	96,73	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	96,73
WAKTU	93,06	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	93,06
BIAYA	97,85	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97,85
PRODUK PELAYANAN	93,71	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	94,02
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	93,39
KOMPETENSI PELAKSANA	94,10	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	94,52
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	93,26
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	94,52
PERILAKU PELAKSANA	95,46	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	96,40
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	94,52
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	93,82	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	93,82
SARANA DAN PRASARANA	94,95	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	94,95
Indeks Kepuasan			95,07

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

Tabel 3.7. Nilai Asisten Sekretaris Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	97,73	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	97,73
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	100,00	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	100,00
WAKTU	93,18	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	93,18
BIAYA	97,73	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97,73
PRODUK PELAYANAN	96,59	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	95,45
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	97,73

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
KOMPETENSI PELAKSANA	94,69	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	95,45
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	93,18
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	95,45
PERILAKU PELAKSANA	95,45	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	95,45
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	95,45
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	95,45	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	95,45
SARANA DAN PRASARANA	95,45	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	95,45
Indeks Kepuasan			92,32

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

Tabel 3.8. Nilai Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	96,43	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	96,43
SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR	96,43	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	96,43
WAKTU	96,43	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	96,43
BIAYA	100,00	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	100,00
PRODUK PELAYANAN	92,86	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	92,86
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	92,86
KOMPETENSI PELAKSANA	95,24	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	96,43
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	92,86
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	96,43
PERILAKU PELAKSANA	98,22	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	100,00
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	96,43
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	96,43	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	96,43
SARANA DAN PRASARANA	100,00	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	100,00
Indeks Kepuasan			96,89

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

Tabel 3.9. Nilai Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	97,73	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	97,73
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	100,00	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	100,00
WAKTU	93,18	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	93,18
BIAYA	97,73	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97,73
PRODUK PELAYANAN	96,59	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	95,45
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	97,73
KOMPETENSI PELAKSANA	94,69	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	95,45
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	93,18
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	95,45
PERILAKU PELAKSANA	95,45	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	95,45
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	95,45
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	95,45	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	95,45
SARANA DAN PRASARANA	93,18	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	93,18
Indeks Kepuasan			96,00

Sumber : e-Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

b. Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025

- b.1. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1559/KG.05.02 tanggal 31 Desember 2025 hal Laporan Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025.
- b.2. Dasar hukum Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

- b.3. Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara dimulai pada tanggal 17 s.d. 24 Desember 2025.
- b.4. Jumlah total responden Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 30 Responden dengan rincian :
 - b.4.1. 7 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara;
 - b.4.2. 11 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Utara;
 - b.4.3. 12 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara.
- b.5. Terdapat 6 (enam) tujuan survei yaitu :
 - b.5.1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi;
 - b.5.2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah);
 - b.5.3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya;
 - b.5.4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi;
 - b.5.5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait pelayanan koordinasi;
 - b.5.6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian.
- b.6. Standar penilaian Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,065 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,539 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

b.7. Rincian Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Kota Administrasi Semester I dan II Tahun 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan responden Kepala Suku Dinas dan Kepala Suku Badan di bawah koordinasi Asisten di Kota Administrasi Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

No.	Koordinasi Asisten Sekretaris Kota	Indeks Kepuasan Semester I	Indeks Kepuasan Semester II	Keterangan
1	Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	92,32	92,09	Mutu A
2	Bidang Pemerintahan	96,89	95,83	Mutu A
3	Bidang Perekonomian dan Pembangunan	96,0	97,10	Mutu A
Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Kota Administrasi Jakarta Utara		95,07	95,01	Mutu A

b.8. Agregat Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 yaitu 95,04, dengan rincian sebagai berikut :

b.8.1. Semester I Nilai Indeks: 95,07;

b.8.2. Semester II Nilai Indeks: 95,01.

b.9. Rincian Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Semester II Tahun 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan sasaran Kepala Suku Dinas dan Kepala Suku Badan, maka Nilai Indeks koordinasi Asisten Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Kota Jakarta Utara

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	97,42	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	97,42
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	95,97	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	95,97
WAKTU	96,03	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	96,03
BIAYA	95,97	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	95,97
PRODUK PELAYANAN	94,33	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	92,63
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	96,03
KOMPETENSI PELAKSANA	94,05	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	95,77
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	93,06
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	93,33
PERILAKU PELAKSANA	93,44	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	95,34
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	91,55
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	92,57	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	92,57
SARANA DAN PRASARANA	95,28	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	95,28
Indeks Kepuasan			95,01

Sumber : e-Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

Tabel 3.11. Nilai Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	95,83	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	95,83
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	93,75	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	93,75
WAKTU	91,67	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	91,67
BIAYA	93,75	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	93,75
PRODUK PELAYANAN	90,62	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	89,58
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	91,67

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
KOMPETENSI PELAKSANA	90,28	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	89,58
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	89,58
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	91,67
PERILAKU PELAKSANA	89,58	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	89,58
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	89,58
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	91,67	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	91,67
SARANA DAN PRASARANA	91,67	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	91,67
Indeks Kepuasan			92,09

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

Tabel 3.12. Nilai Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	96,43	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	96,43
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	96,43	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	96,43
WAKTU	96,43	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	96,43
BIAYA	96,43	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	96,43
PRODUK PELAYANAN	94,64	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	92,86
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	96,43
KOMPETENSI PELAKSANA	96,43	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	100
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	96,43
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	92,86
PERILAKU PELAKSANA	96,43	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	96,43
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	96,43
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	92,86	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	92,86

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
SARANA DAN PRASARANA	96,43	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	96,43
Indeks Kepuasan			95,83

Sumber : e-Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

Tabel 3.13. Nilai Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	100	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	100
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	97,73	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	97,73
WAKTU	100	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	100
BIAYA	97,73	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97,73
PRODUK PELAYANAN	97,73	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	95,45
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	100
KOMPETENSI PELAKSANA	95,45	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	97,73
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	93,18
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	95,45
PERILAKU PELAKSANA	94,32	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	100
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	88,64
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	93,18	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	93,18
SARANA DAN PRASARANA	97,73	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	97,73
Indeks Kepuasan			97,10

Sumber : e-Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

- c. Data pendukung Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I dan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 3.2 Laporan ini.

b. SASARAN RELEVAN LAINNYA

1) Sasaran Strategis ada 9 (sembilan) Sasaran yaitu :

- 1.1) Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Survei Kepuasan Layanan Masyarakat.

Indikator kinerja kelima ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang pertama dengan realisasi melebihi target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $\frac{95.98}{92} \times 100\% = 105\%$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	96,98	105%	Tercapai, Efisiensi

Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat telah dilaksanakan pada triwulan I dengan realisasi melebihi target sebesar 95,98 dari target sebesar 92, sehingga capaian kinerja sebesar 104%. Sama halnya dengan triwulan III dengan realisasi melebihi target sebesar 96,88 dari target sebesar 92, sehingga capaian kinerja sebesar 105%.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

TW 1 : N/A

TW 2 :

Target : 96,8

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW2 telah direalisasikan sebesar 96,84, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%. Data pendukung tidak dapat di unduh

TW 3 :

Target : 96,8

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW2 telah direalisasikan sebesar 96,84, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%. Data pendukung tidak dapat di unduh

TW 4 :

Target : 96,8

Data pendukung tidak dapat di unduh.

- 1.2) Sasaran Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.

Indikator kinerja keenam ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kedua dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100%	Tercapai

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

TW 1 :

Target : 100%

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW2 telah direalisasikan 100%, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%.

Data pendukung tidak dapat di unduh

TW 2 :

Target : 100%

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW2 telah direalisasikan 100%, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%.

Data pendukung tidak dapat di unduh

TW 3 :

Target : 100%

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW3 telah direalisasikan 100%, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%.

Data pendukung tidak dapat di unduh

TW 4 :

Target : 100%

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW4 telah direalisasikan 100%, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%.

Data pendukung :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Realisasi Strategi Komunikasi (Strakom) Triwulan IV Tahun 2025 kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0013/PU.04.00 tanggal 23 Desember 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sehubungan dengan target sasaran relevan lainnya Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu terimplementasinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah, yaitu :
 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan Perangkat Daerah pada tanggal 9 Desember 2025 dengan judul Komunikasi Publik Talk.

2. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara telah melaksanakan program Antisipasi Genangan dan Banjir serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Data pendukung Hasil Indeks Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program Prioritas Dan Strategis Serta Respons Perangkat Daerah Dengan Program Prioritas Dan Strategis Pada Saat Krisis Komunikasi Program Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 3.3 Laporan ini.

1.3) Sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Indikator kinerja ketujuh ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang ketiga dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100%	Tercapai

Indikator kinerja Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

TW 1 :

Target : 5
Realisasi : Target tidak terealisasi.

TW 2 :

Target : 25
Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW2 telah direalisasikan sebesar 79,68, melebihi target, sehingga capaian sebesar 100%.
Data pendukung tidak dapat di unduh

TW 3 :

Target : 55
Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW3 telah direalisasikan sebesar 90, melebihi target, sehingga capaian sebesar 100%.
Data pendukung tidak dapat di unduh.

TW 4 :

Target : 100
Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW4 telah direalisasikan 100%, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%.
Data pendukung tidak dapat di unduh.

- 1.4) Sasaran Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai kualitas data SDI.

Indikator kinerja kedelapan ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang keempat dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut:

Capaian Kinerja = $\frac{3.25}{3.25} \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3.25	3.25	100%	Tercapai

Indikator kinerja Nilai kualitas data SDI telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 3,25, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

TW 1 : N/A

TW 2 : N/A

TW 3 : N/A

TW 4 :

Target : 3,25

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW4 telah direalisasikan sebesar 3,25, sesuai target, sehingga capaian sebesar 100%.

- 1.5) Sasaran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Indikator kinerja kesembilan ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kelima dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	100	100	100%	Tercapai

Indikator kinerja Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Triwulan II :

Capaian indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri TW2 sebesar 73,68% dari target 30%.

Data pendukung tidak dapat di unduh.

Triwulan IV :

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01/UD.02.04 Hal Laporan Capaian P3DN pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 5 Januari 2026, yaitu: Menindaklanjuti Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Indikator Kinerja Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat dilaporkan capaian P3DN pada Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100%.
2. Pelaksanaan realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri Tahun Anggaran 2025 dapat di monitoring pada dashboard bigbox LKPP sedangkan penginputan data dapat dilakukan pada masing-masing sumber data yang akan terintegrasi dengan dashboard bigbox LKPP :
 - a. Data perencanaan bersumber dari Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
 - b. Data Pelaksanaan bersumber dari :
 - i. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPE): baik tender maupun non tender yang sedang berjalan, dan non-kontraktual (swakelola, pencatatan dan dana darurat);
 - ii. Toko Daring: data pembelian yang tercatat pada platform Toko Daring (termasuk e-Order);

- iii. e-Katalog: Data pembelian yang tercatat pada platform e-Katalog
 - c. Data pencatatan Swakelola bersumber dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang direkapitulasi oleh BPPBJ.
 - d. Data Realisasi Pembayaran bersumber dari pembayaran belanja pengadaan yang direkapitulasi oleh BPKD.
3. Hasil perhitungan capaian P3DN berdasarkan Laporan Pelaksanaan P3DN dari sumber Bigbox LKPP untuk pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa periode 1 Januari - 31 Desember 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Capaian Perkin adalah sebesar 100%.

Data pendukung :

Data pendukung Hasil Indeks Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran 3.4 Laporan ini.

- 1.6) Sasaran Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar.

Indikator kinerja kesepuluh ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang keenam dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100	100	100%	Tercapai

Indikator kinerja Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Triwulan I :

Realisasi sesuai target, sebesar 10.

Data pendukung tidak dapat di unduh.

Triwulan II :

Realisasi sesuai target, sebesar 40.

Data pendukung tidak dapat di unduh.

Triwulan III :

Realisasi sesuai target, sebesar 70.

Data pendukung tidak dapat di unduh.

Triwulan IV :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Kinerja Lain yang Relevan dengan Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang Mendorong Pembelajaran, Kolaborasi, dan Berbagi Pengetahuan Triwulan IV kepada Yth. Bapak Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor e-0106/DL.01.00 tanggal 30 Desember 2025, yaitu :

- a. Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai agenda yang telah disusun;
- b. Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan aset pengetahuan dan diunggah pada portal KM;
- c. Aset pengetahuan yang dihasilkan kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari jumlah pegawai pada perangkat daerah.

Data pendukung :

Data pendukung Hasil Indeks Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar dapat dilihat pada Lampiran 3.5 Laporan ini.

1.7) Sasaran Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

Indikator kinerja kesebelas ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kesembilan dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut:

Capaian Kinerja = $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%	Tercapai

Indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

OUTPUT :
Indikator Kinerja Lain Yang Relevan
Penyelesaian Implementasi Manajemen Risiko :

TW II :
Tidak ada data pendukung.

TW IV :
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025.

Rencana Aksi :
TW II :
Tidak Ada.
TW IV :
- Memperbaiki Surat Keputusan Struktur Manajemen Risiko.

- Pemantauan Aduan Masyarakat pada Sistem CRM.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan.
- Sosialisasi mengenai kebutuhan usulan komponen dalam penyusunan anggaran.

Data pendukung :
 Data pendukung Hasil Indeks Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dapat dilihat pada Lampiran 3.6 Laporan ini.

1.8) Sasaran Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

Indikator kinerja kedua belas ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kesepuluh dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{90.92}{71} \times 100\% = 128,06\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	90.92	128,06%	Tercapai, Efisien

Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 90,92 dari target 71, sehingga capaian kinerja sebesar 128,05%.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai :

TW I : N/A

TW II : N/A

TW III : N/A

TW IV :

Target : 71

Realisasi : Target Strategi Komunikasi TW4 telah direalisasikan sebesar 90,92, melebihi target, sehingga capaian lebih dari 100%.

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022/UD.02.02 tanggal 8 Januari 2025 Hal Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tahun Anggaran 2025 yaitu :

Sehubungan perjanjian kinerja sasaran khusus Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang merupakan target pada triwulan IV, berikut disampaikan hasil perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tahun 2025.

Data pendukung :
Data pendukung Hasil Indeks Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dapat dilihat pada Lampiran 3.7 Laporan ini.

- 1.9) Sasaran Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK).

Indikator kinerja ketiga belas ini merupakan ukuran dari sasaran relevan lainnya yang kesebelas dengan realisasi sesuai target, maka hasil perbandingannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN RELEVAN LAINNYA						
1	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	90.92	128,06%	Tercapai

Indikator kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Data pendukung :

Data pendukung Hasil Indeks Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dapat dilihat pada Lampiran 3.8 Laporan ini.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra

Pada Sub bab ini membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang terdapat dalam Renstra, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Renstra

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KOTA PESISIR YANG MEMBERIKAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK SERTA PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	86,75	87,75	87,85	86,75	93,79	96,80	100%	106,88%	110,19%
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,5	95,28	97,22	100%	107,54%	109,61%
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KOTA PESISIR YANG MEMBERIKAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK SERTA PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	86,75	87,3	87,85	86,75	93,79	96,80	100%	106,88%	110,19%
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Nilai	85	86	87	85	92,3	96,38	100%	107,33%	110,78%
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	90	95	95	90	N/A	95,31	100%	N/A	100,33%
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	85	86	87	100	99,01	96,36	117,65%	115,13%	110,765
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	85	86	87	93,56	99,51	96,55	110,07%	115,71%	110,98%
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	85	86	87	95,33	91,24	92,205	112,15%	106,09%	106,98%

Dilihat pada tabel perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang terdapat dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara dari tahun 2023 sampai dengan 2025 di atas, dapat dilaporkan bahwa capaian kinerja sasaran Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2025 rata-rata tercapai 100%. Terhadap 10 (sepuluh) indikator dapat dipenuhi dengan baik bahkan 3 (tiga) indikator dengan realisasi lebih tinggi dari target. Capaian kinerja program tahun 2025 sebesar 103,06%.

Secara umum capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2023-2025 kalau dibandingkan dengan target Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2025 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian rata-rata sasaran dan program mendekati 100%.

Berikut ini adalah tabel kemajuan capaian strategis, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.15. Tabel Kemajuan Capaian Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=(4/5)*100
SASARAN STRATEGIS					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	100,04%	89,5	1,117
2	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	101,42%	88,8	1,142
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	98,64%	88,5	1,114

Berdasarkan Tabel Kemajuan Capaian Strategis di atas, yang dapat disampaikan adalah :

a. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK)

IKLK tahun 2025 mempunyai target sebesar 96,80 dengan realisasi sebesar 96,84 sehingga memperoleh capaian sebesar 100,04%.

Target Akhir IKLK tahun 2026 dari Renstra sebesar 89,5.

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kemajuan} &= (\text{Capaian 2025} / \text{Target Akhir 2026}) \times 100 \\ &= (100,04\% / 89,5) \times 100 \\ &= 1,117\end{aligned}$$

Jadi tingkat kemajuan IKLK tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 1,117.

b. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

IKM tahun 2025 mempunyai target sebesar 97,22 dengan realisasi sebesar 98,60 sehingga memperoleh capaian sebesar 101,42%.

Target Akhir IKM tahun 2026 dari Renstra sebesar 88,8.

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kemajuan} &= (\text{Capaian 2025} / \text{Target Akhir 2026}) \times 100 \\ &= (101,42\% / 88,8) \times 100 \\ &= 1,142\end{aligned}$$

Jadi tingkat kemajuan IKM tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 1,142.

c. Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi (IEK) Kota Administrasi

IEK tahun 2025 mempunyai target sebesar 96,38 dengan realisasi sebesar 95,07 sehingga memperoleh capaian sebesar 98,64%.

Target Akhir IEK tahun 2026 dari Renstra sebesar 88,5.

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kemajuan} &= (\text{Capaian 2025} / \text{Target Akhir 2026}) \times 100 \\ &= (98,64\% / 88,5) \times 100 \\ &= 1,114\end{aligned}$$

Jadi tingkat kemajuan IEK tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 1,114.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Pada Sub bab ini membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja Sasaran Tahun 2025							
		Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta						Daerah Luar Jakarta	
		Jakarta Utara	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan 1000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	Diskominfo Kabupaten Serang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	98,53	99,53	96,06	97,45	98,31	93,75	63,69	83,24

Sumber : Laporan SKM Tahun 2025

Dilihat pada tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di atas, dapat dilaporkan bahwa :

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2025 dilihat dari 8 (delapan) Kota/Kabupaten yang berbeda, terdapat bervariasi nilai yang diperoleh, untuk perbandingan realisasi Indikator Kinerja untuk tahun 2025 dilihat dari 6 (enam) Kota/Kabupaten yang berbeda (Kota Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten Pulau Seribu), terdapat bervariasi nilai yang diperoleh, mempunyai nilai realisasi di atas 90, yaitu:

- 
- a. Realisasi nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 98,53 tercapai target, dari target sebesar 97,22.
 - b. Realisasi nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 99,53 tercapai target, dari target sebesar 98,98.
 - c. Realisasi nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 96,06 tidak tercapai target, dari target sebesar 96,18.
 - d. Realisasi nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 97,45 tercapai target, dari target sebesar 96,8.
 - e. Realisasi nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 98,315 tercapai target, dari target sebesar 97,905.
 - f. Realisasi nilai IKM Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 93,75 tidak mencapai target, dari target sebesar 96.

Dan ada 2 kota yang juga diperbandingkan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan realisasi sebesar 63,69 dan pada Disfominfo Kabupaten Serang sebesar 83,24.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ke 8 (delapan) Kota/Kabupaten tersebut di atas, sama-sama memerlukan satu periode pelaksanaan, dengan didukung oleh data kuisisioner SKM, data calon responden, data jumlah penerima layanan dan laporan pelaksanaan SKM tahun 2025.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut antara lain yaitu :

- a. Efisiensi waktu dan ketepatan tanggapan terhadap keluhan.
- b. Mempercepat proses perolehan informasi layanan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Baru sebagian petugas yang diberikan pelatihan khusus terkait service excellent.
- b. Belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah akan menjadi prioritas perbaikan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi merupakan keberhasilan.

Ke 8 (delapan) Kota/Kabupaten tersebut di atas, juga melakukan analisa dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Untuk melakukan perbaikan telah dilakukan antara lain :

- a. Memperbanyak pemberian informasi dari berbagai media kepada masyarakat mengenai layanan gratis atau dengan biaya/tarif yang telah ditetapkan baik di lobi PTSP maupun website.
- b. Memastikan terdapatnya informasi yang cukup mengenai prosedur layanan dari masing-masing layanan PTSP pada website dan media sosial.
- c. Memberikan reward bagi petugas layanan dengan prestasi terbaik yang diukur dengan ketepatan waktu pelayanan.
- d. Memberikan kompensasi kepada masyarakat yang merasakan kekecewaan terhadap keterlambatan pelayanan yang diberikan petugas layanan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Standar Nasional Tahun 2025 di atas, pada kolom 9 dan 10 Kota Administrasi Jakarta Utara membandingkan dengan 63,69 dan 83,24, karena nilai Indikator Kinerja IKM kecil dibandingkan dengan 6 (enam) Kota Administrasi yang lain, yaitu :

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Diskominfo Kabupaten Serang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025			% Capaian	GAP
			Kota Adm JU	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	Diskominfo Kabupaten Serang		
1	2	3	4	5	6	$7=(4/5)*100$	$8=4-5$
1	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96,79			151,97%	33,1
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,69			
2	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96,79			116,27%	13,55
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat			83,24		

Dilihat pada tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Diskominfo Kabupaten Serang Tahun 2025 di atas, dapat dilaporkan bahwa :

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

1. Kota Administrasi Jakarta Utara

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan pada Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2025 mempunyai realisasi melebihi target sebesar 98,60 dari target yang ditentukan sebesar 97,22 sehingga memperoleh capaian sebesar 101,42%.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun unsur layanan yang di survei di antaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mempunyai realisasi dari target sebesar 63,69 dari yang ditentukan sebesar 63,68 sehingga memperoleh capaian sebesar 100,01%.

Indikator Kinerja ini merupakan kegiatan yang melebihi target, maka capaiannya melebihi 100% pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, meskipun hampir semua capaian kinerja kegiatan telah terealisasi sesuai target.

Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 90,20% dan dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor serta faktor pendukung teknis yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan.
2. Adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 79 Tahun 2023 tentang pedoman Pelayanan Kebersihan Kota Medan.
4. Adanya pemantauan serta pengawasan terhadap perusahaan yang ada.
5. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan.
6. Tersedianya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) komunal yang memadai sehingga limbah domestik dan industri di Kota Medan dapat dikelola dengan baik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah melakukan :

- Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara (80,38) dan Indeks Kualitas Lahan (34,41) dan nilai Indeks Kualitas Air (62,78). Di samping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan di masa mendatang, beberapa hal yang harus dilakukan adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang Kepentingan Lainnya.

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembangunan untuk Masyarakat khususnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, baik pengetahuan maupun keterampilan.

3. Diskominfo Kabupaten Serang

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Diskominfo Kabupaten Serang mempunyai realisasi dari target sebesar 83,24 dari yang ditentukan sebesar 85 sehingga memperoleh capaian sebesar 98%.

Indikator Kinerja ini merupakan kegiatan yang belum mencapai 100% pada Diskominfo Kabupaten Serang, meskipun hampir semua capaian kinerja kegiatan telah terealisasi sesuai target.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfo Kabupaten Serang di masa mendatang, beberapa hal yang harus dilakukan adalah :

- Memelihara dan membuat inovasi tentang alur perangkat daerah agar mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dari mata ke mata sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang Kepentingan Lainnya.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembangunan untuk Masyarakat khususnya di lingkungan Diskominfo Kabupaten Serang.
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, baik pengetahuan maupun keterampilan.

4. Faktor Pendukung/Keberhasilan

Kegagalan berkebalikan dengan keberhasilan. Apa makna kegagalan? Jawaban paling sederhana adalah ketidakberhasilan. Tidak berhasil berarti pula tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Karena adanya target untuk dapat dipakai sebagai pengukur suatu keberhasilan.

Maka dari itu selalu ada kriteria-kriteria sebagai parameter guna menentukan, apakah suatu target telah tercapai atau belum tercapai.

Dari logika ini dapatlah ditarik suatu pengertian, kegagalan adalah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Itu berarti, ketiadaan target akan meniadakan pula kegagalan. Maksudnya, tidaklah dapat dinyatakan gagal tentang sesuatu bilamana tidak memiliki target yang diharapkan.

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama SKPD dibutuhkan Sumber Daya Manusia (sudah dibahas dalam Bab I), Dana Sarana dan Prasarana, dan lain-lain.

Sumber daya yang dijelaskan di sini adalah:

a. Sumber Daya Manusia (peningkatan indikator)

Dalam konteks Analisis Capaian Kinerja di Pemda DKI Jakarta, peningkatan indikator Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dihitung dari jumlah pegawai yang hadir, tetapi lebih kepada kualitas, kompetensi, dan produktivitas.

Indikator-indikator peningkatan SDM yang relevan :

1) Pengembangan Kompetensi (Capacity Building)

Ini adalah indikator paling umum yang menunjukkan bahwa aparatur terus berkembang.

- **Pemenuhan Jam Pelajaran (JP):**

Sesuai aturan, setiap PNS wajib memenuhi minimal 20 JP pengembangan kompetensi per tahun (melalui Diklat, Bimtek, Seminar, atau *E-Learning* di portal Jakarta Corporate University).

- **Sertifikasi Keahlian:**

Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi khusus (misal: Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Auditor, atau sertifikasi teknis lainnya).

- **Pendidikan Formal:**

Adanya pegawai yang menyelesaikan Tugas Belajar atau Izin Belajar untuk jenjang yang lebih tinggi (S2/S3).

2) Profesionalitas dan Integritas

Indikator ini mengukur sejauh mana SDM bekerja sesuai aturan dan nilai-nilai organisasi.

- **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN):**

Nilai yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

- **Tingkat Disiplin:**

Menurunnya angka pelanggaran kode etik atau sanksi disiplin di unit kerja Anda.

- **Implementasi Core Values (BerAKHLAK):**

Sejauh mana nilai-nilai "Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif" terinternalisasi dalam pekerjaan sehari-hari.

3) Kinerja dan Produktivitas

Peningkatan SDM juga terlihat dari hasil kerja nyata yang terekam dalam sistem.

- **Nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai):**

Meningkatnya rata-rata nilai capaian SKP di sebuah unit kerja.

- **Ketepatan Waktu (*Timeliness*):**

Kecepatan SDM dalam menyelesaikan tugas atau merespons aduan warga (misal melalui sistem CRM/JAKI).

- **Inovasi Perorangan/Tim:**

Jumlah inovasi atau perbaikan tata kelola (*problem solving*) yang diciptakan oleh pegawai untuk menyederhanakan layanan publik.

4) Manajerial dan Kepemimpinan (*Leadership*)

Khusus untuk level struktural atau yang memiliki fungsi koordinasi.

- **Efektivitas Delegasi:**

Kemampuan atasan dalam mendistribusikan beban kerja secara adil dan terukur.

- **Succession Plan (Rencana Suksesi):**

Kesiapan pegawai di level bawah untuk naik ke level berikutnya berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan.

Tabel 3.18. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025
Terhadap Sumber Daya Manusia

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,80	96,84	100,04	Keberhasilan : - Penilaian kualitas pelayanan administrasi lebih transparan, akuntabel, dan responsif. - Petugas secara konsisten menunjukkan empati kepada masyarakat yang berkunjung. - Memberikan pelayanan informasi yang benar. - Masyarakat mulai peduli dan bisa menentukan layanan seperti apa yang mereka inginkan. Kegagalan : - Status pelayanan nampaknya kurang mendapat perhatian serius, ditandai dengan proses pelayanan yang cenderung rumit dan memakan waktu. - Kualitas pelayanan bukan dari sudut pandang penyedia jasa tetapi dari sudut pandang pelanggan, karena pelangganlah yang menjadi konsumen dan mempersepsikan layanan yang diberikan serta mengevaluasi dan menentukan kualitas layanan.	- Sebagian besar lembaga pemerintah atau organisasi administrasi publik lainnya menyediakan layanan publik. - Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan masyarakat lebih baik. - Memantau dan mengendalikan program kerja. - Melakukan peninjauan kualitas secara berkala di kantor kecamatan penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat dan menetapkan standar. - Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. - Menyederhanakan proses administratif, responsif terhadap pernyataan masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. - Membuat sistem yang mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat, sehingga menjamin tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97,22	98,60	101,42	Keberhasilan : Terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2025. Keberhasilan : Terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2025. Kegagalan : - Hasil Kerja Petugas masih belum di rasa maksimal oleh masyarakat. - Prosedur layanan belum dibuatkan prosedur layanan terbaru dengan memangkas beberapa langkah pelayanan. - Persyaratan belum adanya keseragaman persyaratan pelayanan di kelurahan-kelurahan.	- Melakukan pembinaan kepada Kader Jumantik. - Sosialisasi Produk Layanan. Monitoring dan Evaluasi. - Berkoordinasi dengan Kelurahan dan pihak terkait. - Melakukan pembinaan kepada Kader Jumantik. - Sosialisasi Produk Layanan. Monitoring dan Evaluasi. - Berkoordinasi dengan Kelurahan dan pihak terkait. - Mempersiapkan peningkatan Sarana Pelayanan. - Membuat prosedur layanan terbaru dengan memanfaatkan teknologi digital. - Melakukan Pembinaan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan kinerja petugas. - inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Adm Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	96,38	95,07	98,64	- Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi. - Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah).	Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya.

b. Sumber Daya Anggaran (Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Inovasi yang mendukung)

Pemda DKI Jakarta, Sumber Daya Anggaran bukan sekadar "ada uang atau tidak", melainkan bagaimana uang tersebut dialokasikan secara cerdas melalui struktur APBD untuk mencapai target kinerja.

Dalam laporan analisis capaian, harus mampu menjelaskan bahwa anggaran tersebut berdaya guna karena melekat pada program dan inovasi yang tepat. Berikut adalah rinciannya:

1) Keselarasan dalam Struktur APBD

Anggaran dikatakan sebagai sumber daya pendukung jika alokasinya "bunyi" di dalam dokumen perencanaan. Anda bisa membaginya berdasarkan hierarki berikut:

- **Program:**
Kumpulan kegiatan yang memiliki tujuan strategis (misal: Program Penanggulangan Banjir). Keberhasilan dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran mampu menggerakkan indikator makro.
- **Kegiatan:**
Penjabaran dari program yang lebih spesifik (misal: Pembangunan Prasarana Drainase). Di sini, anggaran dinilai dari ketepatan waktu penyerapan (tidak menumpuk di akhir tahun).
- **Sub kegiatan:**
Unit terkecil dalam penganggaran (misal: Pemeliharaan Saluran Air di Kecamatan X). Fokusnya adalah efisiensi biaya—bagaimana anggaran seminim mungkin menghasilkan output semaksimal mungkin.

2) Pemanfaatan Anggaran untuk Inovasi

Sumber daya anggaran dianggap sebagai faktor keberhasilan jika digunakan untuk menciptakan cara kerja baru yang lebih efisien, seperti:

- **Digitalisasi Layanan:**
Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aplikasi atau integrasi sistem (misal: pengembangan fitur di JAKI atau e-Performance) yang memangkas biaya birokrasi manual.

- Automasi Proses:**
 Pengadaan alat atau sistem yang mengurangi ketergantungan pada tenaga manual dan mempercepat layanan publik.
- Optimalisasi Belanja (Efficiency Sharing):**
 Penggunaan anggaran untuk inovasi yang bisa digunakan bersama oleh beberapa unit kerja (kolaborasi anggaran), sehingga tidak terjadi pemborosan pada item yang sama.

3) Kualitas Belanja (*Spending Better*)

Dalam analisis kinerja, Anda perlu menyoroti bukan hanya berapa banyak yang habis, tapi bagaimana kualitasnya:

- Efisiensi Anggaran:**
 Keberhasilan mencapai target 100% namun dengan penyerapan hanya 90% karena adanya penghematan tanpa mengurangi kualitas (ini adalah poin plus dalam analisis).
- Reallocation (Pergeseran Anggaran):**
 Fleksibilitas dalam melakukan pergeseran anggaran (melalui mekanisme perubahan APBD/Parsial) untuk menangani kondisi darurat atau prioritas baru yang mendesak.
- Leverage (Daya Ungkit):**
 Bagaimana anggaran yang kecil mampu memicu partisipasi pihak lain (misal: anggaran sosialisasi yang memicu swadaya masyarakat atau CSR perusahaan).

Tabel 3.19. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Utara

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	REALISASI ANGGARAN	Pemakaian Anggaran harus sama dengan Anggaran yang telah disiapkan.	Anggaran yang terserap sebesar 93,71%	Anggaran tidak terserap dikarenakan beberapa hal antara lain: a. Untuk Belanja Pegawai Realisasi hanya 89,62% karena Kekosongan pejabat struktural hingga November 2025 dan anggaran kenaikan TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi tidak terserap. b. Efisiensi sisa anggaran sesuai kebutuhan.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan review tahunan.

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
				c. Sisa anggaran hasil negosiasi kegiatan Pengadaan Lift Blok R Kantor Walikota, Pengadaan Mebel Kantor Walikota, Kantor Lurah Sunter Jaya, Kantor Lurah Semper Barat dan Kantor Lurah Ancol. d. Sisa Anggaran Hasil Negosiasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Blok P, Rehab Gedung Kantor Lurah Semper Barat, Rehab Gedung Kantor Lurah Sunter Jaya. e. Belanja makan minum dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan. f. PMT Posyandu Balita dan Lansia tidak dilaksanakan di bulan Ramadhan. g. Honor Ke-13 Jumantik pada beberapa kelurahan tidak dibayarkan karena masih terdapat kasus DBD. h. Pembayaran Gaji PPSU/PJLP sesuai dengan rekapitulasi absensi dan jumlah eksisting PJLP (terdapat PJLP yang meninggal/ berhenti/ mengundurkan diri). i. Tidak terdapat bencana, atau penanganan oleh Dinas Sosial.	

Berikut ini adalah analisis korelasi antara Serapan Anggaran, Capaian Kinerja Sasaran, dan capaian kinerja program pada tahun berjalan lalu hasil evaluasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20. Korelasi Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Serapan Anggaran Tahun 2025

Sasaran	Program	Indikator	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian	Anggaran Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Serapan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK Dan FKDM)	4	4	100%	100%	427.857.627.094	422.567.799.433	98,76%	3 (tiga), yaitu: 1. Realisasi sasaran tercapai. 2. Realisasi Program tercapai. 3. Serapan Anggaran tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK Dan FKDM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Pengelolaan Kecamatan, namun serapan yang tidak maksimal karena Belanja makan minum dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien. 2. Target sasaran dan program kurang <i>challenging</i> .
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100%						

Sasaran	Program	Indikator	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian	Anggaran Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Serapan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	92,105	96,36	104,62%	100,00%	2.721.130.350	2.382.135.543	87,54%	3 (tiga), yaitu: 1. Realisasi sasaran tercapai. 2. Realisasi Program tercapai. 3. Serapan Anggaran tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Pengelolaan Kota Administrasi, namun serapan yang tidak maksimal karena adanya Efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien. 2. Target sasaran dan program kurang <i>challenging</i>.
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	93,14	96,55	103,66%						
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat	91,685	92,205	100,57%						

Sasaran	Program	Indikator	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian	Anggaran Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Serapan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, Dan RPTRA	4	4	100,00%	100,00%	103.686.582.899	100.795.405.769	97.21%	3 (tiga), yaitu: 1. Realisasi sasaran tercapai. 2. Realisasi Program tercapai. 3. Serapan Anggaran tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, Dan RPTRA secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, namun serapan yang tidak maksimal. dikarenakan Belanja makan minum dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan, Honor Ke-13 Jumantik pada beberapa kelurahan tidak dibayarkan karena masih terdapat kasus DBD, PMT Posyandu Balita dan Lansia tidak dilaksanakan di bulan Ramadhan. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien. 2. Target sasaran dan program kurang challenging.

Sasaran	Program	Indikator	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian	Anggaran Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Serapan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100,00%	100,00%	1.431.623.589	1.287.871.310	89,96%	3 (tiga), yaitu: 1. Realisasi sasaran tercapai. 2. Realisasi Program tercapai. 3. Serapan Anggaran tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, namun serapan yang tidak maksimal karena Belanja makan minum dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien. 2. Target sasaran dan program kurang <i>challenging</i> .

Sasaran	Program	Indikator	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian	Anggaran Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Serapan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Di Lingkungan Kota Administrasi Dalam Kondisi Baik	95	95,31	100,33%	100,00%	181.090.059.156	131.582.352.229	72,66%	3 (tiga), yaitu: 1. Realisasi sasaran tercapai. 2. Realisasi Program tercapai. 3. Serapan Anggaran tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Adm dalam Kondisi Baik dan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemda secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi. Namun serapan yang tidak maksimal karena Untuk Belanja Pegawai Realisasi hanya 89,62% karena Kekosongan pejabat struktural hingga November 2025 dan anggaran kenaikan TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi tidak terserap, Sisa Anggaran Hasil Negosiasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%						

Sasaran	Program	Indikator	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian	Anggaran Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Serapan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Blok P, Rehab Gedung Kantor Lurah Sukapura, Rehab Gedung Kantor Lurah Sunter Jaya, Sisa anggaran hasil negosiasi kegiatan Pengadaan Lift Blok R Kantor Walikota, Pengadaan Mebel Kantor Walikota, Kantor Lurah Sunter Jaya, Kantor Lurah Sukapura dan Kantor Lurah Ancol. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien. 2. Target sasaran dan program kurang <i>challenging</i>.

Sumber : Sistem Informasi Monev Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025 (Triwulan 4) (per Desember 2025), diolah

Berikut ini adalah analisis korelasi antara capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, capaian kinerja sub kegiatan, dan serapan anggaran pada semester II tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Serapan Anggaran Semester II (Triwulan 4) Tahun 2025

Kode	Uraian	Target Tahun an	Kinerja Indikator Program TW 4 Tahun 2025			Rata-Rata Capaian Program	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW 4 Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian TW 4					Target Keuangan TW 4	Realisasi Keuangan TW 4	Serapan Anggaran TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN													
	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK Dan FKDM)	4	4	4	100%	100%	N/A	N/A	427.857.627.094	427.857.627.094	422.567.799.433	98,76%	2 (dua), yaitu: 1. Capaian Indikator Program tercapai. 2. Rata-Rata Capaian Indikator Kegiatan tercapai. 3. Rata-Rata Capaian Indikator Sub Kegiatan tercapai. 4. Serapan Anggaran tidak tercapai.	Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK Dan FKDM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU secara umum memiliki kausalitas yg baik dgn Program Pengelolaan Kecamatan, namun serapan yg tidak maksimal karena Belanja makan minum dilaksana-kan sesuai kebutuhan kegiatan. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien 2. Target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan kurang menantang
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	4	100%									

Kode	Uraian	Target Tahun an	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian Program	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW 4 Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian TW 4					Target Keuangan TW 4	Realisasi Keuangan TW 4	Serapan Anggaran TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, Dan RPTRA	4	4	4	100%	100%	N/A	N/A	103.686.582.899	103.686.582.899	100.795.405.769	97.21%	2 (dua), yaitu: 1. Capaian Indikator Program tercapai. 2. Rata-Rata Capaian Indikator Kegiatan tercapai. 3. Rata-Rata Capaian Indikator Sub Kegiatan tercapai. 4. Serapan Anggaran tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, Dan RPTRA secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, namun serapan yang tidak maksimal. dikarenakan Belanja makan minum dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan, Honor Ke-13 Jumantik pada beberapa kelurahan tidak dibayarkan karena masih terdapat kasus DBD, PMT Posyandu Balita dan Lansia tidak dilaksanakan di bulan Ramadhan. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien 2. Target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan kurang menantang

Kode	Uraian	Target Tahun an	Kinerja Indikator Program TW 4 Tahun 2025			Rata-Rata Capaian Program	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW 4 Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian TW 4					Target Keuangan TW 4	Realisasi Keuangan TW 4	Serapan Anggaran TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI													
	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	92,105	92,105	96,36	104,62%	100%	100%	100%	2.721.130.350	2.721.130.350	2.382.135.543	87,54%	2 (dua), yaitu: 1. Capaian Indikator Program tercapai. 2. Rata-Rata Capaian Indikator Kegiatan tercapai. 3. Rata-Rata Capaian Indikator Sub Kegiatan tercapai. 4. Realisasi / Serapan Anggaran Program / Sub Kegiatan tidak tercapai.	Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Pengelolaan Kota Adm, namun serapan yang tidak maksimal karena adanya Efisiensi anggaran sesuai dgn arahan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien. 2. Target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan kurang menantang.
	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	93,14	93,14	96,55	103,66%									
	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat	92,105	91,685	92,20	100,57%									

Kode	Uraian	Target Tahun an	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian Program	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW 4 Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian TW 4					Target Keuangan TW 4	Realisasi Keuangan TW 4	Serapan Anggaran TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	4	100%	100%	N/A	N/A	1.431.623.589	1.431.623.589	1.287.871.310	89,96%	2 (dua), yaitu: 1. Capaian Indikator Program tercapai. 2. Rata-Rata Capaian Indikator Kegiatan tercapai. 3. Rata-Rata Capaian Indikator Sub Kegiatan tercapai. 4. Realisasi / Serapan Anggaran Program / Sub Kegiatan tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, namun serapan yang tidak maksimal karena Belanja makan minum dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien. 2. Target kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan kurang menantang.

Kode	Uraian	Target Tahun an	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian Program	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW 4 Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian *)	Sebab Ketidakselarasan **)
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian TW 4					Target Keuangan TW 4	Realisasi Keuangan TW 4	Serapan Anggaran TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
	Persentase Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Di Lingkungan Kota Administrasi Dalam Kondisi Baik	95	95	95	100%								2 (dua), yaitu: 1. Capaian Indikator Program tercapai. 2. Rata-Rata Capaian Indikator Kegiatan tercapai. 3. Rata-Rata Capaian Indikator Sub Kegiatan tercapai. 4. Realisasi / Serapan Anggaran Program / Sub Kegiatan tidak tercapai.	Kinerja dapat diasumsikan belum maksimal. Karena Sasaran meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal dengan Indikator Kinerja Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Adm dalam Kondisi Baik dan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemda secara umum memiliki kausalitas yang baik dengan Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi. Namun serapan yang tidak maksimal karena Untuk Belanja Pegawai Realisasi hanya 89,62% karena Kekosongan pejabat struktural hingga November 2025 dan anggaran kenaikan TPP
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100%	100%	100%	100%	393.184.530.678	393.184.530.678	343.392.284.132	87,34%		

Kode	Uraian	Target Tahun an	Kinerja Indikator Tahun 2025			Rata-Rata Capaian Program	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW 4 Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian TW 4					Target Keuangan TW 4	Realisasi Keuangan TW 4	Serapan Anggaran TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Beban Kerja dan TPP Prestasi tidak terserap, Sisa Anggaran Hasil Negosiasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Blok P, Rehab Gedung Kantor Lurah Sukapura, Rehab Gedung Kantor Lurah Sunter Jaya, Sisa anggaran hasil negosiasi kegiatan Pengadaan Lift Blok R Kantor Walikota, Pengadaan Mebel Kantor Walikota, Kantor Lurah Sunter Jaya, Kantor Lurah Sukapura dan Kantor Lurah Ancol. Hal ini mengindikasikan : 1. Perencanaan anggaran yang kurang baik / tidak efisien 2. Target kinerja program/ kegiatan sub kegiatan kurang menantang

Sumber : Sistem Informasi Monev Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025 (Triwulan 4) (per Desember 2025), diolah

c. Sumber Daya Sarana Prasarana (termasuk teknologi)

Dalam birokrasi Pemda DKI Jakarta yang modern, Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Sarpras) bukan lagi hanya soal gedung dan meja kerja. Saat ini, Sarpras mencakup seluruh aset fisik dan digital yang menjadi "alat tempur" Anda untuk memberikan layanan publik yang cepat dan akurat.

Berikut adalah klasifikasi Sarpras (termasuk teknologi) yang biasanya dicantumkan dalam Analisis Capaian Kinerja :

1) Sarana dan Prasarana Fisik (Aset Tetap)

Ini adalah fasilitas nyata yang mendukung pergerakan operasional di lapangan maupun di kantor.

- **Gedung dan Ruang Kerja:**

Ketersediaan kantor yang representatif, termasuk ruang pelayanan publik yang nyaman (misalnya standar PTSP).

- **Kendaraan Operasional:**

Mobil dinas, motor lapangan, atau kendaraan khusus (seperti truk sampah Dinas LH, ambulans Gawat Darurat, atau alat berat Dinas Sumber Daya Air).

- **Peralatan Teknis:**

Alat-alat laboratorium, kamera pengawas (CCTV) kota, sensor ketinggian air, hingga alat ukur kualitas udara.

2) Sarana Teknologi Informasi (Hard Assets)

DKI Jakarta sebagai *Smart City* sangat bergantung pada infrastruktur teknologi:

- **Perangkat Keras (Hardware):**

Laptop/PC dengan spesifikasi memadai, *server* daerah, dan perangkat jaringan (router/switch).

- **Jaringan Internet dan Wi-Fi:**

Ketersediaan koneksi internet cepat di kantor pemerintahan hingga layanan JakWIFI untuk masyarakat.

- **Infrastruktur Data:**

Pusat data (*Data Center*) yang menjamin keamanan dan integrasi data antar-SKPD.

3) Sistem Informasi dan Aplikasi (Soft Assets)

Ini adalah "nyawa" dari sarana teknologi di Jakarta. Keberadaan sistem ini sering kali menjadi faktor utama keberhasilan program:

- **Aplikasi Internal (G-to-G):**
e-Performance, e-Budgeting, e-Surat, dan TPP Online yang memastikan administrasi berjalan otomatis.
- **Aplikasi Layanan Publik (G-to-C):**
JAKI (Jakarta Kini) sebagai *super-apps*, sistem pendaftaran sekolah (PPDB online), dan perizinan melalui Jakarta Evolution (JakEvo).
- **Sistem Monitoring:**
Dashboard pimpinan yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat.

4) Inovasi Sarpras (Peralihan Ke Digital)

Dalam laporan kinerja, Anda bisa menonjolkan bagaimana peralihan sarana dari fisik ke digital menjadi faktor pendukung:

- **Paperless System:**
Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) yang menggantikan kebutuhan printer dan kertas, mempercepat proses administrasi dari hitungan hari menjadi menit.
- **Sistem Kerja Remote:**
Sarana pendukung *Work From Anywhere* (WFA) yang tetap menjaga produktivitas meskipun tidak di kantor.

5. Faktor Penghambat/Kendala

Dalam penyusunan Analisis Capaian Kinerja di Kota Administrasi Jakarta Utara, mengakui adanya hambatan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bentuk kejujuran intelektual dalam berorganisasi. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menjelaskan hambatan tersebut secara sistematis dan objektif.

Berikut adalah kategori faktor penghambat atau kendala yang umum terjadi dalam program/kegiatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara:

1) Kendala Teknis dan Operasional

Hambatan yang terjadi langsung di lapangan saat eksekusi.

- **Kondisi Alam/Cuaca:**

Misalnya, proyek fisik yang terhenti karena curah hujan tinggi atau banjir (sangat relevan untuk Suku Dinas SDA atau Bina Marga).

- **Kerusakan Sarana:**

Alat berat atau sistem aplikasi yang mengalami gangguan (*downtime*) pada saat-saat krusial.

- **Lahan dan Lokasi:**

Kendala pembebasan lahan atau sengketa lokasi yang sering kali menghambat proyek strategis daerah.

2) **Kendala Administratif dan Regulasi**

Hambatan yang bersifat prosedural atau berkaitan dengan aturan main.

- **Perubahan Kebijakan:**

Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat (Kementerian) atau revisi Keputusan Gubernur/Pergub yang mengharuskan penyesuaian ulang administrasi.

- **Proses Pengadaan (PBJ):**

Keterlambatan dalam proses lelang, gagal lelang, atau penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak (wanprestasi).

- **Sinkronisasi Aturan:**

Adanya benturan aturan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya yang mengakibatkan keraguan dalam eksekusi anggaran.

3) **Kendala Sumber Daya (Resource Gap)**

Kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan.

- **Kekurangan SDM:**

Jumlah personil yang terbatas dibandingkan volume pekerjaan yang sangat besar, atau kurangnya tenaga ahli dengan sertifikasi tertentu.

- **Keterbatasan Anggaran:**

Adanya efisiensi anggaran di tengah jalan (rasionalisasi) atau pergeseran prioritas pendanaan untuk kebutuhan mendesak lainnya (misal: penanganan wabah atau bencana).

- **Keterlambatan Pencairan:**

Kendala pada proses verifikasi dokumen yang menyebabkan aliran kas (*cash flow*) kegiatan terhambat.

4) Kendala Eksternal (Sosial-Masyarakat)

Hambatan yang datang dari luar birokrasi.

- **Resistensi Masyarakat:**

Penolakan dari warga atau kelompok tertentu terhadap suatu kebijakan/proyek (misalnya pembangunan TPS Terpadu atau penataan PKL).

- **Koordinasi Lintas Sektoral:**

Lambatnya respons dari instansi eksternal (Kementerian, BUMN, atau swasta) yang terlibat dalam program kolaborasi.

- **Kondisi Ekonomi:**

Inflasi atau kenaikan harga material yang signifikan sehingga harga satuan di DPA tidak lagi relevan dengan harga pasar.

C. Rencana Aksi Ke depan dalam menghadapi kendala/ meningkatkan Capaian IKU

Rencana Aksi ke Depan adalah bagian paling krusial dalam laporan kinerja. Di sini menunjukkan peran sebagai ASN yang solutif dan proaktif, bukan sekadar pelaksana tugas. Rencana aksi ini harus dirancang untuk memitigasi kendala yang sudah terjadi atau untuk melompat lebih tinggi demi mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut adalah kerangka Rencana Aksi yang sistematis dan lazim digunakan di lingkungan Pemda DKI Jakarta :

1) Strategi Perbaikan (Jika Capaian Belum Maksimal)

Jika ada kendala yang menghambat IKU, rencana aksinya harus fokus pada penyelesaian masalah:

- **Akselerasi Jadwal (*Catch-up Plan*):**

Menyusun ulang jadwal kegiatan yang tertunda dengan menambah intensitas kerja atau sumber daya pada periode berikutnya.

- **Penyederhanaan Prosedur (*Business Process Re-engineering*):**

Memangkas birokrasi yang berbelit atau beralih sepenuhnya ke sistem digital (TTE/e-office) agar proses lebih cepat.

- **Koordinasi Intensif (*Desk Coordination*):**

Mengadakan rapat koordinasi rutin antar-SKPD atau dengan pihak eksternal untuk menyelesaikan hambatan yang bersifat lintas sektoral.

2) Strategi Peningkatan (Jika Capaian Sudah Baik)

Jika target sudah tercapai, rencana aksinya adalah tentang keberlanjutan dan inovasi:

- **Scale-up Inovasi:**

Mengembangkan cakupan inovasi yang sudah berhasil ke wilayah atau bidang lain (misal: aplikasi yang sukses di satu kecamatan diterapkan di seluruh wilayah kota).

- **Peningkatan Kualitas Layanan:**

Jika target kuantitas (jumlah) sudah tercapai, fokus dialihkan ke target kualitas (kepuasan masyarakat).

- **Benchmarking:**

Melakukan studi komparatif ke daerah atau instansi lain yang memiliki kinerja lebih baik untuk mengadopsi praktik terbaik (*best practices*).

3) Strategi Penguatan Sumber Daya

Rencana aksi yang menyasar internal organisasi:

- **Peningkatan Kapasitas SDM:**

Mengusulkan pelatihan, *coaching*, atau *mentoring* spesifik (melalui Jakarta Corporate University) untuk menutupi celah kompetensi yang menjadi penghambat.

- **Digitalisasi Berkelanjutan:**

Melakukan *update* atau integrasi sistem informasi untuk meminimalisir kesalahan manusia (*human error*).

- **Mitigasi Risiko:**

Menyusun dokumen manajemen risiko agar jika kendala serupa terjadi di masa depan, langkah antisipasinya sudah tersedia.

Berikut adalah analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.22. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN STRATEGIS							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (unsur Kecamatan)	100,04%	-			
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	100,04%	-			
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	101,42%	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	INDEKS KEPUASAN TERHADAP PENGELOLAAN KELURAHAN (PENYELENGGARAAN RT, RW, LMK DAN FKDM)	100%	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan dalam Program Pengelolaan Kecamatan menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
					INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PPSU		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU dalam Program Pengelolaan Kecamatan menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PKK, POSYANDU, JUMANTIK, DAN RPTRA	100%	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KETERTIBAN UMUM	100%	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum dalam Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	104,42%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI DALAM KONDISI BAIK	100%	Persentase Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Di Lingkungan Kota Administrasi Dalam Kondisi Baik dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
					INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	NILAI EFEKTIVITAS KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN	102,99%	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
					NILAI EFEKTIVITAS KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
					NILAI EFEKTIVITAS KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2025

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Utara dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan antara lain :

1. Tersampainya tujuan dan sasaran organisasi, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Kelurahan.
2. Disediaknya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dibuktikan dengan adanya Anggaran yang mencukupi untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut.
3. Diberikannya *reward* dan *punishment* terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja, Reward diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan bagi Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil mencapai target Kinerjanya, *Punishment* berupa surat peringatan terhadap yang tidak berhasil mencapai target kinerjanya.
4. Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang realisasinya jauh di atas target yang ditetapkan.
5. Faktor pendukung keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Utara salah satunya adalah inovasi yang semakin memudahkan dalam mendapatkan layanan Administrasi.

KEBERHASILAN

Dianggap berhasil jika kegiatan telah dilaksanakan dan tercapai sesuai target 100%.

Untuk mencapai suatu keberhasilan seharusnya membutuhkan manajemen, atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tersebut tercapai.

Manajemen yang memiliki target sasaran menjadi sangat *urgen*, itu berarti kemampuan di bidang manajemen tidak dapat lagi dipandang sebagai kebutuhan nomor dua, lebih dari itu ketrampilan ini justru menempati *prioritas* utama bagi setiap yang ingin berhasil. Singkatnya, dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak terpenuhinya tiga hal tersebut, dapat dipastikan bakal mengakibatkan kegagalan.

Keberhasilan yang terjadi dalam kinerja disebabkan :

- a. Adanya sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang dibangun dalam memberikan pelayanan sangatlah mudah dan tidak butuh waktu lama dalam menindaklanjuti setiap warga yang membutuhkan pelayanan.
- b. Adanya pemahaman masyarakat dalam prosedur permohonan setiap pelayanan di Kantor Kelurahan, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan.
- c. Cepat tanggapnya pemerintah dalam merespons pengaduan.
- d. Pemerintah pada saat melakukan penertiban selalu dengan pendekatan persuasif.
- e. Adanya kerja sama semua pihak seluruh unsur aparaturnya Kelurahan yaitu Lurah, ASN, PJLP, RT, RW dan perangkat wilayah lain.
- f. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apa yang dikerjakan para petugas dirasa sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
- g. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.
- h. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, sudah adanya penetapan zonasi bekerja.
- i. Adanya pelayanan gratis, tidak ada pungutan selama menjalankan pelayanan.
- j. Telah dilakukan pembinaan secara rutin, dan setiap pagi sore melakukan patroli rutin.
- k. Masyarakat yang melanggar mendapatkan penjelasan yang baik dari pemerintah sehingga paham dan bersedia diberikan sanksi.

KEGAGALAN/HAMBATAN

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kalimat tersebut sering muncul untuk membangkitkan semangat seseorang dalam berusaha dan diharapkan dapat bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Kegagalan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan.

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, jika mampu terus berusaha memperbaiki kinerja selama pencapaian target, maka kesuksesan akan dicapai. Selain itu, perlu diingat bahwa proses dalam pencapaian kesuksesan ini akan memberikan dampak pada hasil yang diperoleh nantinya. Sehingga harus dilakukan proses satu persatu dengan baik, memperbaikinya jika ada yang salah, dan terus bersabar.

Dengan begitu akan bangkit dari kegagalan dan siap meraih kesuksesan.

[Kegagalan yang terjadi dalam kinerja biasanya disebabkan :](#)

- a. Kurangnya kerja sama antara aparaturnya Kelurahan yaitu Lurah, ASN, PJLP, RT, RW dan perangkat wilayah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
- b. Kurangnya koordinasi baik dari warga masyarakat dengan petugas maupun dari aparaturnya.
- c. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya jumlah Petugas, untuk menangani Sarana Prasarana.
- d. Petugas kurang melayani masyarakat dengan baik, sikap petugas yang terkadang kurang sopan dan ramah di mana merupakan keharusan dalam standar pelayanan kelurahan.
- e. Petugas kurang cekatan, kurang sigap dan kurang peka dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Tindak lanjutnya tidak langsung dilaksanakan oleh petugas pelayanan.
- g. Minimnya evaluasi, pembinaan dan pelatihan.
- h. Kondisi lingkungan Kelurahan yang berbeda dengan Kelurahan lain, butuh penanganan lebih sehingga memakan waktu lebih lama.
- i. Penanganan sarana di wilayah yang sangat luas untuk mencapai kegiatan di wilayah perlu waktu yang maksimal.

- j. Petugas tidak selalu bisa bertemu dengan warga yang mengadu.
- k. Padatnya lingkungan warga mengakibatkan petugas kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- l. Kurangnya pengetahuan warga tentang sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan pelayanan sehingga persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dianggap sulit.
- m. Kesadaran warga yang masih kurang terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah mereka.
- n. Masyarakat kurang puas karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan kurang cepat.
- o. Masih adanya ketidakpuasan dari hasil tindak lanjut petugas.

SOLUSI MENGATASI KEGAGALAN :

Ada beberapa opsi atau langkah dalam mengatasi kegagalan untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan Anggaran tahun yang akan datang, seharusnya berpedoman awal pada serapan kebutuhan anggaran tahun ini.
- b. Perlu dilakukan antisipasi kebutuhan baik yang diperlukan dan yang tidak diperlukan sehingga perkiraan serapan tidak terlalu jauh dengan realisasi anggaran.
- c. Seluruh UKPD/SKPD wajib memperhatikan setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak terlewat dan penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan.
- d. Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan.
- e. Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
- f. Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas serta penilaian kinerja.
- g. Harus berkoordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Dalam birokrasi Pemda DKI Jakarta, Realisasi Anggaran Perangkat Daerah adalah cermin dari pelaksanaan kerja. Secara teknis, ini adalah jumlah uang rakyat (APBD) yang telah secara nyata dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu SKPD (Dinas, Badan, Biro, Camat, atau Lurah) dalam kurun waktu tertentu.

Berikut adalah penjelasan mengenai komponen anggaran :

1) Komponen Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran bukan hanya soal angka yang keluar dari kas daerah, tetapi mencakup dua aspek:

- **Realisasi Keuangan:**
Jumlah rupiah yang sudah dibayarkan (biasanya melalui mekanisme SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana). Ini diukur dalam satuan mata uang (Rp).
- **Realisasi Fisik:**
Progres kemajuan pekerjaan di lapangan (misalnya: pembangunan gedung sudah 50%, atau pengadaan laptop sudah diterima 100 unit).

Idealnya angka realisasi keuangan harus selaras dengan realisasi fisik. Jika keuangan tinggi tapi fisik rendah, itu bisa menjadi temuan.

2) Cara Mengukur Keberhasilan (Persentase)

Realisasi anggaran dihitung dengan membandingkan Realisasi terhadap Pagu Anggaran (DPA).

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

- **Pagu:** Anggaran maksimal yang boleh dibelanjakan.
- **Realisasi:** Anggaran yang benar-benar terserap.

3) Tahapan Realisasi di DKI Jakarta

Sebagai PNS DKI, tentu akrab dengan alur ini dalam sistem e-Budgeting dan e-SOP:

1. Komitmen:

Pembuatan kontrak dengan pihak ketiga atau penetapan pelaksana kegiatan.

2. Penerimaan Barang/Jasa:

Pekerjaan selesai dan diperiksa (BAST).

3. Pembayaran:

Pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) hingga terbit SP2D. Anggaran baru dianggap "Terealisasi" secara akuntansi setelah uang cair.

4) Mengapa Realisasi Anggaran Sangat Penting?

Realisasi anggaran adalah indikator vital karena:

- **Indikator Kinerja:**

Menjadi salah satu syarat pencairan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan penilaian kinerja pimpinan.

- **Efek Ekonomi:**

Anggaran yang terserap berarti uang berputar di masyarakat Jakarta, yang membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

- **Efisiensi:**

Jika realisasi 100% dengan hasil maksimal, artinya perencanaan Anda sangat akurat. Namun, jika ada sisa anggaran (Silpa) yang terlalu besar tanpa alasan jelas, maka perencanaan dianggap kurang baik.

1. Pagu Anggaran

Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebesar **93,71%** dari target 100% dengan nominal yaitu Rp 870.425.496.187- dari total anggaran **Rp 928.881.494.610**. Pembiayaan tersebut meliputi 5 (lima) program yang dilaksanakan pada tahun 2025 pada lingkup Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.23. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	1.431.623.589	1.287.871.310	89,96
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	103.686.582.899	100.795.405.769	97.21
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	* Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) * Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	427.857.627.094	422.567.799.433	98,76
4	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Pengoordinasian, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi yang Optimal	2.721.130.350	2.382.135.543	87,54
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	* Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat * Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	393.184.530.678	343.392.284.132	87,34
Total			928.881.494.610	870.425.496.187	93,71

Sumber : *monev2025.bapedadki.net*, 2025

2. Capaian Keuangan

Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 mengalami perubahan pada fase APBD perubahan sehingga postur pagu anggaran awal, anggaran perubahan, dan realisasi program menjadi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24. Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.783.626.864	1.431.623.589	1.287.871.310	89,96
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.127.953.273	103.686.582.899	100.795.405.769	97,21
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	423.836.009.943	427.857.627.094	422.567.799.433	98,76
4	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	3.212.415.994	2.721.130.350	2.382.135.543	87,54
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	385.384.114.517	393.184.530.678	343.392.284.132	87,34
Total		918.344.120.591	928.881.494.610	870.425.496.187	93,71

3. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025 dari Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025 adalah :

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025
(Januari s.d Desember 2025)

No	UKPD	Anggaran Perubahan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Terhadap Target	% Realisasi Terhadap APBD
1	Kota Administrasi Jakarta Utara	354.588.549.727	354.588.549.727	309,398,588,180	87.26%	87.26%
2	Kecamatan Cilincing	2.037.285.899	2.037.285.899	1,913,734,224	93.94%	93.94%
3	Kelurahan Cilincing	14.105.060.669	14.105.060.669	13,791,376,672	97.78%	97.78%
4	Kelurahan Kalibaru	15.390.089.714	15.390.089.714	14,837,751,238	96.41%	96.41%
5	Kelurahan Marunda	17.916.536.255	17.916.536.255	17,515,092,922	97.76%	97.76%
6	Kelurahan Rorotan	18.621.405.732	18.621.405.732	18,156,776,604	97.50%	97.50%
7	Kelurahan Semper Barat	24.852.873.330	24.852.873.330	24,453,778,224	98.39%	98.39%
8	Kelurahan Semper Timur	13.977.234.877	13.977.234.877	13,543,672,569	96.90%	96.90%
9	Kelurahan Sukapura	15.890.826.801	15.890.826.801	15,443,563,756	97.19%	97.19%
10	Kecamatan Kelapa Gading	2.025.590.206	2.025.590.206	1,919,536,522	94.76%	94.76%
11	Kelurahan Kelapa Gading Barat	23.620.287.801	23.620.287.801	22,894,881,389	96.93%	96.93%
12	Kelurahan Kelapa Gading Timur	24.379.058.865	24.379.058.865	23,917,691,828	98.11%	98.11%
13	Kelurahan Pegangsaan Dua	28.911.475.557	28.911.475.557	28,535,359,038	98.70%	98.70%
14	Kecamatan Koja	2.171.620.874	2.171.620.874	2,006,510,272	92.40%	92.40%
15	Kelurahan Koja	14.396.622.832	14.396.622.832	13,966,889,255	97.02%	97.02%
16	Kelurahan Lagoa	17.794.664.153	17.794.664.153	17,394,478,082	97.75%	97.75%
17	Kelurahan Rawa Badak Selatan	11.661.580.291	11.661.580.291	11,468,386,101	98.34%	98.34%

No	UKPD	Anggaran Perubahan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Terhadap Target	% Realisasi Terhadap APBD
18	Kelurahan Rawa Badak Utara	15.226.714.443	15.226.714.443	14,763,687,729	96.96%	96.96%
19	Kelurahan Tugu Selatan	11.398.656.762	11.398.656.762	11,153,865,914	97.85%	97.85%
20	Kelurahan Tugu Utara	21.147.462.447	21.147.462.447	20,615,763,718	97.49%	97.49%
21	Kecamatan Pademangan	1.806.503.093	1.806.503.093	1,770,666,829	98.02%	98.02%
22	Kelurahan Ancol	13.260.129.987	13.260.129.987	12,703,832,356	95.80%	95.80%
23	Kelurahan Pademangan Barat	19.294.586.117	19.294.586.117	18,828,668,805	97.59%	97.59%
24	Kelurahan Pademangan Timur	15.195.922.080	15.195.922.080	14,874,081,419	97.88%	97.88%
25	Kecamatan Penjaringan	2.579.077.347	2.579.077.347	2,488,990,765	96.51%	96.51%
26	Kelurahan Kamal Muara	11.131.691.790	11.131.691.790	10,696,187,119	96.09%	96.09%
27	Kelurahan Kapuk Muara	13.505.784.150	13.505.784.150	13,250,574,817	98.11%	98.11%
28	Kelurahan Pejagalan	19.768,301.021	19.768,301.021	19,374,867,597	98.01%	98.01%
29	Kelurahan Penjaringan	23.138.810.138	23.138.810.138	22,895,863,261	98.95%	98.95%
30	Kelurahan Pluit	24.365.171.012	24.365.171.012	24,005,266,304	98.52%	98.52%
31	Kecamatan Tanjung Priok	2.412.247.350	2.412.247.350	2,328,905,628	96.55%	96.55%
32	Kelurahan Kebon Bawang	18.740.564.915	18.740.564.915	18,493,147,237	98.68%	98.68%
33	Kelurahan Papanggo	17.018.732.331	17.018.732.331	16,553,359,537	97.27%	97.27%
34	Kelurahan Sungai Bambu	13.918.157.535	13.918.157.535	13,726,953,657	98.63%	98.63%
35	Kelurahan Sunter Agung	26.620.461.731	26.620.461.731	25,973,732,899	97.57%	97.57%
36	Kelurahan Sunter Jaya	23.842.011.125	23.842.011.125	23,255,016,720	97.54%	97.54%
37	Kelurahan Tanjung Priok	17.081.821.331	17.081.821.331	16,676,200,880	97.63%	97.63%

No	UKPD	Anggaran Perubahan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Terhadap Target	% Realisasi Terhadap APBD
38	Kelurahan Warakas	15.087.924.322	15.087.924.322	14,837,796,120	98.34%	98.34%
	TOTAL	928.881.494.610	928.881.494.610	870,425,496,187	93.71%	93.71%

Sumber : *monev2025.bapedadki.net*

Berdasarkan Tabel 3.24 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pada SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 93,71%. Kelurahan Penjaringan memiliki tingkat realisasi anggaran tertinggi dari seluruh UKPD yakni 98,95%.

Realisasi Anggaran Belanja Per-UKPD Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 adalah :

Tabel 3.26. Realisasi Anggaran Belanja Per-UKPD Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Belanja			
		APBD Perubahan (Rp)	SPS	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Kota Administrasi Jakarta Utara	354.588.549.727	354.588.549.727	309,398,588,180	87.26%
2	Kecamatan Cilincing	2.037.285.899	2.037.285.899	1,913,734,224	93.94%
3	Kelurahan Cilincing	14.105.060.669	14.105.060.669	13,791,376,672	97.78%
4	Kelurahan Kalibaru	15.390.089.714	15.390.089.714	14,837,751,238	96.41%
5	Kelurahan Marunda	17.916.536.255	17.916.536.255	17,515,092,922	97.76%
6	Kelurahan Rorotan	18.621.405.732	18.621.405.732	18,156,776,604	97.50%
7	Kelurahan Semper Barat	24.852.873.330	24.852.873.330	24,453,778,224	98.39%
8	Kelurahan Semper Timur	13.977.234.877	13.977.234.877	13,543,672,569	96.90%
9	Kelurahan Sukapura	15.890.826.801	15.890.826.801	15,443,563,756	97.19%

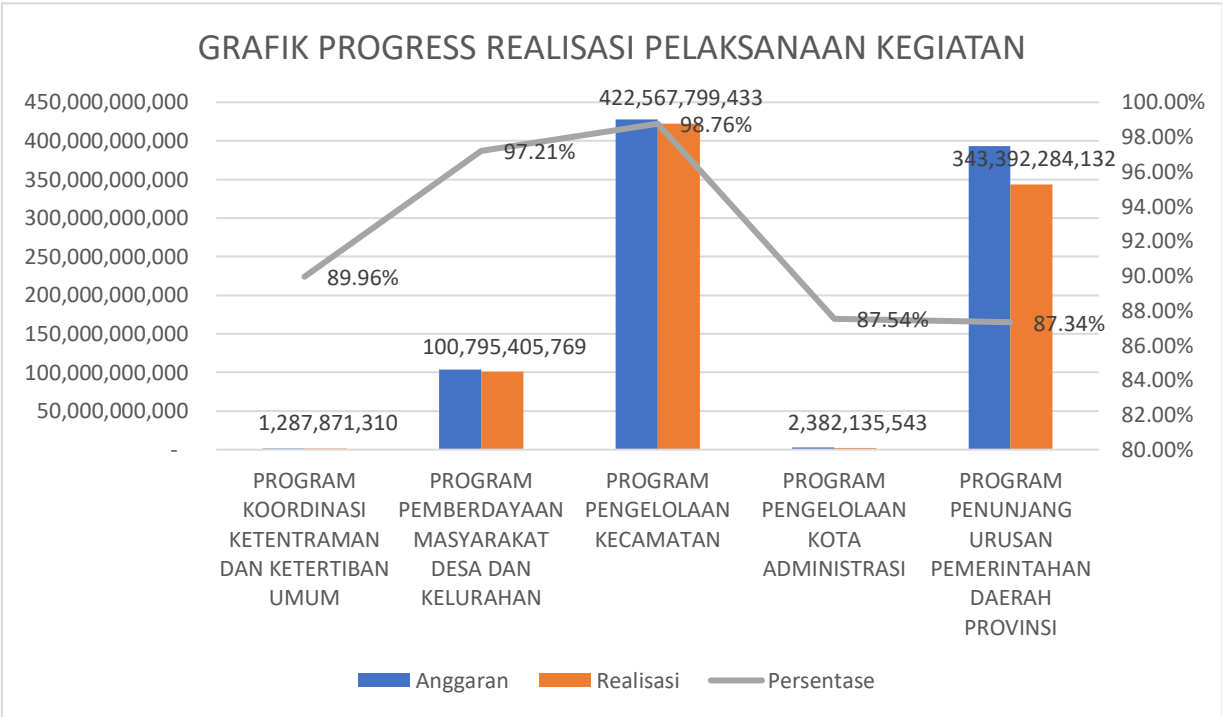
No	SKPD	Belanja			
		APBD Perubahan (Rp)	SPS	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
10	Kecamatan Kelapa Gading	2.025.590.206	2.025.590.206	1,919,536,522	94.76%
11	Kelurahan Kelapa Gading Barat	23.620.287.801	23.620.287.801	22,894,881,389	96.93%
12	Kelurahan Kelapa Gading Timur	24.379.058.865	24.379.058.865	23,917,691,828	98.11%
13	Kelurahan Pegangsaan Dua	28.911.475.557	28.911.475.557	28,535,359,038	98.70%
14	Kecamatan Koja	2.171.620.874	2.171.620.874	2,006,510,272	92.40%
15	Kelurahan Koja	14.396.622.832	14.396.622.832	13,966,889,255	97.02%
16	Kelurahan Lagoa	17.794.664.153	17.794.664.153	17,394,478,082	97.75%
17	Kelurahan Rawa Badak Selatan	11.661.580.291	11.661.580.291	11,468,386,101	98.34%
18	Kelurahan Rawa Badak Utara	15.226.714.443	15.226.714.443	14,763,687,729	96.96%
19	Kelurahan Tugu Selatan	11.398.656.762	11.398.656.762	11,153,865,914	97.85%
20	Kelurahan Tugu Utara	21.147.462.447	21.147.462.447	20,615,763,718	97.49%
21	Kecamatan Pademangan	1.806.503.093	1.806.503.093	1,770,666,829	98.02%
22	Kelurahan Ancol	13.260.129.987	13.260.129.987	12,703,832,356	95.80%
23	Kelurahan Pademangan Barat	19.294.586.117	19.294.586.117	18,828,668,805	97.59%
24	Kelurahan Pademangan Timur	15.195.922.080	15.195.922.080	14,874,081,419	97.88%
25	Kecamatan Penjaringan	2.579.077.347	2.579.077.347	2,488,990,765	96.51%
26	Kelurahan Kamal Muara	11.131.691.790	11.131.691.790	10,696,187,119	96.09%
27	Kelurahan Kapuk Muara	13.505.784.150	13.505.784.150	13,250,574,817	98.11%
28	Kelurahan Pejagalan	19.768,301.021	19.768,301.021	19,374,867,597	98.01%

No	SKPD	Belanja			
		APBD Perubahan (Rp)	SPS	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
29	Kelurahan Penjaringan	23.138.810.138	23.138.810.138	22,895,863,261	98.95%
30	Kelurahan Pluit	24.365.171.012	24.365.171.012	24,005,266,304	98.52%
31	Kecamatan Tanjung Priok	2.412.247.350	2.412.247.350	2,328,905,628	96.55%
32	Kelurahan Kebon Bawang	18.740.564.915	18.740.564.915	18,493,147,237	98.68%
33	Kelurahan Papanggo	17.018.732.331	17.018.732.331	16,553,359,537	97.27%
34	Kelurahan Sungai Bambu	13.918.157.535	13.918.157.535	13,726,953,657	98.63%
35	Kelurahan Sunter Agung	26.620.461.731	26.620.461.731	25,973,732,899	97.57%
36	Kelurahan Sunter Jaya	23.842.011.125	23.842.011.125	23,255,016,720	97.54%
37	Kelurahan Tanjung Priok	17.081.821.331	17.081.821.331	16,676,200,880	97.63%
38	Kelurahan Warakas	15.087.924.322	15.087.924.322	14,837,796,120	98.34%
TOTAL		928.881.494.610	928.881.494.610		

Sumber : monev.bapedadki.net

Berdasarkan Tabel 3.26 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dari Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dapat dibuatkan grafiknya, yaitu :

Gambar 3.1. Grafik Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara s.d Bulan Desember Tahun 2025



Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

4. Program Anggaran

Berdasarkan data proyeksi APBD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/anggaran pada tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki 5 (lima) program kegiatan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat dan meningkatnya kualitas layanan publik dan hasil pembangunan yang optimal. Kelima program tersebut meliputi: Program Koordinasi Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pengelolaan Kota Administrasi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Administrasi Jakarta Utara untuk kelima program tersebut sebesar Rp 928.881.494.610,-.

Sedangkan anggaran khusus untuk Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp 354.588.549.727,-. Pemanfaatan anggaran secara efektif dapat dilaporkan secara rinci dalam tabel berikut disertai dengan indikator keberhasilan kinerja masing-masing program :

Tabel 3.27. Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	1.431.623.589	1.287.871.310	89,96
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	103.686.582.899	100.795.405.769	97.21
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	* Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) * Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	427.857.627.094	422.567.799.433	98,76
4	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Pengoordinasian, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi yang Optimal	2.721.130.350	2.382.135.543	87,54
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	* Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat * Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	393.184.530.678	343.392.284.132	87,34
Total			928.881.494.610	870.425.496.187	93,71

Sumber : *monev2025.bapedadki.net*, 2025

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian tertinggi yaitu 98,76% pada program pengelolaan kecamatan. Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan program yaitu indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (meliputi penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU. Sedangkan persentase capaian terendah yaitu 87,34% pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator nilai efektivitas koordinasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat serta persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik. Adapun anggaran tersebut diperuntukkan bagi 5 (lima) program di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp.1.431.623.589,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.287.871.310,- sehingga capaian sebesar 89,86%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp.103.686.582.899,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.795.405.769,- sehingga capaian sebesar 97,21%.
3. Program Pengelolaan Kecamatan mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp.427.857.627.094,- dengan realisasi sebesar Rp. 422.567.799.433,- sehingga capaian sebesar 98,76%.
4. Program Pengelolaan Kota Administrasi mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp.2.721.130.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.382.135.543,- sehingga capaian sebesar 87,54%.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp.393.184.530.678,- dengan realisasi sebesar Rp. 343.392.284.132,- sehingga capaian sebesar 87,34%.

Anggaran untuk Sekretariat Kota Adm Jakarta Utara sebesar Rp.354.588.549.727,- dengan realisasi sebesar 309.398.588.180,- sehingga memperoleh capaian 87,26%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Kota Administrasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Detail Sub Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.28. Rekapitulasi Anggaran Tahun Anggaran 2025
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi		2.721.130.350	2,382,135,543	87,54
			Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	27.300.000	27.300.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	1.350.000	1.350.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	11.943.366	11,940,000	99,97
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	900.000	900.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	6.750.000	6.750.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	6.750.000	6.750.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	2.013.206	1.206.000	59,50
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	7.800.000	7.800.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	3.780.000	3.780.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	37.800.000	37.800.000	100
			Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	9.620.000	9.620.000	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	14.625.000	14.300.000	97,78
			Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	120.738.000	120.000.000	99,39
			Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	14.625.000	14.625.000	100
			Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	107.250.000	107.250.000	100
			Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	20.471.000	20.471.000	100
			Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	95.550.321	70.144.000	73,41
			Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	2.322.000	2.322.000	100
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	1.350.000	1.350.000	100
			Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	19.582.244	19.580.000	99,99
			Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	20.063.854	20.056.000	99,96
			Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	60.168.000	56.718.000	94,27
			Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	1.494.000	1.494.000	100
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	36.975.000	36.975.000	100
			Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	13.285.000	13.123.000	98,78
			Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	620.735.452	620.354.813	99,94
			Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	659.213.635	541.664.730	82,17
			Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	517.157.440	342.690.000	66,26
			Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	2.592.000	2.490.000	96,06
			Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	6.985.708	6.939.000	99,33

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	2.993.976	2.985.000	99,70
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	266.946.148	251.408.000	94,18
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			351.867.419.377	307.016.452.637	87,25
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		676.165.168	591.560.625	87,49
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	676.165.168	591.560.625	87,49
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		212.716.261.878	190.635.838.347	89,62
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.250.000	6.250.000	100
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	212.710.011.878	190.629.588.347	89,62
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.494.665.494	2.199.533.786	88,17
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.935.000	23.380.000	90,15
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.355.000	4.355.000	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	423.993.687	285.210.450	67,27
			Penyediaan Bahan/Material	415.129.697	415.129.697	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.916.245	93.301.050	93,38
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	298.639.357	268.398.000	89,87
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.149.218.988	1.033.279.265	89,91
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.717.520	56.720.324	98,27
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.760.000	19.760.000	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.287.313.557	36.689.595.457	84,76

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan Mebel	90.563.083	90.176.400	99,57
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.149.408.538	970.309.114	84,42
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.609.722.299	30.821.890.419	86,55
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.296.890.883	3.711.778.950	70,07
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	442.890.057	402.141.900	90,80
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	697.836.697	693.298.674	99,35
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60.732.774.723	48.249.973.749	79,45
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.980.648.477	27.008.732.859	81,89
			Pengadaan Mebel	4.615.119.639	4.412.801.670	95,62
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.670.993.834	3.557.341.570	53,33
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.466.012.773	13.271.097.650	80,60
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.960.238.557	28.649.950.673	89,64
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.662.702.936	11.470.770.755	83,96
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.917.553.624	16.801.179.918	93,77
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	379.981.997	378.000.000	99,48
Total				354.588.549.727	309.398.588.180	87,26

Sumber : Data e-monev diolah oleh Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko
Jakarta Utara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 (enam) kegiatan pada 2 (dua) program, 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan pada program pengelolaan Kota Administrasi, 25 (dua puluh lima) sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Dengan demikian anggaran sebesar Rp 354.588.549.727 digunakan secara efisien untuk 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan yang ada di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.

Persentase capaian 40 (empat puluh) sub kegiatan yang ada di Sekretariat Kota Administrasi tidak mencapai 100%, dengan persentase terendah pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya (53,33%) dengan unit kerja pengampu/penanggung jawab sub kegiatan adalah Bagian Umum dan Protokol. Urutan kedua terendah yaitu sub kegiatan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan (59,50%) dengan unit kerja pengampu/penanggung jawab yaitu Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja periode Januari sampai dengan Desember 2025 ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : (dari segi anggaran)

1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Kota Administrasi Jakarta Utara (Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan) yang berhasil diserap pada tahun 2025 sebesar 93,71 % dari target penyerapan sebesar 100%.
2. Adapun penyebab ketidaksempurnaan persentase penyerapan dikarenakan:
 - a. Terdapat kekosongan jabatan struktural dan fungsional dikarenakan adanya PNS yang meninggal dan pensiun, dan belum terisi hingga November 2025 sehingga mempengaruhi besaran listing Gaji, TPP Beban Kerja, TPP Prestasi dan Tunjangan PPh. Selain itu Anggaran kenaikan TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Tidak Terserap.
 - b. Efisiensi sisa anggaran sesuai kebutuhan.

- c. Hasil Negosiasi Kontrak untuk Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Blok P Walikota, Rehab Total Gedung Kantor Lurah Sunter Jaya, Rehab Total Kantor Lurah Semper Barat.
- d. PMT Posyandu Balita dan Lansia tidak dilaksanakan di bulan Ramadhan.
- e. Honor Ke-13 Jumentik pada beberapa kelurahan tidak dibayarkan karena masih terdapat kasus DBD.
- f. Pembayaran Gaji PJLP sesuai dengan rekapitulasi absensi dan jumlah eksisting PJLP (terdapat PJLP yang meninggal/ berhenti/ mengundurkan diri).

Saran :

Ada beberapa saran untuk mencapai target pada tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut : (dari segi anggaran)

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara konsisten per triwulan untuk memantau progres realisasi pelaksanaan anggaran, dikaitkan dengan pencapaian tujuan sasaran strategis dan dihubungkan dengan realisasi fisik/keuangan masing-masing UKPD.
2. Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan provinsi (Bappeda, BPKD, Inspektorat) dan meningkatkan pendampingan/pemantauan pada Kelurahan serta Kecamatan terkait pelaksanaan anggaran.

E. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara selama Tahun 2025 antara lain :

1. [Kantongi Sertifikasi FIFA, Stadion Tugu Jadi Kebanggaan Warga Jakarta Utara dan Siap Jadi Tuan Rumah Laga Internasional](#)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan fasilitas olahraga bertaraf internasional. Salah satu buktinya adalah selesainya revitalisasi tahap pertama Stadion Tugu yang berlokasi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. 153 Pengukir Prestasi Terima Anugerah Jakarta Utara 2025

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 153 individu dan kelompok dari berbagai bidang seperti olahraga, kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan hidup, seni budaya, perpustakaan dan kearsipan yang telah menorehkan prestasi baik di tingkat Provinsi DKI Jakarta, Nasional bahkan hingga ke tingkat Internasional. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3. JICT Raih Penghargaan Anugerah Jakarta Utara 2025

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) kembali menorehkan prestasi dengan meraih Anugerah Jakarta Utara 2025, sebuah bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara kepada para pihak yang telah berkontribusi positif dan mengharumkan nama Jakarta Utara di tingkat nasional, regional, maupun global. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

4. Apresiasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Untuk Warga Kelurahan Sunter Agung

Kelurahan Sunter Agung berhasil meraih Juara I dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebuah pencapaian yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi tata kelola kelurahan. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, memberikan penghargaan khusus kepada warga dan perangkat Kelurahan Sunter Agung. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

5. Kecamatan Penjaringan Raih Juara Umum MTQ ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

Kecamatan Penjaringan berhasil meraih peringkat pertama dan menyandang gelar Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025. Alhasil, piala bergilir yang sebelumnya berada di Kecamatan Koja kini beralih dan bersemayam di Kecamatan Penjaringan. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

6. **Lurah Rawa Badak Utara Raih Penghargaan Non Litigasi Pembuat Perdamaian dari Kemenkumham**

Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberikan penghargaan Non Litigation Peacemaker kepada Lurah Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

7. **Walikota Jakarta Utara Dampingi Gubernur Resmikan Universitas PTIQ sebagai Kampus Peradaban Qur'an Internasional**

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta sebagai Kampus Peradaban Qur'an Internasional di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 23 September 2025.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

8. **Walikota Jakarta Utara Terima Penghargaan Perdamaian dari UNPKFC**

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menerima kunjungan Global President United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC), Dr. Aphinita Chaichana, di Ruang Tamu Walikota pada hari Jumat tanggal 29 September 2025.

Kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga untuk memberikan penghargaan kepada Walikota sebagai kepala daerah yang dinilai berkomitmen menjaga perdamaian dan kerukunan di wilayah Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Walikota Hendra Hidayat juga diumumkan sebagai perwakilan Indonesia yang akan diundang menghadiri Global Summit UNPKFC bersama 160 kota dunia lainnya di Thailand.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

9. **Tim Robotik Jakarta Utara Wakili DKI di Ajang Pekan Kreativitas Pemuda di Palembang**

Dua pemuda asal Jakarta Utara, Akmal Firmansyah dan Richard D'Angelo Duykers, berhasil mengharumkan nama daerahnya dengan terpilih mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam ajang Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (PKPI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI di Palembang, Sumatera Selatan, pada 14–18 Oktober 2025.

Robot Smart Pemuda Jakarta Utara, karya Akmal Firmansyah dan Richard D'Angelo, mewakili DKI Jakarta di Ajang Kreativitas Pemuda Nasional 2025. Apa keunggulan robot ini?

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

10. **Kebon Bawang Dikukuhkan Jadi Kelurahan Binaan Imigrasi, Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM Ditingkatkan**

Kelurahan Kebon Bawang dikukuhkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025. Sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) lebih ditingkatkan. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

11. **Kelurahan Sunter Agung Raih Juara Harapan II dalam Lomba Tari Kreasi Ondel-Ondel Tingkat Provinsi DKI Jakarta**

Kelurahan Sunter Agung kembali menunjukkan kiprahnya dalam pelestarian budaya Betawi dengan mengikuti ajang *Lomba Tari Kreasi Ondel-Ondel* tingkat Provinsi DKI Jakarta yang digelar pada Sabtu, 4 Oktober 2025, di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta Selatan.

Dalam kompetisi yang diikuti oleh berbagai perwakilan kelurahan dari lima wilayah kota administrasi, tim tari Kelurahan Sunter Agung berhasil meraih Juara Harapan II Tingkat Kota Administrasi Jakarta Harapan II Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Prestasi ini menjadi bukti nyata semangat Kelurahan Sunter Agung dalam mengangkat nilai-nilai budaya lokal melalui ekspresi seni yang kreatif dan dinamis. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

12. Kelurahan Sunter Agung Wakili DKI Jakarta Dalam Penilaian Kelurahan Awards Tingkat Nasional 2025

Setelah dinyatakan lolos administrasi, Kelurahan Sunter Agung sebagai perwakilan Provinsi DKI Jakarta kembali melangkah dalam tahapan selanjutnya yaitu penilaian pemaparan, wawancara, dan klarifikasi data Penjaringan Pemerintahan Desa/Kelurahan Awards Tingkat Nasional Tahun 2025.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

F. Inovasi

INOVASI PENDUKUNG KEBERHASILAN



Inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi dapat

dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

Sebelum membahas tentang inovasi pendukung tentang keberhasilan, perlu diketahui mengenai faktor pendukung keberhasilan inovasi dahulu, yaitu :



Untuk menjadi sukses dan tangguh melalui inovasi, maka harus menerapkan beberapa hal berikut :

- a. Harus mampu berpikir secara Kreatif, yaitu dengan berani keluar dari kerangka bisnis yang sudah ada, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
- b. Juga harus bisa membaca arah perkembangan dunia usaha. Misalnya, saat ini sedang maraknya penggunaan Teknologi Informasi dalam dunia bisnis.

- c. Harus dapat menunjukkan nilai lebih dari produk yang dimilikinya, agar konsumen tidak merasa produk yang ditawarkan terlalu mahal.
- d. Perlu menumbuhkan sebuah kerja sama tim, sikap leadership, kebersamaan dan membangun hubungan yang baik dengan antar pegawai.
- e. Harus mampu membangun personal *approach* yang baik dengan lingkungan sekitarnya dan tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah diraihinya.
- f. Harus selalu meng-*upgrade* ilmu yang dimilikinya untuk meningkatkan hasil usaha yang dijalankannya. Hal ini dapat ditempuhnya dengan cara membaca buku-buku, artikel, internet, ataupun bertanya pada yang ahlinya.
- g. Harus bisa menjawab tantangan masa depan dan mampu menjalankan konsep manajemen dan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk mempelajari segala situasi bisnis atau usaha yang cepat berkembang dan berubah sangat cepat. Untuk itu perlunya daya kreativitas yang tinggi, analisis yang baik, intuisi yang tajam, kemampuan *networking* yang mendukung, serta strategi jitu dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya.

Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah modal usaha minim, pengelolaan sumber daya manusia yang kurang tepat dan kurangnya inovasi produk/pelayanan.

Oleh karena itu bagaimana solusi menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan mencari akar permasalahan di setiap kasus dan mengedepankan faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan usaha. Maka faktor yang paling utama pendukung keberhasilan adalah sikap, motivasi dan inovasi.

Solusi tanpa disadari, permasalahan sebetulnya bisa di atasi dengan solusi yang tampak di depan mata. Hanya saja kadang terlalu fokus pada permasalahan sehingga tidak mencari akar masalahnya. Bahkan solusi ini tidak hanya menjadi solusi permasalahan tapi bisa mendukung keberhasilan.

Inovasi wajib ada untuk mendukung program/kegiatan agar tidak tertinggal dengan zaman yang cepat berubah. Inovasi tidak harus berangkat dari ide yang besar, bisa melakukannya dari ide-ide kecil seperti menciptakan produk atau layanan yang cocok dengan tren yang sedang naik daun.

Dengan begitu, masyarakat akan semakin tertarik dan menganggap bahwa pemerintah daerah peduli dengan selera masyarakat. Maka inovasi pendukung keberhasilan yang telah dilakukan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah :

- a. Menciptakan teknologi untuk membantu kebutuhan informasi.
- b. Menciptakan sarana dan prasarana lebih modern.
- c. Menciptakan produk yang lebih efektif.

Inovasi mendukung program/kegiatan agar tidak tertinggal dengan zaman yang cepat berubah. Inovasi tidak harus berangkat dari ide yang besar, bisa melakukannya dari ide-ide kecil seperti menciptakan produk atau layanan yang cocok dengan tren yang sedang naik daun. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tertarik dan menganggap bahwa pemerintah daerah peduli dengan selera Masyarakat.

Inovasi tahun 2025 yang dapat disampaikan antara lain :

1. Inovasi Kebun Gangnam, Pegangsaan Dua Raih Juara Satu Kategori Kelurahan JIA 2025

Kelurahan Pegangsaan Dua meraih juara satu kategori Kelurahan dalam ajang Jakarta Innovation Award 2025. yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 malam. Acara ini merupakan rangkaian Jakarta Innovation Days Tahun 2025 yang mengusung tema Explore, Connect, Impact.

Lewat inovasi Kebun Gangnam, Kelurahan Pegangsaan Dua menyalip dua nominator lainnya, yaitu Kelurahan Cikoko dan Kelurahan Pulau Pari. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Inovasi “Kopi Jerman” (Kompur Minyak Jelantah Bermanfaat)

Warga Sunter Agung: Kompur Minyak Jelantah (Kopi Jerman).

Inovasi ini memanfaatkan minyak goreng bekas sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan untuk kompor. Lahir dari dua keprihatinan, yakni: pencemaran lingkungan akibat pembuangan minyak jelantah sembarangan dan bahaya kesehatan akibat penggunaan ulang minyak jelantah untuk menggoreng makanan. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3. Inovasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Jakarta Utara

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan Jakarta Utara sebagai kota percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Langkah ini diambil dengan tujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan mengurangi timbunan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Melalui kebijakan ini, Jakarta Utara diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia dalam menangani masalah sampah yang semakin mendesak. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

4. Inovasi Laboratorium Pengelolaan Sampah

JAKARTA terus berbenah dalam pengelolaan sampah. Kali ini, Pemerintah Provinsi Jakarta menjadikan Jakarta Utara sebagai model percontohan. Langkah ini diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan inovatif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan bahwa Jakarta mendapat mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjalankan rencana strategis pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Program utama yang diterapkan adalah “KuPiLah” (Kurangi, Pilah, Olah), yang mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat rukun warga (RW). Harapannya, setiap RW bisa mengelola sampah mandiri sebelum sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS). Dengan pendekatan ini, volume sampah rumah tangga bisa ditekan sejak dari sumbernya.

Selain itu, optimalisasi bank sampah juga menjadi bagian dari strategi ini. Konsep ekonomi sirkular diperkuat dengan sistem insentif yang memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah anorganik. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

5. Inovasi Hijau Kelurahan Sunter Jaya

Berawal dari pilah sampah yang sudah dilaksanakan oleh warga di RW 001 Kelurahan Sunter Jaya didapati banyak sampah yang berupa bungkus makanan ringan, bungkus kopi sachet, bungkus deterjen, bungkus bumbu penyedap, kantong kresek dan kantong plastik lainnya berakhir di tempat sampah.

Kota Administrasi Jakarta Utara resmi ditunjuk sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Untuk langkah awal bagaimana seluruh komponen mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga ke seluruh masyarakat beserta asosiasi di Jakarta Utara seperti hotel, restoran, kafe, dan lain-lain berkolaborasi dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Meskipun bukanlah pekerjaan yang mudah tapi membutuhkan usaha dari jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim sangat mendukung penuh aksi implementasi road map pengelolaan sampah di DKI Jakarta, yang juga melibatkan PPSU dan PKK dalam melakukan pendampingan BPS RW bersama dengan PJLP pendamping dari Sudin LH Kota Administrasi Jakarta Utara. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

6. Inovasi Simbaju

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Utara meluncurkan inovasi berbasis website Sistem Informasi Permohonan Bazar Jakarta Utara (Simbaju) bagi masyarakat umum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inovasi Simbaju sebagai upaya digitalisasi pelayanan publik untuk memfasilitasi bazar UKM, dengan harapan aplikasi ini dapat memberikan kepastian dukungan penyelenggaraan bazar dengan koordinasi kewilayahan yang lebih baik dan inovasi ini dapat disosialisasikan secara intensif agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

7. Inovasi Digital

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara resmi meluncurkan platform digital pelaporan keuangan RT/RW bernama Transparansi dan Akuntabilitas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Trans RT/RW).

Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menjelaskan bahwa digitalisasi laporan keuangan ini merupakan langkah penting menuju sistem yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses.

Melalui Trans RT/RW, laporan dapat dipantau secara real-time, meminimalisir kesalahan, sekaligus menjadi sarana kontrol bersama masyarakat. Dengan adanya sistem ini, pengurus RT/RW bisa lebih tertib administrasi dan warga juga dapat melihat penggunaan dana secara terbuka. Harapannya, Jakarta Utara bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di ibu kota. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

8. Inovasi Kecamatan Koja

Inovasi GERAJ Memulai Usaha Starting a Business Corner.

Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berbasis Online Single Submission (OSS) dan Sistem Pendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha saat mengajukan perizinan /non perizinan mulai dari tahap awal permohonan sampai dengan izin/non izin diterbitkan (end to end processs) guna memastikan kegiatan usaha yang dijalankan mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

9. Inovasi Kecamatan Pademangan

Inovasi Kolaborasi Intervensi menurunkan Stunting Puskesmas Pademangan (Klenting Puspa)

Klenting Puspa adalah singkatan dari Kolaborasi Intervensi Menurunkan Stunting Puskesmas Pademangan, sebuah inovasi layanan yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Pademangan untuk mengintervensi dan menurunkan kasus stunting melalui kolaborasi lintas sektoral.

Tujuan : Memperkuat intervensi stunting melalui kolaborasi dengan lintas sektoral, pihak kolaborator dari BUMD, dan Swasta agar berhasil membuat 22% balita di Jakarta bebas dari stunting.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.





BAB IV

PENUTUP

Penyusunan laporan Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai jbaran dari visi, misi, tujuan dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajarannya telah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota.
3. Nilai pengukuran Kepuasan Layanan Kota Administrasi tahun 2025 sebesar 96,79 dari nilai target sebesar 96,80.
4. Hasil pengukuran Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi tahun 2025 sebesar 95,03 dari nilai target sebesar 96,38.
5. Nilai pengukuran Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 98,53 melebihi nilai target sebesar 97,22.
6. Terdapat 9 (sembilan) Indikator Sasaran Relevan Lainnya dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 dan memiliki capaian lebih dari 100%, yaitu :
 - a. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat;

- b. Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
 - c. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program;
 - d. Nilai kualitas data SDI;
 - e. Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - f. Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajar;
 - g. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko;
 - h. Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi;
 - i. Persentase Progres Penyelesaian TL Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK).
7. Tidak terdapat masalah yang signifikan dalam memenuhi kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, namun demikian Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajarannya akan berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.
8. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan, hampir seluruh indikator kinerja berhasil diwujudkan dengan baik. Terlihat dukungan seluruh Suku Dinas, Bagian, Kecamatan maupun Kelurahan mewujudkan kinerja yang telah ditargetkan.

B. Saran

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan agar mencapai tujuan, adalah sebagai berikut :

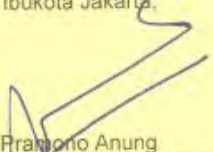
1. Perbaiki berkesinambungan ke depan untuk Rencana Strategis.
2. Perbaiki pelayanan, melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat harus terus dievaluasi dan ditingkatkan, seperti :
 - a. Seluruh pelayanan yang diberikan untuk masyarakat bersifat gratis (tidak dipungut bayaran) hal ini sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para pekerja di larang keras meminta imbalan kepada warga.

- b. Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
 - c. Prosedur dan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah didapatkan, dan akses untuk melaporkan suatu perkara lebih mudah dan terjangkau.
3. Perekrutan petugas/kader ditingkatkan dengan penilaian kompetensi yang lebih baik, seperti :
- a. Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan.
 - b. Kejelasan tupoksi petugas pelayanan, mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah adanya penetapan zonasi bekerja.
 - c. Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas.
 - d. Dalam melaksanakan pekerjaan petugas pelayanan secara rutin harus dilaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diperpanjang kontraknya ataupun dihentikan.
 - e. Diterapkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
 - f. Seleksi penerimaan petugas pelayanan harus dilaksanakan secara ketat tidak hanya pengetahuan dan ketrampilan melaksanakan pekerjaan namun juga sikap dan perilaku selama melaksanakan seleksi turut menentukan kelulusannya.
 - g. Sarana prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.
4. Peningkatan kinerja serta koordinasi antar pihak terkait untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun depan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.



Naskah Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Hendra Hidayat
Jabatan	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Pramono Anung
Jabatan	: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta,	2025
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,
	
Pramono Anung NIP 196511271996031003	Hendra Hidayat NIP 197211191991011001

Target Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Hendra Hidayat
 NIP : 197211191991011001
 Jabatan : Walikota
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Penghitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	96,8	N/A	96,8	95,8	Nilai	
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Penghitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	96,8	N/A	96,8	96,8	Nilai	
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	N/A	97,22	N/A	97,22	97,22	Nilai	

Lanjutan Lampiran 2 Halaman 2 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengarahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,05, atau nilai interval konversi 65,00 – 75,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei						
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Pemantauan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	96,38	N/A	96,38	96,38	Nilai
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Surat Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi Operasional : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Surat Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai

Lanjutan Lampiran 2 Halaman 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Korenkan Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tertusumnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35% : PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30% : PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login	100	100	100	100	100	Persentase
5	Tertataatannya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Metode Pengukuran : a. Bobot 5% : PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% : PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% : PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakasat.jakarta.go.id/inventarisasi/prologis	5	25	55	100	100	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 755 Tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Validasi Pendukung	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	Nilai

Lanjutan Lampiran 2 Halaman 4 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data. Metode Pengukuran : $\text{Nilai Kualitas Data SDI} = (\text{Nilai Aspek Kelengkapan Waktu}) + (\text{Nilai Aspek Kelengkapan Data}) + (\text{Nilai Aspek Keunikan Isi Data}) + (\text{Nilai Aspek Validitas Data})$ (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Kelengkapan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembedayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyusutkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.01.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang dilaksanakan ekspor (Kategori Makro) 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bigdata Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Lanjutan Lampiran 2 Halaman 5 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan dilah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilize).						
8	Terwujudnya lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : a. Bobot 10% : PO/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpedm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : Mpe/km-bpedm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan diunggah pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Lanjutan Lampiran 2 Halaman 6 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral: Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektoral)						
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan mengumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang teruang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evlusi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7% Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW III 2025 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Lanjutan Lampiran 2 Halaman 7 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APF Definisi Operasional: Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran: (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2025 dan selebihnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2025 dan selebihnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data: Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Jakarta
Pak Hartono Anung

Jakarta, 2025
Wakil Kota Administrasi Jakarta Utara
Rendra Holayat
NIP. 197211191991011001

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.1. – Data Pendukung

Data Pendukung : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Semester I Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Nilai IKL Kota Adm. JU Semester I Tahun 2025



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Dari : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 632/PU.07.00
Sifat : Penting
Hal : Laporan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi di Kota
Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik telah dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Ketertiban Umum (Tibum) dan Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM) pada tanggal 9 April s.d 7 Mei 2025 di 31 (tiga puluh satu) kelurahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 sebesar 98,60 dan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 95,07.

Berdasarkan hasil nilai agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi sebesar 96,835.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juli 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.1. – Data Pendukung Halaman 2
Data Pendukung : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Semester I Tahun 2025

(Cover) Laporan Pelaksanaan SKM Kota Adm. JU Semester I Tahun 2025



Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.1. – Data Pendukung Halaman 3
Data Pendukung : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Semester II Tahun 2025

Surat Pengantar Laporan Hasil SKM Kota Adm. JU Semester II Tahun 2025
(Halaman 1)



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Nomor : e-0006/PU.04.00
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat
Kota Administrasi Jakarta
Utara Semester II Tahun
2025

Jakarta, 16 September 2025

Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Keputusan Gubernur Nomor 426 Tahun 2022 tentang Unit Pelayanan Publik Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat, bersama ini saya sampaikan hal-hal terkait Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 20 Agustus 2025;
2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 98,46 dengan predikat "Sangat Baik".
3. Jumlah total responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 7 layanan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 24.667 dengan rincian
 - a. 3.590 responden yang telah menerima layanan Ketertiban Umum;
 - b. 3.756 responden yang telah menerima layanan PPSU;
 - c. 3.646 responden yang telah menerima layanan Jumantik;
 - d. 3.615 responden yang telah menerima layanan PKK;
 - e. 3.610 responden yang telah menerima layanan Posyandu;
 - f. 2.848 responden yang telah menerima layanan RPTRA;
 - g. 3.602 responden yang telah menerima layanan RT/RW/FKDM, LMK.
4. Terdapat 9 (sembilan) unsur Pelayanan yang disurvei yaitu:
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - c. Waktu Penyelesaian;
 - d. Biaya/tarif;
 - e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
 - f. Kompetensi Pelaksana;
 - g. Perilaku Pelaksana;
 - h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - i. Sarana dan Prasarana.

5. Standar...

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.1. – Data Pendukung Halaman 4
Data Pendukung : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Semester II Tahun 2025

Surat Pengantar Laporan Hasil SKM Kota Adm. JU Semester II Tahun 2025
(Halaman 2)

5. Standar penilaian Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,6-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan sasaran Kecamatan/Kelurahan dan Rencana Tindak Lanjut dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana terlampir.

Demikian saya sampaikan. Atas perhatian Ibu, Saya mengucapkan terima kasih.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,


Hendra Hidayat
NIP 197211191991011001

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.1. – Data Pendukung Halaman 5
Data Pendukung : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Semester II Tahun 2025

(Cover) Laporan Pelaksanaan SKM Kota Adm. JU Semester II Tahun 2025



Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.2. – Data Pendukung Halaman 1

Data Pendukung : Laporan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
Semester I Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekko Administrasi di Kota
Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2025 (Halaman 1)



WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dari : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 681/PU.07.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Laporan hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota
Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester 1 Tahun 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi yang didasarkan pada indikator pelayanan sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Bersama ini saya sampaikan hal-hal terkait Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah dilaksanakan terhadap kinerja Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai berikut

1. Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara dimulai pada tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan 3 Juli 2025.
2. Jumlah total responden Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 30 Responden dengan rincian
 - a. 7 responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara.
 - b. 11 responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Utara.
 - c. 12 responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara.
3. Terdapat 6 (enam) tujuan survei yaitu
 - a. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi.
 - b. Teridentifikasinya keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah).
 - c. Terpetakannya kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya.
 - d. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi.
 - e. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait pelayanan koordinasi.
 - f. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian.
4. Standar penilaian Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lanjutan Lampiran 3.2. – Data Pendukung Halaman 2

Data Pendukung : Laporan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
Semester I Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekko Administrasi di Kota
Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2025 (Halaman 2)

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konvensi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

5. Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan responden Kepala Suku Dinas dan Kepala Suku Badan di bawah koordinasi Asisten Sekretaris di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut

No	Koordinasi Asisten Sekretaris Kota	Indeks Kepuasan	Keterangan
1	Bidang Pemerintahan	96,89	Mutu A
2	Bidang Perekonomian dan Pembangunan	96,00	Mutu A
3	Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	92,32	Mutu A
Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara		95,07	Mutu A

6. Agregat Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 yaitu 95,07, dengan rincian sebagai berikut

- Semester 1 Nilai Indeks: 95,07
- Semester 2 Nilai Indeks: -

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juli 2025

Wakil Kota Administrasi Jakarta Utara



Henjira Hidayat
NIP. 97211191991011001

- Tembusan:
- 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - 2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.2. – Data Pendukung Halaman 3
Data Pendukung : Laporan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
Semester I Tahun 2025

(Cover) Paparan Analisis Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris
Kota/Kabupaten Administrasi di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Semester I
(Halaman 2)



Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.2. – Data Pendukung Halaman 4
Data Pendukung : Laporan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
Semester II Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekko Administrasi di Kota
Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025 (Halaman 1)



WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dari : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 1559/KG.05.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan hasil Indeks Efektifitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota
Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester 2 Tahun 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Indeks Efektifitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi yang didasarkan pada indikator pelayanan sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Bersama ini saya sampaikan hal-hal terkait Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah dilaksanakan terhadap kinerja Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara dimulai pada tanggal 17 November 2025 sampai dengan 24 Desember 2025.
2. Jumlah total responden Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 30 Responden dengan rincian :
 - a. 7 responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara.
 - b. 11 responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Utara.
 - c. 12 responden untuk Koordinasi di Bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara.
3. Terdapat 6 (enam) tujuan survei yaitu :
 - a. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi.
 - b. Teridentifikasinya keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah).
 - c. Terpetakannya kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya.
 - d. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi.
 - e. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait pelayanan koordinasi.
 - f. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian.

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.2. – Data Pendukung Halaman 5
Data Pendukung : Laporan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
Semester II Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekko Administrasi di Kota
Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2025 (Halaman 2)

4. Standar penilaian Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konvensi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

5. Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan responden Kepala Suku Dinas dan Kepala Suku Badan di bawah koordinasi Asisten Sekretaris di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

No	Koordinasi Asisten Sekretaris Kota	Indeks Kepuasan	Keterangan
1	Bidang Pemerintahan	95,83	Mutu A
2	Bidang Perekonomian dan Pembangunan	97,10	Mutu A
3	Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	92,09	Mutu A
Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara		95,01	Mutu A

6. Agregat Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 yaitu 95,04, dengan rincian sebagai berikut :
- Semester 1 Nilai Indeks: 95,07
 - Semester 2 Nilai Indeks: 95,01

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



- Tembusan:
1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.2. – Data Pendukung Halaman 6
Data Pendukung : Laporan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
Semester II Tahun 2025

(Cover) Paparan Analisis Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris
Kota/Kabupaten Administrasi di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Semester II
(Halaman 1)



Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.3. – Data Pendukung Halaman 1

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program Prioritas Dan Strategis Serta Respons Perangkat Daerah Dengan Program Prioritas Dan Strategis Pada Saat Krisis Komunikasi Program Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Realisasi Strategi Komunikasi (Strakom)
Triwulan IV Tahun 2025 (Halaman 1)



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOTA DINAS

Kepada Yth : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Dari : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : e-0013/PU.04
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Realisasi Strategi Komunikasi (Strakom) Triwulan IV Tahun 2025

Sehubungan dengan target sasaran relevan lainnya Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah. Berikut disampaikan laporan Strategi Komunikasi Program/Kegiatan Antisipasi Banjir dan ROB yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan Perangkat Daerah pada tanggal 9 Desember 2025 dengan judul Komunikasi Publik Talk (Kopitalk) #6 Memikat Hati Gen Z : Gaya Komunikasi dan Konten Berbasis Validasi Identitas;
2. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara telah melaksanakan program Antisipasi Genangan dan Banjir serta ROB di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan melibatkan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti melakukan rapat koordinasi, rapat monitoring dan evaluasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait rencana Antisipasi Genangan dan Banjir serta ROB Triwulan IV tahun 2025 melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Materi-materi di atas telah menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan program Antisipasi Genangan dan Banjir serta ROB, yaitu
 - a. Telah ditentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi program Antisipasi Genangan dan Banjir serta ROB, sehingga RT/RW dan Masyarakat Setempat merasa aman dari banjir/genangan;
 - b. Melakukan Monitoring Progres program Antisipasi Genangan dan Banjir serta ROB Triwulan IV tahun 2025 melalui tinjauan lapangan serta rapat monitoring dan evaluasi;
 - c. Melaporkan hasil dari Antisipasi Genangan dan Banjir serta ROB tersebut ke Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota.
4. Selama periode Triwulan IV tahun 2025 sesuai dengan hasil koordinasi tidak terdapat kondisi krisis komunikasi;
5. Selama periode Triwulan IV tahun 2025, terhadap pertanyaan dan komentar warganet pada media social telah diberikan respon sesuai dengan panduan.

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Jakarta, 23 Desember 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,


Hendra Hidayat
NIP. 197211191991011001

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.3. – Data Pendukung Halaman 2

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program Prioritas Dan Strategis Serta Respons Perangkat Daerah Dengan Program Prioritas Dan Strategis Pada Saat Krisis Komunikasi Program Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Realisasi Strategi Komunikasi (Strakom)
Triwulan IV Tahun 2025 (Halaman 2)

2

Lampiran : Nota Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 Nomor : e-0013/PU.04
 Tanggal : 23 Desember 2025

A. Laporan Mengikuti Sosialisasi dan Bimtek

B. Laporan Realisasi Publikasi

No.	Tanggal Publikasi	Judul Publikasi	Tautan/Link
1.	9 Oktober 2025	Perbaikan Saluran di Jalan Raya Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://www.instagram.com/p/DPr_noUEfG/?img_index=2&igs_h=MXQxcjZyZiZqb3hxbw==
2	14 Oktober 2025	Pengurusan Saluran di Jalan Sukarela Rt.01 Rw.010 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://www.instagram.com/p/DPxejTqEgim/?img_index=1
3.	17 Oktober 2025	Pengerukan di Jalan gedung pompa tanjungan Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://www.facebook.com/share/p/1CKVFWSdoj/
4.	22 Oktober 2025	Perbaikan & Pelebaran Saluran di Jalan kertajaya RT.01 RW.15 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://youtube.com/shorts/XcxiZ1uSMoU?feature=share
5.	30 Oktober 2025	Pengurusan Saluran di Jalan Kertajaya 4 RT.016 RW.014 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://www.instagram.com/p/DQILWPVkaTa/?igsh=djVnNGFlaGQ3diNn
6.	5 November 2025	Peninggian tanggul mitigasi di Jalan mandala bahari Pegedogan muara angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://www.facebook.com/share/p/17JPK751Jm/
7.	7 November 2025	Penempatan pompa Mobile Truck di rumah pompa Muara Angke	https://www.instagram.com/p/DQvZL6BkgQh/?img_index=1

8. 13 November...

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.3. – Data Pendukung Halaman 3

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program Prioritas Dan Strategis Serta Respons Perangkat Daerah Dengan Program Prioritas Dan Strategis Pada Saat Krisis Komunikasi Program Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Realisasi Strategi Komunikasi (Strakom)
Triwulan IV Tahun 2025 (Halaman 3)

8.	13 November 2025	Perbaikan turap saluran longsor di Jalan Kecamatan penjaringan Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://youtube.com/shorts/3yGQauFuUrM?feature=share
9.	20 November 2025	Pengerukan Waduk Pluit	https://web.facebook.com/share/v/17Pb6r3xv6/
10.	26 November 2025	Pengoperasian pompa Pasar Ikan	https://www.instagram.com/reel/DRmShugkU2s/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
11.	5 Desember 2025	Pengurusan Saluran di Jalan Pluit Timur RW 09 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://youtu.be/lq-EFpK638
12	9 Desember 2025	Pengurusan Saluran di Jalan Pluit Timur RW 09 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://www.facebook.com/share/p/1BuMSiQUCh/
13.	12 Desember 2025	Pembuatan turap saluran Jalan Kapuk muara Gg.Banjir RT.03 RW.05 Kelurahan Kapuk Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	https://www.facebook.com/share/p/19s1GLXeax/
14	17 Desember 2025	Pengoperasian Pompa Waduk Pluit	https://www.facebook.com/share/r/17qtkK7BBZ/
15	19 Desember 2025	Pengerukan Waduk Muara Angke Penjaringan	https://www.instagram.com/p/DsDFKBukiql/?img_index=1

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,


Hendra Hidayat
NIP. 197211191991011001

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Capaian P3DN pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2025 (Halaman 1)



SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOTA DINAS

Kepada : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Dari : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 01/UD.02.04
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (dua) berkas
Hal : Laporan Capaian P3DN pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2025

Menindaklanjuti Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Indikator Kinerja Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat dilaporkan capaian P3DN pada Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100%.
2. Pelaksanaan realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri Tahun Anggaran 2025 dapat dimonitoring pada dashboard bigbox LKPP sedangkan penginputan data dapat dilakukan pada masing-masing sumber data yang akan terintegrasi dengan dashboard bigbox LKPP:
 - a) Data perencanaan bersumber dari Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
 - b) Data Pelaksanaan bersumber dari:
 - i. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPE): baik tender maupun non tender yang sedang berjalan, dan non-kontraktual (swakelola, pencatatan dan dana darurat)
 - ii. Toko Daring: data pembelian yang tercatat pada platform Toko Daring (termasuk e-Order)
 - iii. e-Katalog: Data pembelian yang tercatat pada platform e-Katalog

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025
Lanjutan Lampiran 3.4. – Data Pendukung Halaman 2
Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri
Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Capaian P3DN pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara
Triwulan IV Tahun 2025 (Halaman 2)

- c) Data pencatatan Swakelola bersumber dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang direkapitulasi oleh BPPBJ
- d) Data Realisasi Pembayaran bersumber dari pembayaran belanja pengadaan yang direkapitulasi oleh BPKD
- 3. Hasil perhitungan capaian P3DN berdasarkan Laporan Pelaksanaan P3DN dari sumber Bigbox LKPP untuk pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa periode 1 Januari - 31 Desember 2025 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Capaian Perkin adalah sebesar 100%.

Demikian hal ini saya sampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut.

Jakarta, 5 Januari 2026

Dibuat Oleh
Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
Setko Administrasi Jakarta Utara



Retno Daru Dewi
NIP 197404231998032005

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lanjutan Lampiran 3.4. – Data Pendukung Halaman 3

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025

Nota Dinas Laporan Capaian P3DN pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2025 (Halaman 3)

CAPAIAN P3DN TRIWULAN IV TAHUN 2025													
No	Nama Satker	DATA TARIKAN BIGBOX LKPP			DATA BIGBOX (Selain Pelaksanaan)	DATA TARIKAN BPPUJ (E-ORDER)	SHEET KOREKSI MULTIYEARS	Total Belanja PDN (Rp)	DATA DARI BPKD Realisasi Pembayaran (Rp)	Capaian Perjanjian Kinerja (%) per 1 Jan 2025	Keterangan	Nilai yang Diinject ke Sistem Perkin (%)	
		SIRUP	SPSE, Toko Online, E-Katalog, E-Order	Realisasi PDN Trd Komitmen (%)									
													Total Perencanaan PDN Penyedia (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)*100%	(f)	(g)	(h)	(i) = (d)/(f)*(g)*(h)	(j)	(k) = (i)/(j)*100%	(l)	(m)	
2	BIRO PEMERINTAHAN	5.382.764.014	4.650.565.374	86,47	559.400.000	400.875.835	-	5.610.841.209	5.647.011.410	99,43	TARGET tercapai	100,00	
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	566.047.873.388	473.848.428.795	83,71	299.286.906.699	30.913.168.584	-	804.054.504.079	825.661.937.667	97,38	TARGET tercapai	100,00	
11	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	514.947.031.036	404.978.559.215	78,64	273.010.095.391	19.868.402.027	-	697.836.966.633	738.186.176.127	94,54	TARGET tercapai	100,00	
12	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	573.014.037.676	481.736.268.336	84,07	373.359.860.634	17.786.260.577	-	872.882.398.547	928.363.923.066	94,02	TARGET tercapai	100,00	
14	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	4.407.167.673	4.123.339.095	93,67	354.800.000	174.777.000	-	4.652.916.095	5.034.589.995	92,42	TARGET tercapai	100,00	
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	143.235.101.925	121.532.513.095	84,85	000	1.213.014.000	-	122.745.527.096	133.842.833.286	91,71	TARGET tercapai	100,00	
17	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAER	162.095.097.821	122.390.525.145	75,51	420.692.900	34.213.521.355	-	137.024.739.600	149.763.706.386	91,49	TARGET tercapai	100,00	
18	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	408.583.435.017	336.141.657.106	82,27	180.230.567.993	13.430.976.778	-	528.809.201.877	589.061.008.272	89,94	TARGET tercapai	100,00	
19	BIRO HUKUM	2.030.403.216	1.965.476.127	96,80	191.204.500	136.270.000	-	2.292.950.627	2.554.913.330	89,75	TARGET tercapai	100,00	
20	BADAN KEPENGUASAAN DAERAH	33.983.479.509	27.047.342.254	79,59	112.850.000	3.897.789.763	-	31.058.582.017	34.961.625.609	88,84	TARGET tercapai	100,00	
21	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	121.021.670.648	114.247.615.526	94,72	126.283.300	1.400.038.162	-	115.782.936.988	130.540.335.364	88,70	TARGET tercapai	100,00	
22	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.819.696.805	25.630.275.397	73,61	25.946.730.997	2.835.669.955	-	54.412.676.349	61.670.852.261	88,23	TARGET tercapai	100,00	
25	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYEL	661.329.604.720	592.542.638.260	89,60	328.390.198	7.436.265.229	-	600.307.263.687	701.290.954.738	85,60	TARGET tercapai	100,00	
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.131.094.677	17.684.282.645	65,18	15.425.857.600	3.827.070.305	-	36.937.210.550	43.318.020.538	85,27	TARGET tercapai	100,00	
27	SEKRETARIAT DPRD	319.460.316.395	182.979.746.651	57,28	567.859.416.229	1.444.976.000	-	752.284.138.880	838.862.607.325	85,13	TARGET tercapai	100,00	
28	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	490.127.931.136	376.261.347.503	76,77	193.022.772.254	8.757.880.546	-	578.042.000.303	679.795.907.840	85,03	TARGET tercapai	100,00	
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	325.327.212.083	273.813.269.573	84,17	5.458.734.739	9.933.418.350	-	289.205.422.862	343.583.045.888	84,17	TARGET tercapai	100,00	
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	107.110.466.046	84.887.017.762	79,25	2.070.537.500	4.274.296.670	-	91.231.851.932	112.127.946.972	81,36	TARGET tercapai	100,00	
34	BIRO KEPALA DAERAH	32.164.664.579	24.045.978.484	74,76	4.146.750.000	459.920.000	-	28.652.648.484	35.609.585.136	80,46	TARGET tercapai	100,00	
35	INSPEKTORIAT	118.013.892.753	32.453.946.408	27,50	40.537.893.418	1.565.012.440	-	74.556.762.266	97.237.310.681	76,68	TARGET tidak tercapai	95,84	
38	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	497.409.618.976	667.292.897.539	134,13	2.239.616.289	705.268.677	-	670.297.592.525	882.847.849.734	75,92	TARGET tidak tercapai	94,91	
50	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEI	128.846.383.371	65.235.257.470	50,63	2.785.082.211	1.861.986.352	-	68.882.326.233	134.666.931.196	51,80	TARGET tidak tercapai	64,87	

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.5. – Data Pendukung Halaman 1

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar

Nota Dinas Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Lain yang Relevan dengan Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang Mendorong Pembelajaran, Kolaborasi, dan Berbagi Pengetahuan Triwulan IV (Halaman 1)



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0106/DL.01.00
Sifat : Penting
Lampiran: Satu berkas
Hal : Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Kinerja Lain yang Relevan dengan Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang Mendorong Pembelajaran, Kolaborasi, dan Berbagi Pengetahuan Triwulan IV

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Kinerja Lain yang Relevan dengan Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang Mendorong Pembelajaran, Kolaborasi, dan Berbagi Pengetahuan dengan Pengukuran Kinerja Triwulan IV, yaitu

1. perangkat daerah melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai agenda yang telah disusun;
2. kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan aset pengetahuan dan diunggah pada portal KM (<https://km-bpsdm.jakarta.go.id>);
3. aset pengetahuan yang dihasilkan kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari jumlah pegawai pada perangkat daerah;

saya sampaikan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada poin 1 s.d. 3 di atas dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini saya sampaikan. Mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan arahan lebih lanjut. Atas perkenan dan arahan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Desember 2025
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,


DYANA AIRLANGGA
NIP 197712081997111001

Tembusan:

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lanjutan Lampiran 3.5. – Data Pendukung Halaman 2

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran

Nota Dinas Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Lain yang Relevan dengan Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang Mendorong Pembelajaran, Kolaborasi, dan Berbagi Pengetahuan Triwulan IV (Halaman 2)

Lampiran
Nota Dinas Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0106/DL.01.00
Tanggal 30 Desember 2025

DAFTAR TAUTAN DOKUMENTASI, ASET PENGETAHUAN, DAN PERSENTASE CAPAIAN KOMUNITAS YANG DIMANFAATKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

No.	Perangkat Daerah	Tautan Dokumentasi	Aset Pengetahuan	Pemanfaatan Aset Pengetahuan (50% Jumlah Pegawai)	Keterangan
1	Inspektorat	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/81?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/probity-audit-konstruksi-membangun-integritas-dalam-setiap-tahap-konstruksi	56.79%	Tercapai
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/122?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/diseminasi-hasil-penelitian-dan-pengembangan	50.60%	Tercapai
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/108?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/proses-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah	100%	Tercapai
4	Badan Kepegawaian Daerah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/91?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/disiplin-dan-kode-etik-pegawai	70.70%	Tercapai
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/70?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/systems-thinking-and-mapping-complexity-menggunakan-kumu	100%	Tercapai
7	Badan Pendapatan Daerah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/107?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/peningkatan-pemahaman-kebijakan-pemberian-pengurangan-dan-pembebasan-pajak-daerah	100%	Tercapai

No.	Perangkat Daerah	Tautan Dokumentasi	Aset Pengetahuan	Pemanfaatan Aset Pengetahuan (50% Jumlah Pegawai)	Keterangan
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/112?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/penanganan-konflik-tawuran-di-dki-jakarta	100%	Tercapai
9	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/116?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/rancangan-peraturan-daerah-transformasi-bentuk-badan-hukum-perumda-menjadi-persero-da-air-minum-jawa	89.86%	Tercapai
10	Badan Pengelolaan Aset Daerah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/113?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/pemindahtanganan-dan-penghapusan-barang-milik-daerah	100%	Tercapai
11	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/82?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/kegiatan-berbagi-pengetahuan-cop-pelaku-pengadaan-bppbi-dengan-tema-dokumen-pengadaan-langsung-jasa-konstruksi-sampai-dengan-400-juta	100%	Tercapai
			https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/optimalisasi-peran-pejabat-pengadaan-dalam-mempercepat-proses-pemilihan-penyedia-tanpa-mengurangi-kualitas-dan-kepatuhan-regulasi	100%	Tercapai
12	Satuan Polisi Pamong Praja	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/92?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/implementasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-pelayanan-publik-penegakkan-perda-perkada-tramtibum-dan-linmas-di-lingkungan-satpol-pp	52.15%	Tercapai
13	Kota Administrasi Jakarta Pusat	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/118?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/pengelolaan-air-limpasan-sebagai-upaya-penanggulangan-banjir-jakarta	82%	Tercapai

Lanjutan Lampiran 3.5. – Data Pendukung Halaman 3

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran

Nota Dinas Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Lain yang Relevan dengan Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang Mendorong Pembelajaran, Kolaborasi, dan Berbagi Pengetahuan Triwulan IV (Halaman 3)

No.	Perangkat Daerah	Tautan Dokumentasi	Aset Pengetahuan	Pemanfaatan Aset Pengetahuan (50% Jumlah Pegawai)	Keterangan
14	Kota Administrasi Jakarta Utara	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/119?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/mediantara-strategi-kolaboratif-pengelolaan-media-digital-pemerintah-jakarta-utara	100%	Tercapai
15	Kota Administrasi Jakarta Barat	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/110?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/pengelolaan-pengaduan-di-kota-administrasi-jakarta-barat	100%	Tercapai
16	Kota Administrasi Jakarta Selatan	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/95?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/alih-media-arsip-dinamis-di-lingkungan-kota-administrasi-jakarta-selatan	100%	Tercapai
17	Kota Administrasi Jakarta Timur	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/94?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/waspada-di-balik-klik-statistik-kejahatan-transaksi-digital-dan-cara-melindungi-diri	100%	Tercapai
18	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/99?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/peningkatan-ekonomi-masyarakat-melalui-pendampingan-berkualitas-budidaya-rumput-laut-di-kelurahan-pulau-pari	87.39%	Tercapai
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/123?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/aksesibilitas-monitoring-pembentukan-peraturan-daerah-secara-digital-melalui-sistem-informasi-legislasi-daerah	90.48%	Tercapai
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/85?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/penyelesaian-permasalahan-pendaftaran-penduduk-dan-pencatatan-sipil-1	100%	Tercapai

No.	Perangkat Daerah	Tautan Dokumentasi	Aset Pengetahuan	Pemanfaatan Aset Pengetahuan (50% Jumlah Pegawai)	Keterangan
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/88?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/prosedur-penghisapan-pada-mobil-pompa	77.40%	Tercapai
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/102?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/peneraan-pompa-ukur-bbm-di-spbu	100%	Tercapai
23	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/83?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/arrah-kebijakan-dinas-ketahanan-pangan-kelautan-dan-pertanian-di-wilayah-pesisir-melalui-pemanfaatan-mangrove	100%	Tercapai
24	Dinas Kebudayaan	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/100?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/pelatihan-dasar-membalik	59.85%	Tercapai
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/114?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/penyelenggaraan-fasilitasi-hak-kekayaan-intelektual https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/penyelenggaraan-fasilitasi-hak-kekayaan-intelektual	82.61%	Tercapai
26	Dinas Perhubungan	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/kms/communities/115?tab=docs	https://km-bpsdm.jakarta.go.id/knowledge-center/pembangunan-iri-jakarta-dalam-mendukung-jakarta-kota-global	59.49%	Tercapai

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.6. – Data Pendukung Halaman 1

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

BERITA ACARA REALISASI INDIKATOR KINERJA LAIN YANG RELEVAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025										
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO										
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA										
Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian implementasi manajemen risiko s.d. Triwulan IV Tahun 2025										
NO	PENILAIAN PERKIN		PENYELESAIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO					HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
			TW II		TW IV		TINDAK LANJUT SKPD			
URAIAN		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada			Setuju	Tidak	Catatan
Indikator Kinerja Lain Yang Relevan										
1	Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025						Disisi dengan Hasil pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	v		
2	Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025									
2	Dokumen Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025				v					
3	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Persentase	67%		33%					
4	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Persentase	67%		33%					
5	Capaian (Jumlah kumulatif realisasi setiap triwulan)	Persentase	67%		100%					
Rencana Aksi										
1	Memperbaiki Surat Keputusan Struktur Manajemen Risiko				v		Telah dilaksanakan perbaikan SK dan identifikasi risiko masing-masing bagian	v		
2	Pemantauan aduan masyarakat pada sisten CRM				v		Data dukung berupa laporan pemantauan CRM 2025	v		
3	Melakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi regulasi terkait pelayanan publik				v		Data dukung berupa undangan dan nota dinas kegiatan	v		
4	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan				v		Data dukung berupa laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor	v		
5	Sosialisasi mengenai kebutuhan usulan komponen dalam penyusunan anggaran				v		Data dukung berupa surat pengusulan komponen harga dari Walikota	v		

Keterangan :
- Target Dokumen setiap Triwulan bersifat kumulatif dan berkesinambungan.
- Pemenuhan target dokumen TW IV merupakan hasil download dari sistem Si-Perisai

Petugas Verifikator

Shafira Rizki Ramdhayani
NIP. 199801092020122009

Jakarta, Desember 2025
Kepala Perangkat Daerah

Hendra Hidayat
NIP. 197211191991011000

Mengetahui,
Inspektur Pembantu I
selaku Verifikator

Andi Wibowo
NIP. 197704021998111001

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.7. – Data Pendukung Halaman 1

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Surat Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
Tahun Anggaran 2025 (Halaman 1)

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telpon. 382 2040 - 382 2836 Fax. 345 6878 J A K A R T A	Kode Pos : 10110
Nomor :	e-0022/UD.02.02	8 Januari 2026
Sifat :	Penting	
Lampiran :		
Hal :	Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tahun Anggaran 2025	Kepada Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
Sehubungan perjanjian kinerja sasaran khusus Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang merupakan target pada triwulan IV, berikut disampaikan hasil perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tahun 2025 sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta,  Michael Rolandi Cesnanta Brata NIP. 196902031989031001		
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta.		

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.7. – Data Pendukung Halaman 2

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Hasil Perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Implementasi Tahun 2025
(Halaman 1)

HASIL PERHITUNGAN
PERSENTASE NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS ASPEK IMPLEMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Nama PD Induk	Bobot Capaian Keluaran sub kegiatan (BCKK)			Bobot Efisiensi (BE)			Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (BK)			Bobot Penyerapan Anggaran (BP)			Nilai Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
			BCKK	Bobot BCKK	Nilai BCKK	BE	Bobot BE	Nilai BE	BK	Bobot BK	Nilai BK	BP	Bobot BP	Nilai BP	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14	15=13x14	16=6+9+12+15
1	10101000	DINAS PENDIDIKAN	100,00%	43,50%	43,50%	76,19%	28,60%	21,79%	62,09%	18,20%	11,30%	87,51%	9,70%	8,49%	85,08%
2	10201000	DINAS KESEHATAN	100,00%	43,50%	43,50%	81,24%	28,60%	23,24%	87,90%	18,20%	16,00%	91,95%	9,70%	8,92%	91,65%
3	10302000	DINAS SUMBER DAYA AIR	100,00%	43,50%	43,50%	83,44%	28,60%	23,87%	40,23%	18,20%	7,32%	85,83%	9,70%	8,33%	83,01%
4	10303000	DINAS Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	100,00%	43,50%	43,50%	75,29%	28,60%	21,53%	57,97%	18,20%	10,55%	81,40%	9,70%	7,90%	83,48%
5	10402000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	99,73%	43,50%	43,38%	79,17%	28,60%	22,64%	62,27%	18,20%	11,33%	85,95%	9,70%	8,34%	85,69%
6	10501000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00%	43,50%	43,50%	78,85%	28,60%	22,55%	81,67%	18,20%	14,88%	86,78%	9,70%	8,42%	89,33%
7	10503000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	82,69%	28,60%	23,65%	53,64%	18,20%	9,76%	91,72%	9,70%	8,90%	85,81%
8	10502000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	100,00%	43,50%	43,50%	77,99%	28,60%	22,31%	79,45%	18,20%	14,46%	92,86%	9,70%	9,01%	89,27%
9	10601000	DINAS SOSIAL	100,00%	43,50%	43,50%	75,93%	28,60%	21,72%	77,48%	18,20%	14,10%	92,27%	9,70%	8,95%	88,27%
10	50160000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU	100,00%	43,50%	43,50%	78,42%	28,60%	22,43%	72,15%	18,20%	13,13%	89,09%	9,70%	8,64%	87,70%
11	20101000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	100,00%	43,50%	43,50%	79,56%	28,60%	22,75%	65,52%	18,20%	11,92%	92,05%	9,70%	8,93%	87,11%
12	20201000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	100,00%	43,50%	43,50%	70,64%	28,60%	20,20%	86,83%	18,20%	15,80%	94,80%	9,70%	9,20%	88,70%
13	20301000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	100,00%	43,50%	43,50%	80,33%	28,60%	22,97%	81,15%	18,20%	14,77%	98,32%	9,70%	9,54%	90,78%
14	20502000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100,00%	43,50%	43,50%	82,34%	28,60%	23,55%	74,35%	18,20%	13,53%	91,22%	9,70%	8,85%	89,43%

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.7. – Data Pendukung Halaman 3

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Hasil Perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Implementasi Tahun 2025
(Halaman 2)

15	30401000	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	100,00%	43,50%	43,50%	85,01%	28,60%	24,31%	71,88%	18,20%	13,08%	91,83%	9,70%	8,91%	89,80%
16	20601000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100,00%	43,50%	43,50%	81,11%	28,60%	23,20%	70,30%	18,20%	12,79%	84,59%	9,70%	8,21%	87,70%
17	20901000	DINAS PERHUBUNGAN	100,00%	43,50%	43,50%	77,76%	28,60%	22,24%	72,29%	18,20%	13,16%	89,57%	9,70%	8,69%	87,59%
18	21001000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	100,00%	43,50%	43,50%	84,14%	28,60%	24,06%	58,01%	18,20%	10,56%	87,75%	9,70%	8,51%	86,63%
19	21101000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00%	43,50%	43,50%	82,92%	28,60%	23,72%	61,00%	18,20%	11,10%	84,83%	9,70%	8,23%	86,55%
20	21201000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,00%	43,50%	43,50%	84,04%	28,60%	24,04%	83,56%	18,20%	15,21%	86,36%	9,70%	8,38%	91,12%
21	21301000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	100,00%	43,50%	43,50%	76,45%	28,60%	21,86%	63,66%	18,20%	11,59%	93,16%	9,70%	9,04%	85,99%
22	21601000	DINAS KEBUDAYAAN	100,00%	43,50%	43,50%	85,09%	28,60%	24,33%	56,69%	18,20%	10,32%	86,75%	9,70%	8,41%	86,57%
23	21701000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00%	43,50%	43,50%	84,16%	28,60%	24,07%	65,58%	18,20%	11,94%	89,67%	9,70%	8,70%	88,20%
24	30204000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	99,36%	43,50%	43,22%	80,46%	28,60%	23,01%	53,94%	18,20%	9,82%	88,80%	9,70%	8,61%	84,66%
25	40601903	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	100,00%	43,50%	43,50%	64,65%	28,60%	18,49%	55,29%	18,20%	10,06%	97,99%	9,70%	9,50%	81,56%
26	40601901	BIRO PEMERINTAHAN	100,00%	43,50%	43,50%	82,58%	28,60%	23,62%	63,33%	18,20%	11,53%	94,75%	9,70%	9,19%	87,83%
27	40601908	BIRO KERJASAMA DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	89,41%	28,60%	25,57%	30,34%	18,20%	5,52%	77,58%	9,70%	7,53%	82,12%
28	40601905	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	100,00%	43,50%	43,50%	68,70%	28,60%	19,65%	69,42%	18,20%	12,63%	99,26%	9,70%	9,63%	85,41%
29	40601904	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	100,00%	43,50%	43,50%	83,75%	28,60%	23,95%	28,25%	18,20%	5,14%	94,68%	9,70%	9,18%	81,78%
30	40601902	BIRO HUKUM	100,00%	43,50%	43,50%	78,57%	28,60%	22,47%	49,91%	18,20%	9,08%	91,05%	9,70%	8,83%	83,89%
31	40601909	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	100,00%	43,50%	43,50%	75,14%	28,60%	21,49%	55,46%	18,20%	10,09%	94,00%	9,70%	9,12%	84,20%
32	40606000	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	65,59%	28,60%	18,76%	66,09%	18,20%	12,03%	89,65%	9,70%	8,70%	82,98%
33	40605000	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	100,00%	43,50%	43,50%	83,91%	28,60%	24,00%	69,04%	18,20%	12,57%	80,75%	9,70%	7,83%	87,90%
34	40601910	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00%	43,50%	43,50%	77,45%	28,60%	22,15%	72,21%	18,20%	13,14%	87,05%	9,70%	8,44%	87,24%
35	40603000	SEKRETARIAT DPRD	100,00%	43,50%	43,50%	78,11%	28,60%	22,34%	77,29%	18,20%	14,07%	96,43%	9,70%	9,35%	89,26%
36	40101000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	74,71%	28,60%	21,37%	59,10%	18,20%	10,76%	87,34%	9,70%	8,47%	84,10%

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.7. – Data Pendukung Halaman 4

Data Pendukung : Laporan Indeks Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Hasil Perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Implementasi Tahun 2025
(Halaman 3)

37	40201000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	99,52%	43,50%	43,29%	70,54%	28,60%	20,17%	64,05%	18,20%	11,66%	87,51%	9,70%	8,49%	83,61%
38	40202000	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	77,16%	28,60%	22,07%	71,72%	18,20%	13,05%	90,20%	9,70%	8,75%	87,37%
39	40203000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	72,59%	28,60%	20,76%	69,97%	18,20%	12,73%	91,55%	9,70%	8,88%	85,88%
40	40301000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	74,09%	28,60%	21,19%	65,94%	18,20%	12,00%	78,79%	9,70%	7,64%	84,33%
41	40302000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00%	43,50%	43,50%	79,53%	28,60%	22,75%	77,34%	18,20%	14,08%	93,34%	9,70%	9,05%	89,37%
42	40604000	INSPEKTORAT	99,17%	43,50%	43,14%	79,87%	28,60%	22,84%	57,53%	18,20%	10,47%	67,06%	9,70%	6,50%	82,96%
43	50110000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	100,00%	43,50%	43,50%	75,69%	28,60%	21,65%	81,82%	18,20%	14,89%	94,60%	9,70%	9,18%	89,21%
44	50120000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	100,00%	43,50%	43,50%	77,57%	28,60%	22,18%	88,72%	18,20%	16,15%	93,71%	9,70%	9,09%	90,92%
45	50150000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	100,00%	43,50%	43,50%	72,69%	28,60%	20,79%	87,31%	18,20%	15,89%	93,84%	9,70%	9,10%	89,28%
46	50130000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	99,99%	43,50%	43,50%	78,27%	28,60%	22,39%	85,82%	18,20%	15,62%	91,81%	9,70%	8,91%	90,41%
47	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	100,00%	43,50%	43,50%	73,35%	28,60%	20,98%	87,32%	18,20%	15,89%	92,92%	9,70%	9,01%	89,38%
48	40501000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00%	43,50%	43,50%	68,55%	28,60%	19,60%	76,89%	18,20%	13,99%	97,91%	9,70%	9,50%	86,60%
49	10301000	DINAS BINA MARGA	100,00%	43,50%	43,50%	94,09%	28,60%	26,91%	42,52%	18,20%	7,74%	85,79%	9,70%	8,32%	86,47%
50	40601907	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	88,00%	28,60%	25,17%	84,08%	18,20%	15,30%	92,93%	9,70%	9,01%	92,98%
51	40601906	BIRO KEPALA DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	70,32%	28,60%	20,11%	70,71%	18,20%	12,87%	94,98%	9,70%	9,21%	85,69%

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP. 196902031989031001

Lampiran 3 – LKIP Kota Jakarta Utara Tahun 2025

Lampiran 3.8. – Data Pendukung Halaman 1

Data Pendukung : Laporan Indikator Kinerja Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)

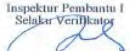
BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara														
Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW IV Tahun 2025														
NO	PENILAIAN PERKIN	PENYELESAIAN TLHP BPK RI								HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT				
		TW I		TW II		TW III		TW IV						
	URAIAN	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	TINDAK LANJUT SKPD	Setuju	Tidak	Catatan	
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Saldo TLHP BPK RI per TW IV Tahun 2022 yang Belum Selesai Ditindaklanjuti)	13	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	16,00	0,00	1. PSU 2023 temuan nomor 3.1 ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Rapat No. 167/PU.10.03 tanggal 24 Oktober 2023 dengan pembahasan Hasil Penelitian Fisk Kewajiban Penyelesaian PT KLSJ sesuai SIPPT tanggal 17 September 2019 Nomor 2127/1.711 diberi nilai 0,5	V		terdapat 4 rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian	
2	Tambahan Rekomendasi (Jika ada LHP Baru)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2. LKPD Tahun 2015 No. 2, 23, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0142/PA.01.03 tanggal 12 Maret 2025 Hal Tindak Lanjut Pengembalian Pembayaran Gaji/Tunjangan Tahun 2014 s.d 2016 diberi nilai 1				
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	13	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	16,00	0,00	3. LKPD Tahun 2014 No.2a, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0142/PA.01.03 tanggal 12 Maret 2025 Hal Tindak Lanjut Pengembalian Pembayaran Gaji/Tunjangan Tahun 2014 s.d 2016 diberi nilai 1				
4	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	25%		25%		25%		25%		4. LKPD Tahun 2014 No.2a, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0142/PA.01.03 tanggal 12 Maret 2025 Hal Tindak Lanjut Pengembalian Pembayaran Gaji/Tunjangan Tahun 2014 s.d 2016 diberi nilai 1				
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	25,00%	#DIV/0!	25,00%	#DIV/0!	25,00%	#DIV/0!	25,00%	5. LKPD Tahun 2024 No.2.14 ditindaklanjuti dengan SPK Pengawasan Kantor Larah Sempur Barat diberi nilai 1				
		Jumlah	3,3	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	4,00	0,00				
6	Capaian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana/target)	Presentase	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!				
7	Capaian Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja	Presentase	25,00%		25%		25%		25%					

- Keterangan :
- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Tindaklanjuti atas LHP yang terbit mulai tahun 2003
 - Target adalah jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang ditetapkan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 80% dari jumlah Rekomendasi.
 - Apabila Realisasi Target Total di akhir tahun tidak mencapai 80% dari jumlah Keseluruhan Rekomendasi maka verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% sedangkan realisasi triwulan (TW IV) mencapai target triwulan
 - Realisasi adalah jumlah Rekomendasi yang selesai di Tindaklanjuti setiap semester.
 - Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian tetap 100%.
 - Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan.

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut


Yaya Mulyana
NIP. 197206131998031009


Shafira Rizki Ramdhanyani
NIP. 199801092020122009

Mengetahui :
Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator

Andi Wibowo
NIP. 197704021998111001



BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW IV Tahun 2025

NO	PENILAIAN PERKIN	PENYELESAIAN TLHP BPK RI										HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
		TW I		TW II		TW III		TW IV		TINDAK LANJUT SKPD		Setuju	Tidak	Catatan
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)					
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Saldo TLHP BPK RI per TW IV Tahun 2022 yang Belum Selesai Ditindaklanjuti)	13	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	16,00	0,00	1. PSU 2023 temuan nomor 3.1 ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Rapat No. 167/PU.10.03 tanggal 24 Oktober 2023 dengan pembahasan Hasil Penelitian Fiskal Kewajiban Penyelesaian PT KLS sesuai SIPPT tanggal 17 September 2018 Nomor 2127/1.711 diberi nilai 0,5				
2	Tambahan Rekomendasi (Jika ada LHP Baru)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. LKPD Tahun 2015 No. 2, 23, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0142/PA.01.03 tanggal 12 Maret 2025 Hal Tindak Lanjut Pengembalian Pembayaran Gaji/Tunjangan Tahun 2014 s.d 2016 diberi nilai 1				
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	13	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	16,00	0,00	2. LKPD Tahun 2015 No. 2, 23, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0142/PA.01.03 tanggal 12 Maret 2025 Hal Tindak Lanjut Pengembalian Pembayaran Gaji/Tunjangan Tahun 2014 s.d 2016 diberi nilai 1				
4	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase 25%		25%		25%		25%		3. LKPD Tahun 2014 No.2a, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0142/PA.01.03 tanggal 12 Maret 2025 Hal Tindak Lanjut Pengembalian Pembayaran Gaji/Tunjangan Tahun 2014 s.d 2016 diberi nilai 1				
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Jumlah	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	4,00	0,00	4. LKPD Tahun 2024 No.2.14 ditindaklanjuti dengan SPK Pengawasan Kantor Larah Sempur Barat diberi nilai 1			
		Presentase	25,00%	#DIV/0!	25,00%	#DIV/0!	25,00%	#DIV/0!	25,00%	#DIV/0!	5. LKPD Tahun 2024 No.3.10 ditindaklanjuti dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara hal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penambahan Ruang MMB Daerah berupa tanah di R. Madya Kebonmuan No. 45 RT 008, Kelurahan Sempur Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Luas 5.000 m2 dan 3.000 m2 diberi nilai 0,5			
		Jumlah	3,3	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	4,00	0,00				
6	Capaian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana/target)	Presentase	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!				
7	Capaian Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja	Presentase	25,00%		25%		25%		25%					

- Keterangan :
- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Tindaklanjuti atas LHP yang terbit mulai tahun 2003
 - Target adalah jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang ditetapkan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 80% dari jumlah Rekomendasi.
 - Apabila Realisasi Target Total di akhir tahun tidak mencapai 80% dari jumlah Keseluruhan Rekomendasi maka verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% sedangkan realisasi triwulan (TW IV) mencapai target triwulan
 - Realisasi adalah jumlah Rekomendasi yang selesai di Tindaklanjuti setiap semester.
 - Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian tetap 100%.
 - Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan.

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut


Yaya Mulyana
NIP. 197206131998031009


Shafira Rizki Ramdhanyani
NIP. 199801092020122009

Mengetahui :
Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator

Andi Wibowo
NIP. 197704021998111001



Penghargaan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

Penghargaan/Prestasi dan Hasil Karya yang diperoleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 yaitu :

A. Penghargaan/Prestasi yang dapat disampaikan antara lain :

1. Kantongi Sertifikasi FIFA, Stadion Tugu Jadi Kebanggaan Warga Jakarta Utara dan Siap Jadi Tuan Rumah Liga Internasional
2 Juni 2025



Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung hasil revitalisasi tahap pertama Stadion Tugu yang kini telah bersertifikat FIFA,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan fasilitas olahraga bertaraf internasional. Salah satu buktinya adalah selesainya revitalisasi tahap pertama Stadion Tugu yang berlokasi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung progres proyek tersebut pada Senin 2 Juni 2025. Dalam kunjungannya, Pramono mengungkapkan bahwa renovasi stadion ini akan dilakukan secara bertahap demi memastikan kualitas pembangunan.

Tahap pertama telah tuntas dengan alokasi anggaran sebesar Rp79,94 miliar dan berhasil meraih sertifikasi FIFA, yang menandakan bahwa stadion ini layak digunakan untuk pertandingan internasional. Dengan rumput stadion sudah berstandar internasional dan telah mendapat sertifikat FIFA, artinya, pemain kelas dunia pun bisa bermain di Stadion Tugu ini.

Tahap Lanjutan dan Fasilitas Penunjang

Tahap kedua revitalisasi akan dimulai dengan anggaran sebesar Rp101 miliar, dengan target rampung bersama tahap ketiga pada akhir Desember 2025. Salah satu tujuan utama revitalisasi ini adalah menjadikan Stadion Tugu sebagai markas resmi Persitara Jakarta Utara, klub sepak bola yang saat ini berlaga di Liga 3. Meski begitu, penetapan Stadion Tugu sebagai homebase Persitara masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Pembangunan ke depan akan difokuskan pada penambahan tribun di sisi utara dan barat dengan kapasitas sekitar 4.200 hingga 5.000 penonton. Juga penambahan fasilitas pendukung seperti area UMKM, serta gerai penjualan merchandise dan jersey klub, guna mendukung ekosistem sepak bola lokal sekaligus ekonomi kerakyatan.

Sentuhan Budaya Betawi di Stadion Modern

Tak hanya mengedepankan standar internasional, tetapi turut menekankan pentingnya sentuhan budaya lokal, seperti ornamen khas Betawi, dalam desain stadion yang tengah dibangun ulang ini. Stadion Tugu harus merepresentasikan kebanggaan warga Jakarta Utara, dengan bukti kualitas lapangannya luar biasa. Sekarang saatnya hadirkan stadion modern yang tetap menjaga identitas lokal.

Dengan progres revitalisasi yang berjalan lancar dan didukung anggaran dari kompensasi pembangunan rumah susun oleh PT Arsyia Mandiri Land, Stadion Tugu berpotensi menjadi simbol baru kebangkitan sepak bola ibu kota, khususnya di wilayah Jakarta Utara.

2. 153 Pengukir Prestasi Terima Anugerah Jakarta Utara 2025

12 Juni 2025



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 153 individu dan kelompok dari berbagai bidang seperti olahraga, kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan hidup, seni budaya, perpustakaan dan kearsipan yang telah menorehkan prestasi baik di tingkat Provinsi DKI Jakarta, Nasional bahkan hingga ke tingkat Internasional.

Pemberian penghargaan kepada para pengukir prestasi itu dikemas dalam acara Anugerah Jakarta Utara Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Bahari, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis (12/6). Selain pemberian sertifikat dan suvenir, para penerima penghargaan juga dihibur oleh penampilan tarian burung raja udang, keroncong tugu, dan vocal grup ASN Jakarta Utara.

"Atas nama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh penerima penghargaan. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang telah saudara saudara tunjukan," tutur Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Juaini didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri.

Beragam prestasi yang mampu mengharumkan nama Jakarta Utara tersebut patut diapresiasi dan menjadi sumber motivasi serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Jakarta Utara. Dengan semangat tinggi dan potensi yang mumpuni tentunya menjadi kekuatan dalam mencetak karya terbaik.

"Prestasi adalah titik awal bukan akhir maka teruslah berlatih, teruslah berkarya, teruslah memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Karena ke depan, tantangan akan semakin besar dan kita semua harus siap menjawabnya dengan semangat dan tekad yang kuat," imbaunya.

Ia juga mengajak kepada semua pihak ikut berkontribusi dan membangun Jakarta Utara untuk menjadi kota yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih membanggakan bagi semua. "Selamat kepada para penerima penghargaan, teruslah menjadi teladan. Jakarta Utara hebat, Jakarta Utara layak anak, dan Jakarta Utara maju," ucapnya.

Sementara itu, dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut disambut baik oleh para penerima penghargaan. "Bangga sekali bisa ada di sini dan menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Terima kasih atas dukungannya. Pastinya, ini akan menjadi penyemangat bagi kami semua untuk terus meningkatkan prestasi," ungkap Nazmudin (16), siswa kelas VIII SMPN 231 Jakarta yang berhasil meraih Juara I Sepak Takraw dalam Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta.

3. JICT Raih Penghargaan Anugerah Jakarta Utara 2025

18 Juni 2025



PT Jakarta International Container Terminal (JICT) kembali menorehkan prestasi dengan meraih Anugerah Jakarta Utara 2025, sebuah bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara kepada para pihak yang telah berkontribusi positif dan mengharumkan nama Jakarta Utara di tingkat nasional, regional, maupun global.

Tahun ini, terdapat 215 nominasi dari berbagai kategori, mencakup perusahaan, komunitas, institusi pendidikan, dan tokoh masyarakat. JICT menjadi salah satu penerima penghargaan utama berkat konsistensinya dalam mendorong transformasi logistik dan memperkuat peran Jakarta Utara sebagai hub perdagangan internasional.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Juaini, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yaitu “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dan stakeholder, termasuk JICT, yang telah menjadi bagian dari upaya bersama membangun Jakarta Utara yang lebih baik. Kolaborasi adalah kunci penting untuk menjawab tantangan kawasan perkotaan ke depan.”

Presiden Direktur JICT, Ade Hartono, menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pengingat atas tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun relasi yang kuat dengan lingkungan yaitu “Penghargaan ini adalah buah dari sinergi yang kami bangun bersama masyarakat dan pemerintah. Sebagai terminal peti kemas terbesar di Indonesia, JICT akan terus berkontribusi aktif dalam memperkuat Jakarta Utara sebagai gerbang perdagangan internasional yang maju dan inklusif.”

Melalui penghargaan ini, JICT berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan wilayah, menjaga keberlanjutan operasional, serta mendorong dampak sosial yang positif melalui program-program kolaboratif ke depan.

4. [Apresiasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Untuk Warga Kelurahan Sunter Agung](#)

18 Agustus 2025

Kelurahan Sunter Agung berhasil meraih Juara I dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebuah pencapaian yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi tata kelola kelurahan.



Kelurahan Sunter Agung Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Gubernur Pramono Anung Berikan Apresiasi Melalui Kunjungan Rekreasi ke Dunia Fantasi.

Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, memberikan penghargaan khusus kepada warga dan perangkat Kelurahan Sunter Agung. “Prestasi ini adalah bukti nyata bahwa semangat kolaborasi dan inovasi di tingkat lokal mampu membawa perubahan besar. Saya bangga terhadap Sunter Agung yang telah menjadi teladan bagi kelurahan lain di Jakarta,” ujar beliau.

Untuk merayakan keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kunjungan rekreasi ke Taman Impian Jaya Ancol – Dunia Fantasi pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan sebagai bentuk penghargaan dan kebahagiaan bersama.

Kunjungan tersebut menjadi simbol bahwa kerja keras dan dedikasi masyarakat tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga kebersamaan dan semangat positif yang terus tumbuh. Kelurahan Sunter Agung diharapkan terus menjadi pelopor dalam pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas di Jakarta Utara.

5. Kecamatan Penjaringan Raih Juara Umum MTQ ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

27 Agustus 2025



Kecamatan Penjaringan berhasil meraih peringkat pertama dan menyandang gelar Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025. Alhasil, piala bergilir yang sebelumnya berada di Kecamatan Koja kini beralih dan bersemayam di Kecamatan Penjaringan.

Dewan hakim telah memutuskan dan menetapkan para pemenang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun daftar peringkat juara MTQ ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut; peringkat pertama diraih oleh Kecamatan Penjaringan, peringkat kedua Kecamatan Tanjung Priok, peringkat ketiga Kecamatan Kelapa Gading, peringkat keempat Kecamatan Koja, peringkat kelima Kecamatan Cilincing, dan peringkat keenam Kecamatan Pademangan.

"Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para juara yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas bacaan, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," imbau Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Juaini dalam acara penutupan MTQ ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara di Balai Yos Sudarso, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

Bagi para peserta MTQ yang belum berhasil meraih juara, Juaini menitipkan pesan agar jangan berkecil hati, teruslah berlatih dan belajar dengan tekun karena kesempatan untuk meraih prestasi masih terbuka lebar di masa yang akan datang. "Sesungguhnya setiap langkah dan usaha yang kalian lakukan dalam memuliakan Al-Qur'an adalah sebuah kemuliaan yang bernilai ibadah," tuturnya didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri.

Keberhasilan para kafilah MTQ dari Kecamatan Penjaringan dalam menyabet gelar Juara Umum MTQ ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara patut diapresiasi dan dipastikan akan membawa nama Jakarta Utara dalam MTQ ke XXXI Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan akan dilaksanakan pada November mendatang.

"Kita berharap pada ajang MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang insya Allah akan diadakan di bulan November 2025, kafilah Jakarta Utara mampu meraih prestasi terbaik hingga keluar sebagai juara umum. Tahun lalu, kita berada di posisi harapan 2 atau peringkat ke 5. Semoga tahun ini, kita bisa meningkatkan prestasi lebih baik lagi," harap Juaini.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Administrasi Jakarta Utara, Ustaz Ahmad Mulki Sulaeman menyampaikan bahwa total peserta MTQ ke XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara mencapai 172 orang. "Tahun ini, kita menampung peserta dengan jumlah banyak untuk memberikan motivasi ke warga Jakarta Utara. Alhamdulillah, selama dua hari pelaksanaan berjalan lancar. Setelah ini, kita adakan pembinaan bagi para juara sebagai persiapan menuju MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta," teranginya.

6. Lurah Rawa Badak Utara Raih Penghargaan Non Litigasi Pembuat Perdamaian dari Kemenkumham

18 September 2025

Kasubkel Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Erwin Jati Kusuma menjelaskan, ada lima lurah di wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten di wilayah DKI Jakarta yang mendapatkan penghargaan Non Litigation Peacemaker di mana lurah tersebut sudah mengikuti tahapan diklat paralegal, pada hari Selasa tanggal 18 September 2025. Di Jakarta Utara sendiri sudah terdapat 10 Lurah yang memiliki gelar Non Litigation Peacemaker.



Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberikan penghargaan Non Litigation Peacemaker kepada Lurah Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

7. [Walikota Jakarta Utara Dampingi Gubernur Resmikan Universitas PTIQ sebagai Kampus Peradaban Qur'an Internasional](#)
23 September 2025



Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta sebagai Kampus Peradaban Qur'an Internasional di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

PTIQ menjadi teladan bagi kampus lain sekaligus sumber intelektual masa depan, terus berinovasi meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi teladan bagi universitas lain, serta menjadi sumber intelektual masa depan republik ini.

Dalam peresmian tersebut, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa kehadiran PTIQ menjadi teladan bagi kampus lain sekaligus sumber intelektual masa depan. “Semoga kampus ini terus berinovasi meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi teladan bagi universitas lain, serta menjadi sumber intelektual masa depan republik ini,” ujarnya.

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa hadirnya PTIQ di Jakarta Utara memberi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat pesisir. “Masyarakat kita membutuhkan dunia pendidikan yang bagus juga di Jakarta Utara. Insya Allah PTIQ akan menjadi pencerahan dan kebanggaan baru,” tuturnya. Peresmian ini sekaligus menandai langkah nyata menjadikan Jakarta bukan hanya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga pusat lahirnya gagasan, budaya, dan peradaban.

8. [Walikota Jakarta Utara Terima Penghargaan Perdamaian dari UNPKFC](#) 29 September 2025



Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menerima kunjungan Global President *United Peace Keepers Federal Council* (UNPKFC), Dr. Aphinita Chaichana, di Ruang Tamu Walikota pada hari Jumat tanggal 29 September 2025.

Kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga untuk memberikan penghargaan kepada Walikota sebagai kepala daerah yang dinilai berkomitmen menjaga perdamaian dan kerukunan di wilayah Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Walikota Hendra Hidayat juga diumumkan sebagai perwakilan Indonesia yang akan diundang menghadiri Global Summit UNPKFC bersama 160 kota dunia lainnya di Thailand, Desember 2025 mendatang.

Walikota Hendra menyampaikan apresiasi atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan. “Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Jakarta Utara. Semangat kebersamaan dan persatuan yang terjaga adalah kunci utama terciptanya kerukunan,” ucapnya.

Dr. Aphinita Chaichana menegaskan bahwa Jakarta Utara bisa menjadi teladan global. “Kami melihat Jakarta Utara berhasil menjaga harmoni di tengah keberagaman. Inilah nilai perdamaian yang patut diapresiasi dan ditularkan ke berbagai belahan dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Kolonel Filda Malari, Founder Indonesia Brain Camp, menambahkan pentingnya kolaborasi lintas negara. “Kehadiran UNPKFC di Jakarta Utara bersama pemerintah daerah menunjukkan bahwa perdamaian dapat diwujudkan jika semua pihak mau bekerja sama,” katanya.

9. Tim Robotik Jakarta Utara Wakili DKI di Ajang Pekan Kreativitas Pemuda di Palembang



21 Juli 2025



15 Oktober 2025

Robot Smart Pemuda Jakarta Utara, karya Akmal Firmansyah dan Richard D'Angelo, mewakili DKI Jakarta di Ajang Kreativitas Pemuda Nasional 2025. Apa keunggulan robot ini?

Dua pemuda asal Jakarta Utara, Akmal Firmansyah dan Richard D'Angelo Duykers, berhasil mengharumkan nama daerahnya dengan terpilih mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam ajang Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (PKPI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI di Palembang, Sumatera Selatan, pada 14–18 Oktober 2025.

Keduanya merupakan bagian dari Tim Cyber Sprinters, komunitas robotik binaan Sudin Pemuda dan Olahraga (Sudin Pora) Jakarta Utara, sebelumnya telah meraih juara pertama di AKP tingkat provinsi pada bulan Juli 2025 yang lalu.

Dalam ajang PKPI 2025 ini, mereka berkompetisi di bidang Teknologi Informasi Perangkat Keras (hardware). Robot Smart ini dirancang khusus untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan perkotaan yang kompleks, dan menampilkan inovasi robot maket Smart Home dan Smart City yang dirancang untuk membantu efisiensi energi dan penanganan banjir di wilayah perkotaan.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian Akmal dan Richard. Prestasi ini membuktikan bahwa generasi muda Jakarta Utara memiliki kompetensi dan semangat juang tinggi dalam bidang teknologi dan inovasi serta mengharumkan nama daerah di kancah nasional.

Inovasi Robot Smart untuk Solusi Perkotaan

Akmal Firmansyah (22) menjelaskan bahwa robot Smart yang mereka kembangkan telah melalui riset mendalam. Robot ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Konsepnya mengintegrasikan teknologi smart home dan smart city. Riset yang dilakukan berfokus pada penyelesaian masalah sosial krusial. Beberapa isu yang menjadi target antara lain penanganan banjir, pengembangan rumah cerdas, dan upaya penghematan energi listrik. Hal ini menunjukkan relevansi inovasi mereka dengan kebutuhan masyarakat.

Akmal dan Richard terus melakukan peningkatan atau *upgrade* pada rancangan robot mereka. Tujuannya adalah memastikan bahwa robot ini dapat diimplementasikan secara nyata. Mereka berharap inovasi ini bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan perkotaan.

Akmal Firmansyah (22), mahasiswa Universitas Esa Unggul, mengaku bangga sekaligus tegang menghadapi ajang nasional ini. Namun, ia optimis bisa menampilkan yang terbaik di hadapan juri. “Rancangan kami ini berupa smart home dan smart city yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi robotik. Selain untuk lomba, kami juga berharap ini bisa diterapkan di dunia nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, keikutsertaan di PKPI bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga kesempatan untuk menimba pengalaman dan memperluas jaringan. “Di sini kami bukan cuma berkompetisi, tapi juga belajar banyak hal dan bertemu teman baru dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa membawa pulang juara untuk Jakarta,” tuturnya.

Dukungan Penuh Pemerintah dan Harapan Besar

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menegaskan bahwa kesuksesan Akmal dan Richard bukan hanya kebanggaan pribadi. Ini juga membawa nama baik bagi Jakarta Utara secara keseluruhan. Pencapaian ini menjadi bukti nyata kapasitas dan kreativitas tinggi yang dimiliki pemuda di wilayahnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (Sudin Pora) Jakarta Utara, Adi Jaya Gumelar, menyatakan akan terus mendukung pengembangan talenta pemuda melalui program pembinaan dan fasilitasi berkelanjutan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap potensi generasi muda.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepemudaan Sudin Pora Jakarta Utara, Julio Yusuf, mengaku bangga atas pencapaian dua anak muda tersebut. “Ini kebanggaan bagi kami. Tim Robotik Jakarta Utara untuk pertama kalinya bisa berlaga di tingkat nasional. Kami yakin mereka bisa menampilkan yang terbaik,” katanya.

Julio menjelaskan, tim Cyber Sprinters sebelumnya telah melalui perjalanan panjang, mulai dari juara tingkat kota hingga provinsi, sebelum akhirnya mewakili DKI Jakarta. Ia juga berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk berani berinovasi dan berkreasi. “Sudah saatnya pemuda menunjukkan kontribusi nyata lewat kreativitas. Kami dari pemerintah akan terus mendukung langkah positif seperti ini,” tegasnya

Ajang kreativitas tingkat nasional pada Oktober 2025 dapat terus memupuk bakat pemuda. Dengan demikian, akan lahir generasi berprestasi yang mampu menginspirasi pemuda lainnya. Harapan besar tersemat agar robot ini dapat mengharumkan nama Jakarta.

Akmal Firmansyah sendiri merasa bangga dapat mewakili Jakarta di tingkat nasional. Ia optimistis robot mereka dapat mengharumkan nama ibu kota. Dukungan dari jajaran pemerintah kota dan Sudin Pora Jakarta Utara menjadi motivasi utama bagi mereka.

10. Kebon Bawang Dikukuhkan Jadi Kelurahan Binaan Imigrasi, Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM Ditingkatkan

2 Oktober 2025



Kelurahan Kebon Bawang dikukuhkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025. Sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) lebih ditingkatkan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mendukung penuh kebijakan dikukuhkannya Kelurahan Kebon Bawang menjadi Kelurahan Binaan Imigrasi. Hal ini sebagai langkah awal yang besar terhadap kecepatan koordinasi pencegahan TPPO dan TPPM di lingkungan masyarakat.

"Program pemerintah tidak bisa berjalan sendirian, butuh kerja sama masyarakat termasuk melalui RT/RW. Masyarakat akan diberikan pemahaman melalui edukasi terhadap TPPO dan TPPM hingga pada akhirnya meningkatkan kepedulian sosial," kata Fredy Setiawan dalam sambutannya di Kantor Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja berterima kasih atas kesediaan Kelurahan Kebon Bawang sebagai Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi. Kebijakan ini diharap dapat mencegah TPPO dan TPPM sedari tingkat paling bawah, yakni lingkungan masyarakat.

"Data yang kami miliki, per 1 Januari hingga Agustus 2025 ini saja sudah ada lebih dari 2.000 warga yang kami cegah keberangkatannya ke luar negeri karena disinyalir sebagai korban penipuan TPPO. Semoga pengukuhan ini dapat memperkuat pengawasan, literasi hukum, dan sinergi yang kuat bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Imam Setiawan menerangkan Kelurahan Kebon Bawang menjadi Kelurahan ketiga yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi di wilayah tugasnya, menyusul Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Untung Jawa. Dalam kesempatan ini, dikukuhkan pula dua petugas Kantor Imigrasi kelas 1 Tanjung Priok sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa/Kelurahan untuk Kelurahan Kebon Bawang.

Dengan dikukuhkan ini, semoga kolaborasi dan sinergitas terjalin dengan baik dan mempunyai manfaat bagi warga di Jakarta Utara. Utamanya dapat memberikan ruang diskusi pencegahan TPPO dan TPPM.

11. Kelurahan Sunter Agung Raih Juara Harapan II dalam Lomba Tari Kreasi Ondel-Ondel Tingkat Provinsi DKI Jakarta

6 Oktober 2025

Dalam kompetisi yang diikuti oleh berbagai perwakilan kelurahan dari lima wilayah kota administrasi, tim tari Kelurahan Sunter Agung berhasil meraih Juara Harapan II Tingkat Kota Administrasi Jakarta Harapan II Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.



Kelurahan Sunter Agung kembali menunjukkan kiprahnya dalam pelestarian budaya Betawi dengan mengikuti ajang *Lomba Tari Kreasi Ondel-Ondel* tingkat Provinsi DKI Jakarta yang digelar pada Sabtu, 4 Oktober 2025, di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta Selatan.

Prestasi ini menjadi bukti nyata semangat Kelurahan Sunter Agung dalam mengangkat nilai-nilai budaya lokal melalui ekspresi seni yang kreatif dan dinamis.

Lurah Kelurahan Sunter Agung, Teguh Subroto, S.STP menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penari, pelatih, dan warga yang telah mendukung persiapan hingga pelaksanaan lomba. “Kami bangga atas pencapaian ini. Meski belum menjadi juara utama, semangat dan kekompakan tim menunjukkan bahwa budaya Betawi tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.

Tari kreasi yang ditampilkan menggabungkan elemen tradisional ondel-ondel dengan sentuhan modern, baik dari segi musik, kostum, maupun koreografi. Penampilan tersebut mendapat sambutan hangat dari para juri dan penonton yang hadir.

Ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat hubungan antar warga dan memperkuat identitas budaya Jakarta. Kelurahan Sunter Agung berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni dan budaya, serta mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhur.

12. Kelurahan Sunter Agung Wakili DKI Jakarta Dalam Penilaian Kelurahan Awards Tingkat Nasional 2025

27 Oktober 2025



Setelah dinyatakan lolos administrasi, Kelurahan Sunter Agung sebagai perwakilan Provinsi DKI Jakarta kembali melangkah dalam tahapan selanjutnya yaitu penilaian pemaparan, wawancara, dan klarifikasi data Penjaringan Pemerintahan Desa/Kelurahan Awards Tingkat Nasional Tahun 2025.

Kegiatan penilaian lomba Kelurahan Award Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI tersebut berlangsung secara virtual di Ruang Bahari, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 orang dari berbagai stakeholder di tingkat kota.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi Kelurahan Sunter Agung yang terpilih mewakili DKI Jakarta. "Saya berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semuanya yang terlibat langsung dan mendukung pelaksanaan kegiatan Penjaringan Pemerintahan Desa/Kelurahan Awards Tingkat Nasional Tahun 2025," ungkap Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat.



Kelurahan Sunter Agung sebelumnya sudah dinobatkan sebagai Kelurahan Terbaik di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan kini sukses melangkah lebih jauh ke tingkat nasional setelah lolos berbagai tahapan seleksi dan verifikasi ketat dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Prestasi ini bukan hanya milik Jakarta Utara, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat DKI Jakarta. Keberhasilan ini tentu menjadi inspirasi bagi kelurahan lainnya untuk terus berinovasi dan berkolaborasi, dan juga capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Kelurahan Sunter Agung dalam mewujudkan tata kelola kelurahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan wilayahnya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Jakarta Utara, Kelurahan Sunter Agung lolos menjadi yang terbaik di tingkat nasional, telah menorehkan prestasi yang luar biasa karena selama dua kali berturut-turut berhasil meraih prestasi dalam lomba Kelurahan Tingkat Nasional Regional 2. Momentum yang membanggakan tersebut dimulai dari tahun 2023 di mana Kelurahan Pegangsaan Dua meraih Juara 1. Sementara, pada 2024 Kelurahan Sunter Jaya raih Juara 2 tingkat nasional.

Lurah Sunter Agung, Teguh Subroto menambahkan, lomba Kelurahan Award ini ada tiga tahapan yakni administrasi, verifikasi lapangan, dan paparan. Pada hari ini dilakukan penilaian pemaparan, wawancara, dan klarifikasi data. Dukungan semua pihak yang luar biasa, kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan kunci keberhasilan.

Usai menjalani serangkaian penilaian, Lurah Sunter Agung, Teguh Subroto menyatakan rasa syukur karena proses penilaian telah berjalan dengan lancar. Saat penilaian virtual, Teguh Subroto memaparkan berbagai potensi dan program unggulan yang ada di wilayah Kelurahan Sunter Agung. Seperti halnya, program ketahanan pangan, urban farming, pengelolaan sampah, koperasi merah putih, dan lain-lain.

Inovasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025

Inovasi mendukung program/kegiatan agar tidak tertinggal dengan zaman yang cepat berubah. Inovasi tidak harus berangkat dari ide yang besar, bisa melakukannya dari ide-ide kecil seperti menciptakan produk atau layanan yang cocok dengan tren yang sedang naik daun. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tertarik dan menganggap bahwa pemerintah daerah peduli dengan selera Masyarakat.

Inovasi yang dapat disampaikan antara lain :

Ada 2 (dua) usulan Inovasi Publik, Inovasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan informasi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0099 Tahun 2025 tanggal 22 September 2025 Tentang Data Inovasi Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025.
- b. Menetapkan Inovasi Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota tersebut.
- c. Lampiran :

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Bentuk Inovasi	SKPD/UKPD	Tahun
1	Kebun Gangnam	Non Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Pegangsaan Dua	2025
2	“Kopi Jerman” (Kompur Minyak Jelantah Bermanfaat)	Non Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Sunter Agung	2025

Kedua inovasi tersebut yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1. Inovasi Kebun Gangnam, Pegangsaan Dua Raih Juara Satu Kategori Kelurahan JIA 2025
25 Oktober 2025

Kelurahan Pegangsaan Dua meraih juara satu kategori Kelurahan dalam ajang Jakarta Innovation Award 2025.

Ajang Jakarta Innovation Award Tahun 2025 berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 malam. Acara ini merupakan rangkaian Jakarta Innovation Days Tahun 2025 yang mengusung tema *Explore, Connect, Impact*.

Lewat inovasi Kebun Gangnam, Kelurahan Pegangsaan Dua menyalip dua nominator lainnya, yaitu Kelurahan Cikoko dan Kelurahan Pulau Pari.



Lurah Pegangsaan Dua, Sarmudi mengucapkan syukur atas prestasi tersebut. Kemenangan ini merupakan prestasi semua pihak yang telah mendukung inovasi Kebun Gangnam. Pengembangan Kebun Gangnam yang sebagai inovasi pusat urban farming yang produktif, edukatif, dan berkelanjutan.

Di lahan seluas 1.330 meter persegi itu, terdapat sejumlah program unggulan terintegrasi, mulai dari program beli sayur dan buah dengan petik sendiri, kolam gizi dahsyat, agro eduwisata, rumah edukasi, produk snack sehat, pembuatan kompos, serta rutin mempromosikan produk di bazar tingkat kota dan kecamatan. Prestasi ini tentunya menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan maupun melahirkan inovasi lainnya.

2. Inovasi “Kopi Jerman” (Kompur Minyak Jelantah Bermanfaat)

September 2025

Kelurahan Sunter Agung ditunjuk sebagai Kelurahan Percontohan terkait dengan pengelolaan sampah, dengan ini mencoba berinovasi memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan bakar untuk kompor, yang disebut Kopi Jerman. Dari sampah menjadi energi terbarukan guna untuk masyarakat Kelurahan Sunter Agung, sebagai moto bagaimana kita bisa mengolah sampah menjadi ketahanan energi bagi kita semua.



Inovasi lain yang dapat disampaikan antara lain :

3. Inovasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Jakarta Utara

8 Februari 2025



Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan Jakarta Utara sebagai kota percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Langkah ini diambil dengan tujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan mengurangi timbunan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Melalui kebijakan ini, Jakarta Utara diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia dalam menangani masalah sampah yang semakin mendesak.

Jakarta Utara akan menjadi percontohan. KLH memberikan dorongan agar program ini berjalan dengan baik, hal tersebut mencerminkan harapan besar dari KLH agar Jakarta Utara dapat menjadi pionir dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan Jakarta Utara dapat berhasil menjalankan peranannya sebagai kota percontohan ini.

Salah satu fokus utama yang akan diimplementasikan adalah penerapan sistem pengelolaan sampah di tingkat Rukun Warga (RW), yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga sebelum memasuki Tempat Pembuangan Sampah (TPS).



Dengan sistem ini, setiap RW akan memiliki inisiatif pengelolaan sampah mandiri, yang tentunya akan sangat membantu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPS.

Dengan harapan setiap RW dapat memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri yang berkontribusi dalam mengurangi sampah rumah tangga sebelum sampai ke TPS. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah sampah sejak dari rumah.

Tidak hanya itu, optimalisasi bank sampah juga akan menjadi bagian penting dari strategi utama. Melalui konsep ekonomi sirkular, DLH DKI Jakarta bertujuan untuk memperkuat keberadaan bank sampah sebagai wadah pengelolaan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali.

Kolaborasi dengan berbagai organisasi terkait juga telah dipersiapkan untuk mendukung program ini, termasuk Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Indonesian Packaging Recovery Organization (IPRO), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), serta para pegiat maggot.

Salah satu inovasi yang diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah di Jakarta Utara adalah pengoperasian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan. RDF Plant yang diklaim sebagai yang terbesar di dunia ini akan segera diresmikan oleh Gubernur Terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Dengan adanya RDF Plant Jakarta, kita bisa mengurangi kiriman sampah ke Bantar Gebang secara signifikan. Teknologi ini diharapkan dapat mengubah sampah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan.

Sebagai kota percontohan, Jakarta Utara diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan penerapan pengelolaan sampah terintegrasi, pengoptimalan bank sampah, serta pemanfaatan RDF Plant, kota ini berpotensi menjadi pelopor dalam menciptakan kota ramah lingkungan di Indonesia.

Langkah ini juga memberikan harapan agar pengelolaan sampah yang lebih efektif dapat menginspirasi perubahan pola pikir masyarakat, dari yang sebelumnya cenderung membuang sampah sembarangan, kini menjadi lebih peduli terhadap pengolahan dan daur ulang sampah.

Melalui upaya ini, Jakarta Utara tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga pada penciptaan sebuah sistem yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Diharapkan, dengan langkah-langkah konkret yang telah disusun, Jakarta Utara akan menjadi contoh nyata bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengelola sampah secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Inilah langkah besar yang diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.

4. Inovasi Laboratorium Pengelolaan Sampah

13 Februari 2025

JAKARTA terus berbenah dalam pengelolaan sampah. Kali ini, Pemerintah Provinsi Jakarta menjadikan Jakarta Utara sebagai model percontohan. Langkah ini diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan inovatif.



Jakarta Utara, Uji Coba Sistem Pengelolaan Terpadu

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan bahwa Jakarta mendapat mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjalankan rencana strategis pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Program utama yang diterapkan adalah “KuPiLah” (Kurangi, Pilah, Olah), yang mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat rukun warga (RW). Harapannya, setiap RW bisa mengelola sampah mandiri sebelum sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS). Dengan pendekatan ini, volume sampah rumah tangga bisa ditekan sejak dari sumbernya.

Selain itu, optimalisasi bank sampah juga menjadi bagian dari strategi ini. Konsep ekonomi sirkular diperkuat dengan sistem insentif yang memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah anorganik.

Menghubungkan Sampah dengan Ketahanan Pangan

Inovasi lain yang diterapkan di Jakarta Utara adalah program Pengelolaan Sampah Organik Terintegrasi. Program ini dikaitkan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana hasil pengolahan sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Maggot yang dihasilkan bisa menjadi pakan ternak dan ikan, menciptakan siklus keberlanjutan yang menguntungkan.

Pendekatan ini bukan hanya soal sampah, tetapi juga tentang ketahanan pangan, yang menerapkan konsep hulu, tengah, hingga hilir dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha.

RDF Plant Jakarta, Solusi di Hilir

Di sisi hilir, Jakarta Utara juga akan segera mengoperasikan Refused Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan. Fasilitas ini akan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang bisa digunakan oleh industri. Dengan RDF Plant terbesar di dunia ini, Jakarta bisa mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang.

Hal ini adalah langkah strategis untuk mengurangi volume sampah dan memanfaatkan limbah menjadi energi alternatif.

Kolaborasi dan Regulasi untuk Sektor Horeka

Selain masyarakat, sektor bisnis juga menjadi sasaran utama dalam program ini. Pemprov DKI Jakarta menerapkan skema baru di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Pelaku usaha diwajibkan memilah sampah dan mengikuti sistem retribusi berbasis pemrosesan limbah.



Jakarta Utara jadi percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Masyarakat diajak aktif memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya

Model bisnis *business-to-business* (B2B) juga didorong agar pengelolaan sampah di sektor Horeka lebih efektif. Berbagai asosiasi seperti Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), *Indonesian Packaging Recovery Organization* (IPRO), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) turut serta dalam program ini.

Fakta dan Tantangan Pengelolaan Sampah di Jakarta

Data menunjukkan bahwa Jakarta menghasilkan 7.500 ton sampah per hari. Dari total produksi sampah tersebut, 60% berasal dari permukiman, sementara sisanya dari industri dan bisnis.

Selama periode 2019-2022, DKI Jakarta mencatat 11,25 juta ton timbunan sampah. Pada 2022 saja, produksi sampah mencapai 3,11 juta ton, menjadikannya yang terbanyak keempat di Indonesia.

Distribusi sampah di Jakarta berdasarkan wilayah :

- Jakarta Timur: 3,33 juta ton (29,6%)
- Jakarta Selatan: 2,81 juta ton
- Jakarta Barat: 2,18 juta ton
- Jakarta Utara: 1,96 juta ton
- Jakarta Pusat: 927,89 ribu ton
- Kepulauan Seribu: 25,49 ribu ton

Dengan angka yang terus meningkat, strategi pengurangan sampah sejak dari sumbernya menjadi semakin penting.

Jakarta Utara, Role Model Nasional?

Pemerintah Provinsi Jakarta berharap strategi ini bisa menjadi rujukan nasional. Dengan kombinasi edukasi masyarakat, regulasi bisnis, dan teknologi pengolahan limbah, Jakarta Utara diharapkan menjadi contoh kota yang berhasil mengelola sampah secara berkelanjutan.

Namun, tantangan masih ada. Konsistensi dalam implementasi, partisipasi aktif masyarakat, serta kesinambungan kebijakan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Apakah pendekatan ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, Jakarta Utara kini menjadi laboratorium bagi masa depan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.

5. Inovasi Hijau Kelurahan Sunter Jaya

20 Februari 2025

Inovasi Hijau: Jakarta Utara Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Efektif.



Berawal dari pilah sampah yang sudah dilaksanakan oleh warga di RW 001 Kelurahan Sunter Jaya didapati banyak sampah yang berupa bungkus makanan ringan, bungkus kopi sachet, bungkus deterjen, bungkus bumbu penyedap, kantong kresek dan kantong plastik lainnya berakhir di tempat sampah.

Inovasi Hijau: Jakarta Utara Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Efektif Jakarta

Kota Administrasi Jakarta Utara resmi ditunjuk sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) RI, Noer Adi Wardoyo dalam kegiatan pemaparan peta jalan (road map) pengelolaan sampah di Jakarta Utara yang dilaksanakan di Ruang Bahari, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto memaparkan road map pengelolaan sampah di Jakarta Utara. Adapun materi yang disampaikan meliputi strategi pengolahan sampah di Jakarta Utara, timbunan sampah, data bank sampah RW dan pola pengelolaan, sebaran bank sampah, TPS 3R Jakarta Utara, 51 pusat olahan organik dengan BSF 2024, data timbunan sampah sekolah, dan skema kolaborasi rencana aksi pengelolaan sampah.

Untuk langkah awal bagaimana seluruh komponen mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga ke seluruh masyarakat beserta asosiasi di Jakarta Utara seperti hotel, restoran, kafe, dan lain-lain berkolaborasi dalam mengelola sampah dari sumbernya. Meskipun bukanlah pekerjaan yang mudah tapi membutuhkan usaha dari jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim sangat mendukung penuh aksi implementasi road map pengelolaan sampah di DKI Jakarta, yang juga melibatkan PPSU dan PKK dalam melakukan pendampingan BPS RW bersama dengan PJLP pendamping dari Sudin LH Kota Administrasi Jakarta Utara.

6. Inovasi Simbaju

9 September 2025



Sudin PPKUKM Jakarta Utara Luncurkan Inovasi Simbaju

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Utara meluncurkan inovasi berbasis website Sistem Informasi Permohonan Bazar Jakarta Utara (Simbaju) bagi masyarakat umum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inovasi Simbaju sebagai upaya digitalisasi pelayanan publik untuk memfasilitasi bazar UKM.

Ia berharap, dengan aplikasi ini dapat memberikan kepastian dukungan penyelenggaraan bazar dengan koordinasi kewilayahan yang lebih baik dan inovasi ini dapat disosialisasikan secara intensif agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara, Vicky Suryawan Jaya mengatakan, inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengurangi risiko dan hambatan pelaksanaan bazar UKM. Simbaju merupakan inovasi baru kami untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan permohonan kegiatan bazar melalui Sudin PPKUKM.

Inovasi ini hadir karena banyak masyarakat maupun jajaran Lurah atau Camat yang memohon dukungan kegiatan bazar. Untuk itu, dengan inovasi ini dapat memangkas birokrasi, bahkan setiap pemohon dapat dimonitor secara lebih cepat dan terbuka.

Maka, bagi masyarakat yang ingin mengadakan bazar dapat mengakses situs disppkukm.jakarta.go.id/simba/ atau melalui utara.jakarta.go.id.

Kepala Seksi Perdagangan Sudin PPKUKM Jakarta Utara, Andini Sutianti menambahkan, dalam mendukung kegiatan bazar, pihaknya dapat membantu penyediaan perlengkapan seperti tenda, meja, kursi, kipas angin, lampu penerangan, dan lainnya. Permohonan bazar ini gratis, pemohon hanya perlu melengkapi data seperti proposal kegiatan, surat izin lokasi atau wilayah, izin keramaian, dan surat pernyataan.

7. Inovasi Digital



Walikota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat meresmikan aplikasi Trans RT RW sebagai inovasi transparansi keuangan RT dan RW

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara resmi meluncurkan platform digital pelaporan keuangan RT/RW bernama Transparansi dan Akuntabilitas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Trans RT/RW).

Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menjelaskan bahwa digitalisasi laporan keuangan ini merupakan langkah penting menuju sistem yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses.

Melalui Trans RT/RW, laporan dapat dipantau secara real-time, meminimalisir kesalahan, sekaligus menjadi sarana kontrol bersama masyarakat. Dengan adanya sistem ini, pengurus RT/RW bisa lebih tertib administrasi dan warga juga dapat melihat penggunaan dana secara terbuka. Harapannya, Jakarta Utara bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di ibu kota.

Dukungan dari Pemerintah Pusat

Program inovatif ini turut mendapat apresiasi dari Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Murtono yang menilai, Trans RT/RW merupakan terobosan pertama di Indonesia dalam menghadirkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat lingkungan, yang merupakan cerminan adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Maka inovasi digital ini mendapat dukungan penuh sehingga platform ini bisa dikembangkan lebih luas.

Jawaban atas Minimnya Transparansi

Sementara itu, Sekretaris Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan, menyebut bahwa Trans RT/RW lahir dari permasalahan minimnya laporan keuangan RT/RW.

Dari 460 RW dan 5.315 RT di Jakarta Utara, hanya sekitar 8 persen yang melaporkan penggunaan dana secara transparan.

Sebagai tahap awal, program ini akan diujicobakan di 12 RT dan 12 RW dari enam kecamatan di Jakarta Utara.

Respons Positif dari Warga

Ketua RW 05 Sunter Agung, Nurus Shobah, menyambut baik peluncuran platform ini. Menurutnya, Trans RT/RW akan mempermudah warga dalam memantau penggunaan dana publik. Dengan adanya aplikasi ini, warga bisa lebih percaya bahwa dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan.

Dengan hadirnya Trans RT/RW, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berharap tata kelola keuangan di tingkat RT dan RW bisa lebih transparan, tertib, sekaligus menjadi contoh nasional dalam penerapan teknologi digital untuk pelayanan masyarakat.

8. Inovasi Kecamatan Koja

Inovasi Kecamatan Koja, Inovasi GERAJ Memulai Usaha Starting a Business Corner.

Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berbasis Online Single Submission (OSS) dan Sistem Pendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha saat mengajukan perizinan /non perizinan mulai dari tahap awal permohonan sampai dengan izin/non izin diterbitkan (end to end processs) guna memastikan kegiatan usaha yang dijalankan mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum.

GERAJ memulai usaha
Starting a Business Corner

Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berbasis Online Single Submission (OSS) dan Sistem Pendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha saat mengajukan perizinan/nonperizinan mulai dari tahap awal permohonan sampai dengan izin/nonizin diterbitkan (end to end processs) guna memastikan kegiatan usaha yang dijalankan mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum.

URUS IZIN SANGKUT MUDAH

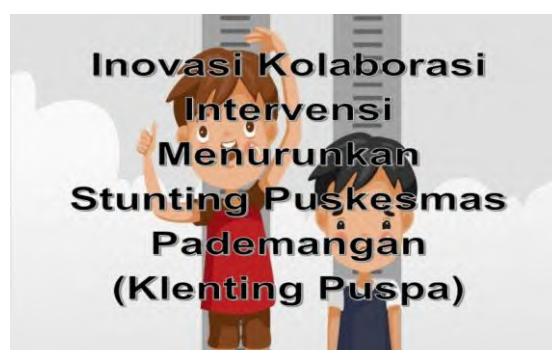
1600866
@pelayananjakarta
/PelayananJakarta
PelayananJakarta
pelayanan.jakarta.go.id

INFO LEBIH LANJUT

Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) : Syahrul Mubarak 081932991448
Layanan Call Center WA UP PMPTSP Kecamatan Koja : 085892449700 (Chat Only)
Instagram UP PMPTSP Kecamatan Koja : upptspkeckoja
Facebook UP PMPTSP Kecamatan Koja : UP PTSP KOJA
Linktree : linktr.ee/ptspkecamatankoja1
Alamat Kantor Pelayanan UP PMPTSP Kecamatan Koja : Kantor Camat Koja Lantai 1, Jl. Mangga No. 1, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja

9. Inovasi Kecamatan Pademangan

Inovasi Kolaborasi Intervensi Menurunkan Stunting Puskesmas Pademangan



Latar Belakang

1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden ini mengatur antara lain mengenai :

- 1) Strategi nasional percepatan penurunan stunting;
- 2) Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- 3) Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 5) Pendanaan.

3. Pengertian Tentang Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran : remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

4. Apa itu Klenting Puspa

Klenting Puspa adalah singkatan dari Kolaborasi Intervensi Menurunkan Stunting Puskesmas Pademangan, sebuah inovasi layanan yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Pademangan untuk mengintervensi dan menurunkan kasus stunting melalui kolaborasi lintas sektoral.

Tujuan : Memperkuat intervensi stunting melalui kolaborasi dengan lintas sektoral, pihak kolaborator dari BUMD, dan Swasta agar berhasil membuat 22% balita di Jakarta bebas dari stunting.

Analisis Masalah : Kondisi stunting akan membawa dampak pada perkembangan seseorang di masa dewasanya. Kemampuan kognitif yang rendah, mudah terinfeksi penyakit, menjadi kurang produktif dan tentunya akan melahirkan anak-anak yang kondisinya juga sama, sehingga masalah stunting menjadi penghambat dari Pembangunan Manusia Indonesia yang cerdas dan produktif.